

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 SEMESTER I



**BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN MAKASSAR**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Makassar Semester I Tahun 2024 dapat tersusun.

Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban BBKK Makassar selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yang memberikan gambaran tentang pencapaian program-program kegiatan serta evaluasi kinerja BBKK Makassar tahun 2024 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif guna peningkatan kinerja Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Makassar pada tahun berikutnya.

Makassar, 31 Juli 2024

Kepala Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan
Makassar,



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP. 196908221993031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian kinerja tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun terdapat 1 (satu) indikator yang belum berproses sampai akhir Juni 2024, karena BBKK Makassar tidak termasuk dalam lokus pemeriksaan BPK sampai dengan Juni 2024.

Adapun 8 (delapan) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN.
Target bernilai 1, realisasi bernilai 1, sehingga capaian menjadi 100%.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.157.939.000,-, realisasi Rp. 985.234.846,-, sehingga capaian sebesar 45,66%.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
Target 100%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 100%.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 502.410.000,- realisasi Rp. 231.325.000,- sehingga capaian sebesar 46,04%
3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Target bernilai 0,96, realisasi 0,88, sehingga capaian menjadi 91,67%
Pagu Anggaran Rp. 571.546.000,- realisasi Rp 233.796.660,- sehingga capaian sebesar 40,91%
4. Nilai kinerja anggaran
Target 85, realisasi 48,59, serta capaian sebesar 57,16%
Pagu Anggaran Rp. 359.202.000,- realisasi Rp. 140.616.503,- sehingga capaian sebesar 39,15%
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Target 90, realisasi 95,64, dengan capaian sebesar 106,27%
Pagu Anggaran Rp. 26.056.666.000,- realisasi Rp. 13.574.141.686 sehingga capaian sebesar 52,09%
6. Kinerja implementasi WBK satker
Target nilai 81, realisasi 82,19, serta capaian sebesar 101,47%

Pagu Anggaran Rp. 108.082.000,- realisasi Rp. 72.796.215,- sehingga capaian sebesar 67,35%

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Target 85%, realisasi 91,67%, serta capaian sebesar 107,85%.

Pagu Anggaran Rp. 448.497.000,- realisasi Rp. 44.872.699,- sehingga capaian sebesar 10,01%

8. Persentase realisasi anggaran

Target 96%, realisasi 50,44%, serta capaian 52,54%

Pagu Anggaran Rp. 30.367.500.000,- realisasi Rp. 15.316.421.749,- sehingga capaian 50,44%

Capaian tertinggi terdapat pada indikator 7 yaitu Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan besaran capaian 107,85%. Sehingga rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 102,42%.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan BBKK Makassar tahun 2024 bersumber dari pagu sebesar Rp. 30.367.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.316.421.749,- atau sebesar 50,44%.

Dalam laporan kinerja ini Balai Besar Kekearifan Kesehatan Surabaya, Balai Besar Kekearifan Kesehatan Denpasar, dan Balai Besar Kekearifan Kesehatan Medan, dijadikan sebagai pembandingan capaian kinerja untuk ke 8 indikator kinerja, hal ini karena BBKK tersebut dengan BBKK Makassar memiliki karakteristik yang hampir sama, meliputi :

1. Klasifikasi kelas yang sama yaitu Balai Besar;
2. Lingkup kawasan yang memiliki Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
3. Melayani embarkasi/debarkasi haji.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Visi dan Misi	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sumber Daya Manusia	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	15
A. Perencanaan Kinerja	15
1. Rencana Aksi Kegiatan	15
2. Rencana Kinerja Tahunan	16
B. Perjanjian Kinerja	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	124
BAB IV Penutup	129
A. Kesimpulan	129
B. Rencana Tindak Lanjut	131
Pustaka Acuan	132
Penyusun	133
Lampiran	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi BBKK Makassar Tahun 2024.....	6
Gambar III.1	Screenshoot Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar Semester I Tahun Anggaran 2024	68
Gambar III.2	Dashboard Aplikasi OM-SPAN Hasil Perhitungan Capaian Kinerja IKPA BBKK Makassar Semester I Tahun Anggaran 2024	76
Gambar III.3	Screenshot Persentase Realisasi Anggaran BBKK Makassar Semester I Tahun Anggaran 2024	117

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2024	8
Tabel I.2	Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2024	9
Tabel I.3	Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024.....	9
Tabel I.4	Jabatan Pelaksana Teknis BBKK Makassar Tahun 2024	10
Tabel I.5	Jabatan Pelaksana Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024	10
Tabel II.1	Matriks RAK BBKK Makassar Tahun 2020-2024 Revisi Ke-5 Maret 2024	15
Tabel II.2	Indikator Kinerja RKT BBKK Makassar Tahun 2024	17
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2024	18
Tabel II.4	Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2024.....	18
Tabel III.1	Pengukuran Kinerja BBKK Makassar Semester I dibandingkan Dengan Target RAP dan Target RAK Tahun 2024	19
Tabel III.2	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Persentase Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan yang diperiksa Sesuai Standar Kekearifan Kesehatan BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	23
Tabel III.3	Perhitungan Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	24
Tabel III.4	Capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	25
Tabel III.5	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Orang BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	33
Tabel III.6	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Alat Angkut BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	34
Tabel III.7	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Barang BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	34
Tabel III.8	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan dalam	

	Pemeriksaan Lingkungan BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	35
Tabel III.9	Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan BBKK Makassar Semeseter I Tahun 2024	35
Tabel III.10	Perbandingan RAP dengan RAK Indikator kedua BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	36
Tabel III.11	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	45
Tabel III.12	Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	45
Tabel III.13	Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	46
Tabel III.14	Capaian Indeks Pengendalian FR di Pintu Masuk Negara BBKK Makassar Semester I Tahun 2024 Parameter Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 jam dengan Kelengkapan 80%	46
Tabel III.15	Nilai Indeks Pinjal di Wilker BBKK Makassar Semeseter I Tahun 2024	48
Tabel III.16	Hasil Suevey Tingkat Kepadatan Larva Anopheles di Wilayah BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.....	49
Tabel III.17	Kepadatan Kecoa Di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	50
Tabel III.18	Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	51
Tabel III.19	Kepadatan Jentik Aedes Aegypti Area Perimeter di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	52
Tabel III.20	Kepadatan Jentik Aedes Aegypti Area Buffer < 1 di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.....	53
Tabel III.21	Pemeriksaan TTU di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.....	54
Tabel III.22	Pemeriksaan TPP di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	55
Tabel III.23	Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Di Wilayah Kerja BBKK	

	Makassar Semester I Tahun 2024	56
Tabel III.24	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	76
Tabel III.25	Revisi DIPA BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	78
Tabel III.26	Parameter Deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	80
Tabel III.27	Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.....	81
Tabel III.28	Parameter Belanja Kontraktual BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.....	85
Tabel III.29	Pengukuran Kinerja Indikator Implementasi WBK BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	98
Tabel III.30	Perbandingan Target dan Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	106
Tabel III.31	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	124
Tabel III.32	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	124
Tabel III.33	Realisasi Anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	125
Tabel III.34	Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	128

DAFTAR GRAFIK

Grafik	I.1	Distribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan BBKK Makassar Tahun 2024	10
Grafik	I.2	Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar Tahun 2024	11
Grafik	I.3	Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan BBKK Makassar Tahun 2024	12
Grafik	III.1	Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indikator ke-1 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	25
Grafik	III.2	Perbandingan Realisasi Parameter Indikator ke-1 BBKK Makassar Tahun 2020,2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024	26
Grafik	III.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-1 BBKK Makassar	27
Grafik	III.4	Grafik Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator Ke-1 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	28
Grafik	III.5	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 Semester I Tahun 2024 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar	28
Grafik	III.6	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	36
Grafik	III.7	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024 ...	37
Grafik	III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-2 BBKK Makassar	38
Grafik	III.9	Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar Semester I tahun 2024	39
Grafik	III.10	Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-2 BBKK Makassar Semester I tahun 2024	39
Grafik	III.11	Perbandingan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar, BBKK Medan, BBKK Surabaya,	

	dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024.....	40
Grafik	III.12 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-3 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	57
Grafik	III.13 Perbandingan Realisasi Parameter Indikator Ke-3 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024	58
Grafik	III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-3 BBKK Makassar	59
Grafik	III.15 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Kinerja Indikator Ke-3 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	60
Grafik	III.16 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-3 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024.....	60
Grafik	III.17 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	68
Grafik	III.18 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024 ...	69
Grafik	III.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-4 BBKK Makassar	70
Grafik	III.20 Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	70
Grafik	III.21 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-4 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.....	71
Grafik	III.22 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024.....	72
Grafik	III.23 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	88
Grafik	III.24 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar Tahun 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024	89
Grafik	III.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024)	

	Indikator Ke-5 BBKK Makassar	90
Grafik	III.26 Perbandingan Target Renstra Kemenkes dengan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	91
Grafik	III.27 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-5 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.....	91
Grafik	III.28 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semeseter I Tahun 2024.....	92
Grafik	III.29 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-6 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	99
Grafik	III.30 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024 ...	100
Grafik	III.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-6 BBKK Makassar	101
Grafik	III.32 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-6 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.....	101
Grafik	III.33 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024.....	102
Grafik	III.34 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-7 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	110
Grafik	III.35 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024 ..	111
Grafik	III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-7 BBKK Makassar	112
Grafik	III.37 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-7 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	112
Grafik	III.38 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024.....	113
Grafik	III.39 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ke-8 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	118

Grafik	III.40 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Pagu Anggaran BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024	119
Grafik	III.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-8 BBKK Makassar	120
Grafik	III.42 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator ke-8 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024	120
Grafik	III.43 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024.....	121

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan, maka mulai 1 Januari 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar nama menjadi Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar. BBKK Makassar merupakan unit pelaksana teknis (UPT) bidang Kekeparantinaan Kesehatan yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK Makassar dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis dari Perpres tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat 2 (dua) kegiatan untuk KKP Kelas I Makassar yaitu :

1. Dukungan pelayanan kekeparantinaan di pintu masuk negara dan wilayah;
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada 9 indikator, yaitu :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
6. Kinerja implementasi WBK satker
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
8. Persentase realisasi anggaran
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti.

Capaian indikator tersebut akan dibahas dan dianalisa dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja (LKj) BBKK Makassar Semester I tahun 2024.

Beberapa isu strategis Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan.
2. Tenaga di wilker masih terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua kelompok Tim Kerja yang ada di induk.
3. Pembentukan Pos/Wilker baru dalam rangka peningkatan layanan di wilayah Pelabuhan/Bandara.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan, UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas di atas, UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

C. VISI DAN MISI

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar menjabarkan visinya yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pemberdayaan GERMAS;
5. Memperkuat sistem kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni :

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi yakni :

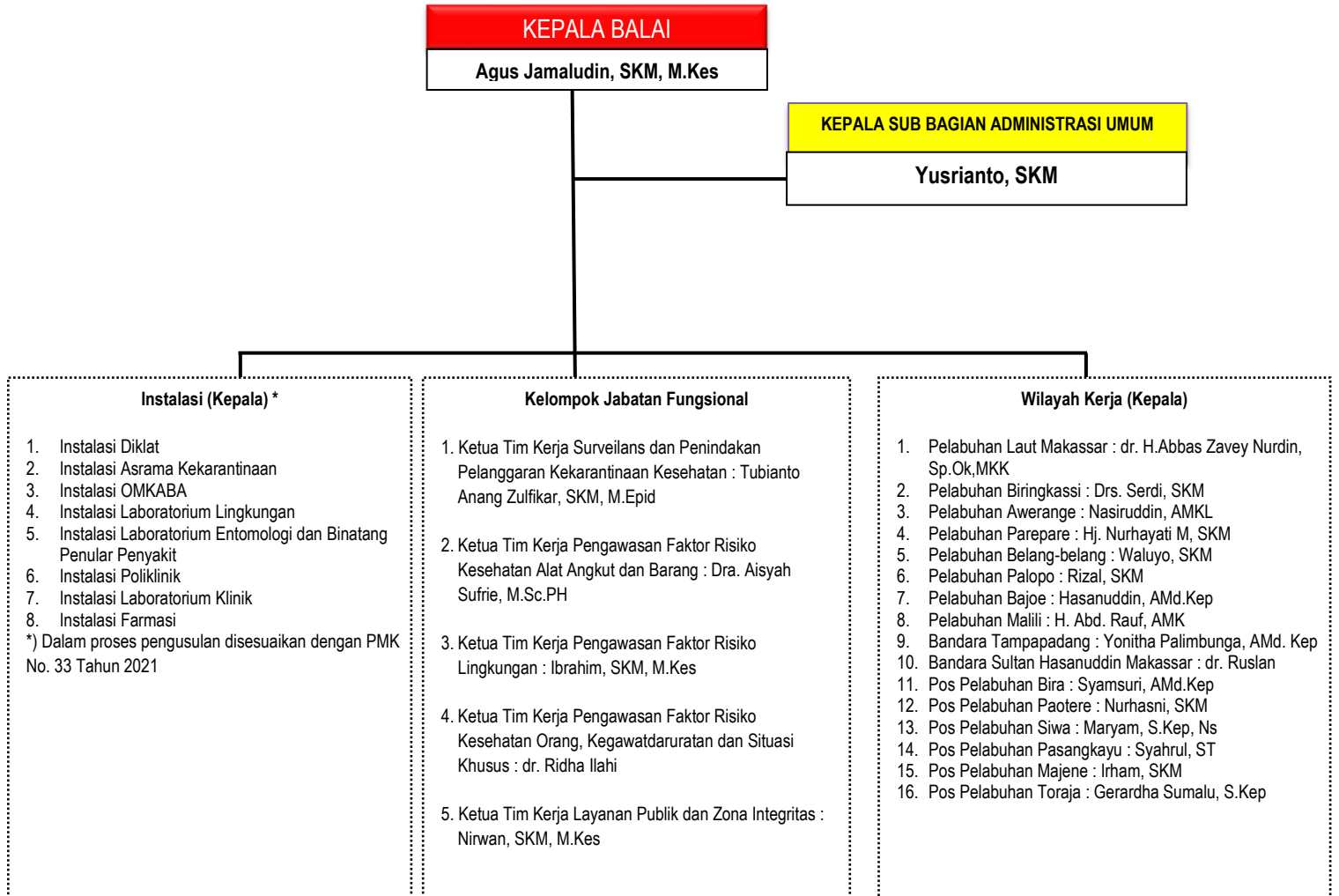
1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di Pelabuhan/Bandara/PLBDN;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Instalasi

Struktur organisasi BBKK Makassar tahun 2024 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I.1 berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024

Uraian tugas masing-masing adalah :

1. Sub Bagian Administrasi Umum
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

2. Instalasi
 - a. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
 - b. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi.
3. Wilayah Kerja BBKK Makassar
 - a. Memberikan pelayanan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
 - b. Dipimpin oleh kepala Wilker, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Makassar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - b. Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Ketua Tim Kerja.
 - c. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - d. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - f. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2024 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang ASN berdasarkan DUK Juni 2024 yang terdiri dari 125 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 7 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) dan ditambah tenaga Non ASN berdasarkan data RKAKL 2024 yakni 2 orang PPNPN serta tenaga outsourcing satpam sebanyak 7 orang, sopir sebanyak 13 orang, dan cleaning service sebanyak 9 orang.

1. Menurut Jabatan:

a) ASN	=	132 orang
1) Jabatan Struktural	=	2 orang
2) Jabatan Fungsional Teknis	=	90 orang
3) Jabatan Fungsional Administrasi	=	12 orang
4) Jabatan Pelaksana Teknis	=	21 orang
5) Jabatan Pelaksana Administrasi	=	7 orang
b) Non ASN	=	31 orang
1) Pengamanan Kantor (Satpam)	=	7 orang
2) Pengemudi (Sopir)	=	13 orang
3) Cleaning Service	=	9 orang
4) PPNPN	=	2 orang

Tabel I.1, I.2, I.3, I.4, dan I.5 menunjukkan pengelompokan ASN berdasarkan jabatan.

Tabel I.1 Jabatan Struktural BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Kepala BBKK Makassar	1
2.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
Jumlah		2

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa di BBKK Makassar terdapat 2 pejabat struktural yaitu Kepala BBKK Makassar dan Kasubag Adum.

Tabel I.2 Jabatan Fungsional Teknis BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Fungsional Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter Ahli Madya (JFT)	4
2	Dokter Gigi Ahli Madya (JFT)	1
3	Dokter Ahli Muda (JFT)	10
4	Dokter Ahli Pertama (JFT)	3
5	Perawat Ahli Muda (JFT)	3
6	Perawat Ahli Pertama (JFT)	4
7	Perawat Penyelia (JFT)	4
8	Perawat Mahir (JFT)	8
9	Perawat Terampil (JFT)	3
10	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	1
11	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	1
12	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JFT)	1
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	7
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	7
15	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	6
16	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	1
17	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	1
18	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	2
19	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	3
20	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
21	Entomolog Kesehatan Penyelia (JFT)	1
22	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	3
23	Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	3
24	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	1
25	Sanitarian Ahli muda (JFT)	4
26	Sanitarian Ahli Pertama (JFT)	6
27	Sanitarian Mahir (JFT)	2
28	Sanitarian Terampil (JFT)	1
Jumlah		93

Tabel I.3 Jabatan Fungsional Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Fungsional Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JFT)	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)	2
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JFT)	1
4	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JFT)	1
5	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	2
6	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	2
7	Perencana Ahli Muda (JFT)	1
8	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
9	Arsiparis Ahli Muda (JFT)	1
10	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
Jumlah		13

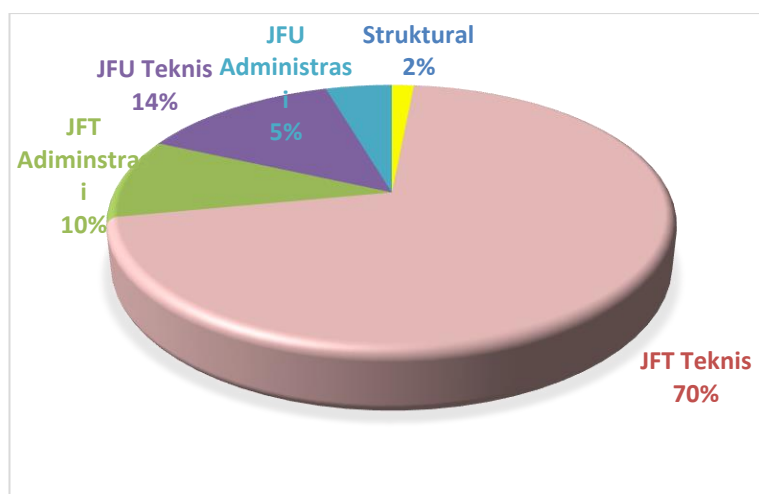
Tabel I.4 Jabatan Fungsional Umum Teknis BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Pelaksana Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter (JFU)	3
2	Perawat Ahli (JFU)	3
3	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	6
4	Pranata Laboratorium Kesehatan (JFU)	1
5	Pembimbing Kesehatan Kerja / Analis Kesehatan Kerja (JFU)	1
6	Epidemiolog Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi (JFU)	1
7	Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (JFU)	2
8	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JFU)	1
Jumlah		18

Tabel I.5 Jabatan Fungsional Umum Administrasi BBKK Makassar Tahun 2024

No.	Pelaksana Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	1
2	Analis Kebijakan Barang Milik Negara / Analis Barang Milik Negara (JFU)	1
3	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JFU)	1
4	Pengelola Barang Milik Negara (JFU)	3
Jumlah		6

Grafik I.1 Distribusi ASN berdasarkan Jenis Jabatan BBKK Makassar Tahun 2024



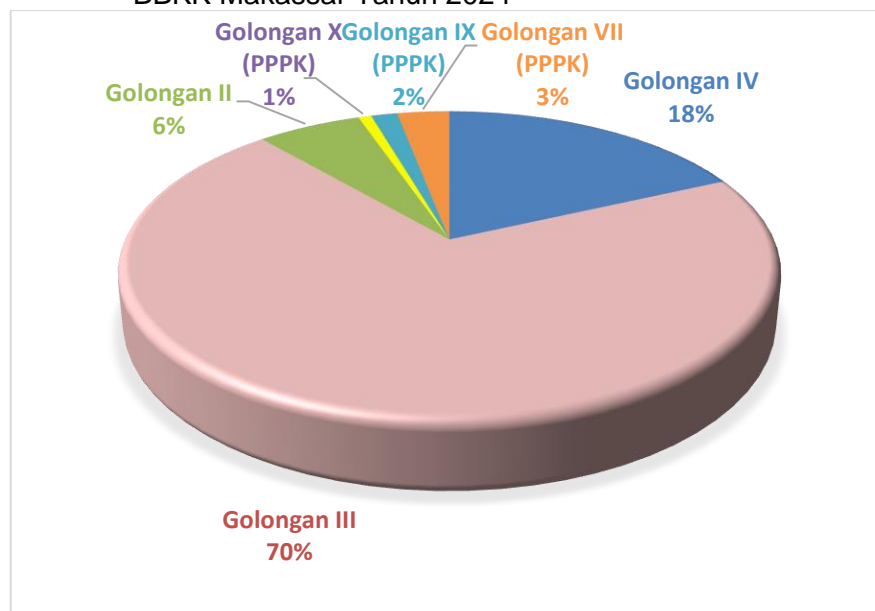
Grafik I.1 menunjukkan 70% pegawai KKP BBKK Makassar adalah JFT Teknis, 14% JFU teknis, 10% JFU Teknis, 5% JFU administrasi, dan 2 % adalah pejabat struktural.

JFU teknis dan administrasi akan berproses menjadi JFT sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Menurut Golongan :

a) Golongan IV	=	24 orang
b) Golongan III	=	93 orang
c) Golongan II	=	8 orang
d) Golongan X (PPPK)	=	1 orang
e) Golongan IX (PPPK)	=	2 orang
f) Golongan VII (PPPK)	=	4 orang

Grafik I.2 Distribusi ASN berdasarkan Golongan BBKK Makassar Tahun 2024

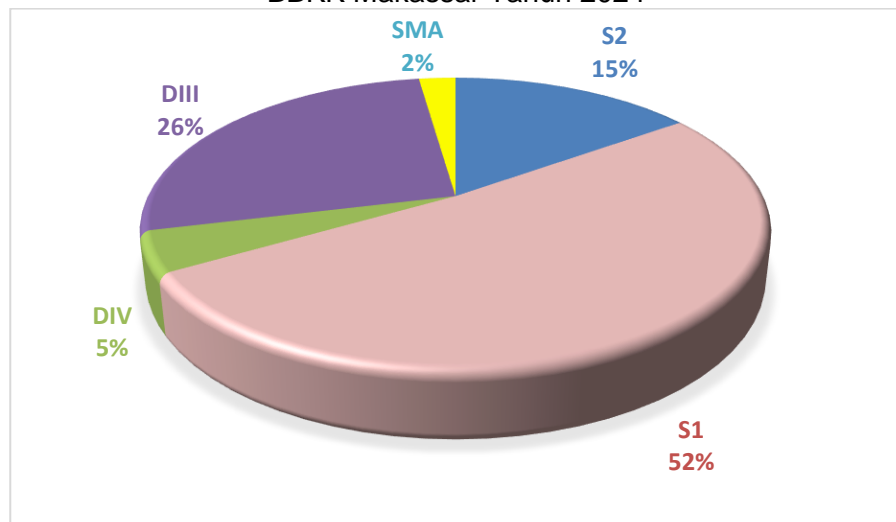


Berdasarkan grafik I.2 ASN BBKK Makassar terbesar berada pada Golongan III sebanyak 70% dan yang terkecil pada Golongan X sebesar 1%. Golongan VII, IX dan X merupakan golongan untuk ASN PPPK.

3. Menurut Pendidikan:

a) S2	=	20 orang
b) S1	=	68 orang
c) DIV	=	6 orang
d) DIII	=	35 orang
e) SMA	=	3 orang

Grafik I.3 Distribusi ASN menurut Jenjang Pendidikan
BBKK Makassar Tahun 2024



Berdasarkan Grafik I.3 distribusi ASN BBKK Makassar terbanyak pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 52% disusul Strata 2 (S2) sebanyak 15% dan yang terkecil sebanyak 2% pada jenjang pendidikan SMA. Jenjang S1 dan S2 menempati urutan 1 dan 2 karena adanya kesempatan tugas belajar yang dibiayai oleh Kemenkes dengan mengikuti rangkaian aturan baik secara administrasi maupun akademik sesuai dengan MOU yang ditetapkan antara Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, sehingga ASN BBKK Makassar dapat mengupgrade jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan 3 (tiga) Kantor Kesehatan Pelabuhan yang sekelas;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

8. Analisis program/kegiatan yang meunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan indicator dan rincian output.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

RAK Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. BBKK Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Olehnya itu, kegiatan yang dilaksanakan di BKK harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen P2P.

Tabel II.1 Matriks RAK BBKK Makassar
Tahun 2020-2024 Revisi ke-5 Maret 2024

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pelayanan Kekejarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekejarantinaan kesehatan	3,722,715	2,652,728			
		1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/P LBDN			1	1	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/P LBDN	85%	90%	0.96	0.96	0.96
2	Meningkatnya Dukuingan	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%				
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	90
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	70%			
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	85%
		8. Persentase Realisasi Anggaran				95%	96%
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%	95%

Dari tabel II.1 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2020-2024 RAK BBKK Makassar Revisi ke-5 Maret 2024 terlihat pada indikator 8 dan 9 berbeda dengan tahun 2022. Dimana di tahun 2022 indikator berjumlah 7, namun sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 terdapat penambahan 2 indikator dalam Perjanjian Kinerja yaitu indikator Persentase Realisasi Anggaran dan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK tahun 2020-2024. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam rangkaian lima tahun Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Rencana Kinerja Tahunan kemudian menjadi acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar tahun 2024, telah disusun indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel II.2 Indikator Kinerja RKT
Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,96
2	Meningkatnya Dukuingan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%

Sumber Data : RKT KKP Kelas I Makassar 2024

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku atasan langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.3 yang merupakan PK 2024.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anaggaran	90
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	81
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%

Tabel II.4 Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Rp . 3.795.894.000,-
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 26.571.606.000,-
	Total	Rp. 30.367.500.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Balai Besar Kejarantinaan Kesehatan Makassar untuk tahun 2024 melakukan pengukuran terhadap indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target serta membandingkannya dengan hasil tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja indikator dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sehingga diperoleh data capaian.

Hasil pengukuran kinerja akan menghasilkan data berupa informasi masing-masing indikator, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan program/kegiatan di masa akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Di samping itu pengukuran kinerja juga memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam indikator kinerja yakni Meningkatnya pelayanan kejarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Adapun indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2024 yang diselaraskan dengan target indicator RAP Ditjen P2P serta target RAK BBKK Makassar tertera dalam tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja BBKK Makassar Semester I
Dibandingkan dengan target RAP Ditjen P2P dan target RAK Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Indikator RAP Ditjen P2P	Target RAK	Realisasi	Capaian
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PL BDN		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target	1	1	100%

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Indikator RAP Ditjen P2P	Target RAK	Realisasi	Capaian
			tahun 2024 sebesar 100			
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target tahun 2024 sebesar 100	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target tahun 2024 sebesar 100	100%	100%	100%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PL BDN		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target tahun 2024 sebesar 100	0,96	0,88	91,67%
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan dengan target tahun 2024 sebesar 95	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 95	85	49,58	58,33%
5	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Persentase jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80 dengan target tahun 2024 sebesar 100	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 95	90	95,64	106,27%
6	Kinerja implementasi WBK satker		Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian	81	82,19	101,47%

No.	Indikator Kinerja	Indikator Renstra Kemenkes	Indikator RAP Ditjen P2P	Target RAK	Realisasi	Capaian
			Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 60			
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 60	85%	91,67%	107,85%
8	Persentase Realisasi Anggaran		Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target tahun 2024 sebesar 95	96%	50,44%	52,54%
Rata-Rata Capaian						102,59%

Berdasarkan tabel III.1 di atas untuk indikator 1 realisasi kinerja sebesar 1 dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% sebanding dengan target RAP sebesar 100%. Indikator 2 dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian 100% sebanding dengan target Renstra Kemenkes dan RAP. Indikator 3 dengan realisasi kinerja bernilai 0,88 dengan nilai capaian 102,08% lebih kecil dibanding dengan target RAP. Indikator 4 dengan realisasi kinerja sebesar 49,58 lebih kecil dengan target Renstra dan RAP. Untuk indikator 4 masih berproses di semester berikutnya, namun realisasi RAK telah melampaui target Semester 1 yang telah ditetapkan sebesar 85, dengan realisasi Semester I sebesar 49,58. Indikator 5 dengan realisasi kinerja sebesar 95,64 lebih kecil dari target Renstra Kemenkes sebesar 100 dan lebih besar dibanding dengan target RAP dan RAK, namun masih berproses di Semester berikutnya. Indikator 6 dengan realisasi kinerja sebesar 82,19 lebih

besar dibanding dengan target RAP dan RAK dengan capaian 101,47%. Indikator 6 merupakan hasil dari Assesment yang dilaksanakan oleh Tim Itjen pada tanggal 13 Juni 2024 sebagai salah satu pendampingan terhadap BBKK Makassar yang diusukan untuk meraih predikat WBK Nasional. Indikator 7 dengan realisasi kinerja sebesar 91,67% lebih besar dibanding dengan target RAP dan RAK dengan capaian 107,85%. Indikator 7 tercapai karena peran aktif dari Pegawai BBKK Makassar dalam peningkatan kompetensi yang diikuti baik secara daring maupun luring sesuai dengan kompetensi masing-masing. Indikator 8 dengan realisasi sebesar 50,44% lebih besar dibanding dengan target RAP dan RAK, namun masih berproses di Semester berikutnya. Untuk Semester I realisasi anggaran sudah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian indikator tahun 2024 akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. INDIKATOR PERTAMA

Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

b. Definisi Operasional

Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara yang dilakukan dalam periode satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai

standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

$$\frac{\text{Indeks Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Target Indeks Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pada tabel III.2 digambarkan capaian indikator terhadap target parameter yang ditetapkan

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Persentase orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	4.461.077	5.442.526	122
	1. Jumlah penumpang pesawat datang		2.309.709	
	2. Jumlah penumpang pesawat berangkat		1.450.604	
	3. Kunjungan Poliklinik Bandara (Keur, Vaksinasi)			
	- Surat Keterangan Pengujian Kesehatan		100	
	- Pelayanan vaksinasi MM, YF		449	
	- Kunjungan Petugas dan Selain Penumpang ke Klinik Bandara		365	
	4. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Bandara		41	
	5. Pemeriksaan Personil Pesawat (Termasuk ICV Personil Kedatangan)		90.627	
	6. Jumlah Penumpang Kapal Datang		706.819	
	7. Jumlah Penumpang Kapal Berangkat		720.482	
	8. Kunjungan Poliklinik Pelabuhan (Keur, Vaksinasi)			
	- Surat Keterangan Pengujian Kesehatan		1.748	
	- Pelayanan vaksinasi MM, YF		1.851	
	- Kunjungan Petugas dan Selain Penumpang ke Klinik Pelabuhan		491	
	9. Laporan Kesehatan Penjamah Makanan untuk Pekerja di Pelabuhan		0	
	10. Pemeriksaan Awak Kapal (Termasuk ICV Awak Kapal Kedatangan)		157.289	
	11. Jumlah Skrining HIV		521	
	12. Jumlah Skrining TB		564	
	13. Jumlah Skrining Malaria		866	

No	Parameter	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	7.449	9.087	121,99
	1. Jumlah General Declaration (Gendec) Terverifikasi (Ttd/Stempel) di Bandara		393	
	2. Jumlah COP		115	
	3. Jumlah PHQC		8.579	
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	330	396	120
	1. Surat Ijin Angkut Jenazah di Bandara		360	
	2. Surat Ijin Angkut Jenazah di Pelabuhan		36	
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	34.104	41.607	122
	1. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Bandara		17	
	2. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Bandara		92	
	3. Form inspeksi sarana PAB (Lokus) Bandara		17	
	4. Rekapitulasi hasil survey vektor Bandara		8.323	
	5. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Pelabuhan		123	
	6. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Pelabuhan		284	
	7. Form inspeksi sarana PAB Pelabuhan		110	
	8. Rekapitulasi hasil survey vektor Pelabuhan		32.641	

Dari table III.2 terlihat capaian untuk masing-masing parameter berada di atas nilai 120%. Sehingga untuk perhitungan indeksnya dapat dijabarkan di dalam Tabel III.3.

Tabel III.3 Perhitungan Indeks deteksi faktor risiko Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024

No	Parameter	Bobot	Baseline	Score	Score Max
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	600	600
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120	600	600
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	360	360
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	120	600	600
Total				2.160	2.160
$Indeks = \frac{S}{S_{max} - S_{min}}$ $Indeks = \frac{2.160}{2.160 - 0}$ $Indeks = 1$					

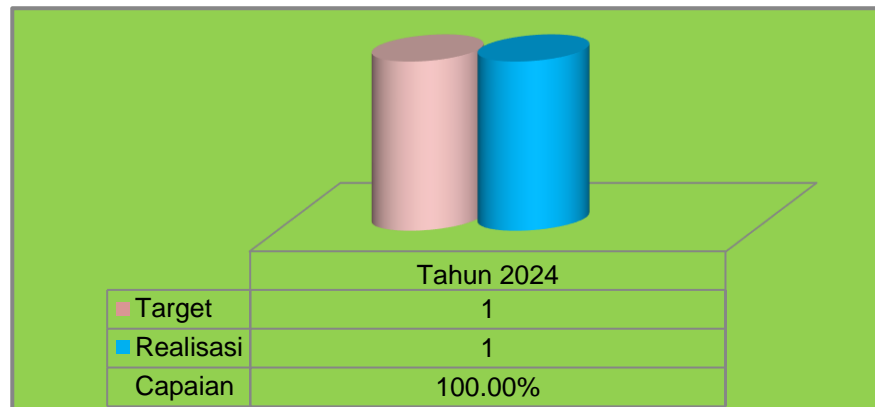
Berdasarkan tabel III.3 diperoleh score sebesar 2.160. Untuk perhitungan indeks dengan formulasi nilai score dibagi dengan score maksimal, sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 1.

Tabel III.4 Capaian Indeks deteksi faktor risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Tahun 2024

No	Indikator	Target RAP	Target RAK	Realisasi	Capaian
1	Indeks deteksi factor risiko di pintu masuk negara	100%	1	1	100%

Dari table III.4 dapat dilihat capaian untuk indikator 1 sebesar 100%, diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target RAK BBKK Makassar Tahun 2024

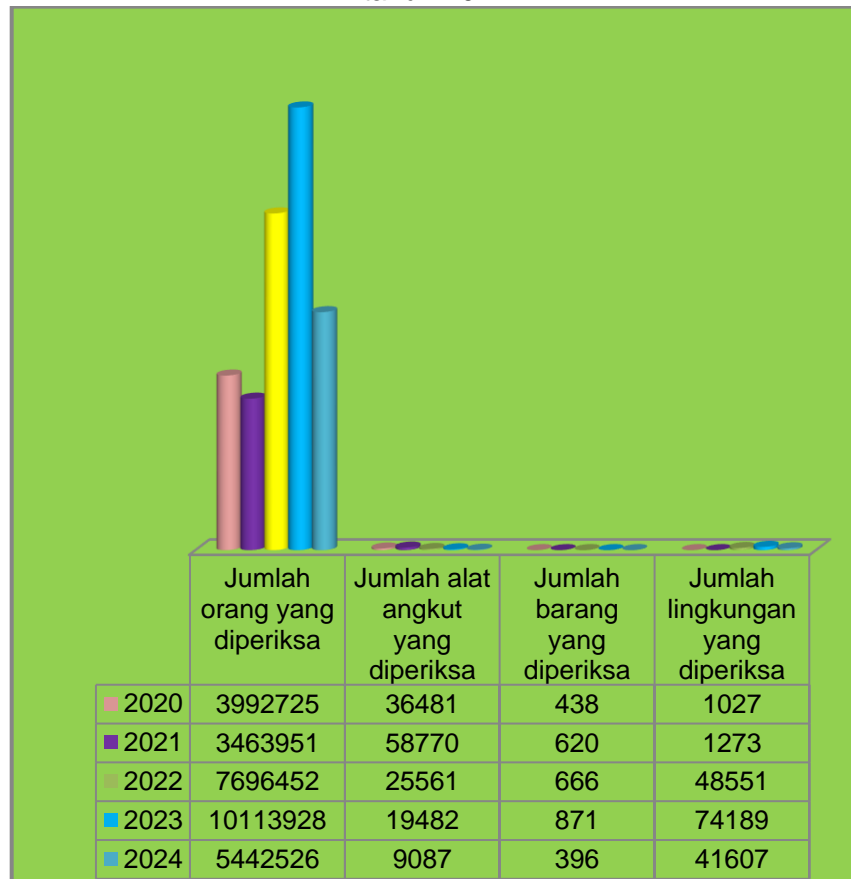
Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-1
BBKK Makassar Semester I tahun 2024



Grafik III.1 menggambarkan antara target dan realisasi indikator 1, dapat dilihat realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100%. Penetapan target untuk tahun 2024 ditetapkan dengan nilai indeks 1 karena realisasi di tahun 2023 maksimal sebesar 1. Di tahun 2024 jumlah penumpang meningkat signifikan seiring dengan berakhirnya masa pandemic, sehingga regulasi terkait pelaku perjalanan baik dalam negeri ataupun luar negeri berubah. Hal ini mengakibatkan parameter pemeriksaan untuk indikator 1 melonjak nilainya. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi

kegiatan, sehingga capaian yang diperoleh oleh KKP Kelas I Makassar bisa memperoleh nilai 100%.

Grafik III.2 Perbandingan Realisasi Parameter Indikator Ke-1 BBKK Makassar tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I tahun 2024



Dari grafik III.2 dapat dilihat realisasi parameter untuk indikator ke-1 pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024. Untuk parameter jumlah orang yang diperiksa tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perjalanan kembali ke situasi normal. Jumlah Jemaah haji meningkat jumlahnya dari tahun 2023 ke 2024, sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah pelaku perjalanan internasional. Pada Semester I Tahun 2024 terlihat nilai 5.442.526 jumlah pelaku perjalanan, sehingga estimasi sampai akhir Tahun 2024 bisa mencapai 11.000.000 orang, artinya untuk tahun 2024 pelaku perjalanan lebih besar dari tahun 2023. Untuk

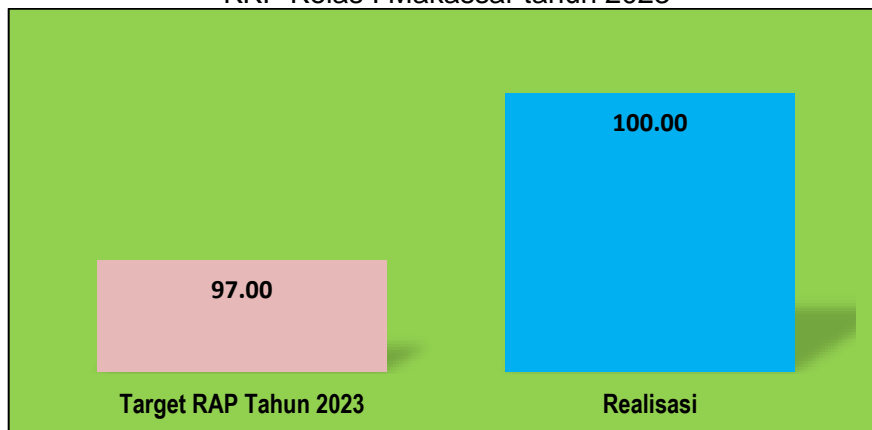
jumlah alat angkut yang diperiksa tahun 2024 hampir sama dengan jumlah alat angkut di tahun 2023. Jumlah barang yang diperiksa tahun 2024 hampir sama jumlahnya di tahun 2023. Jumlah lingkungan yang diperiksa mengalami peningkatan sedikit sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2022-2024) Indikator Ke-1 BBKK Makassar



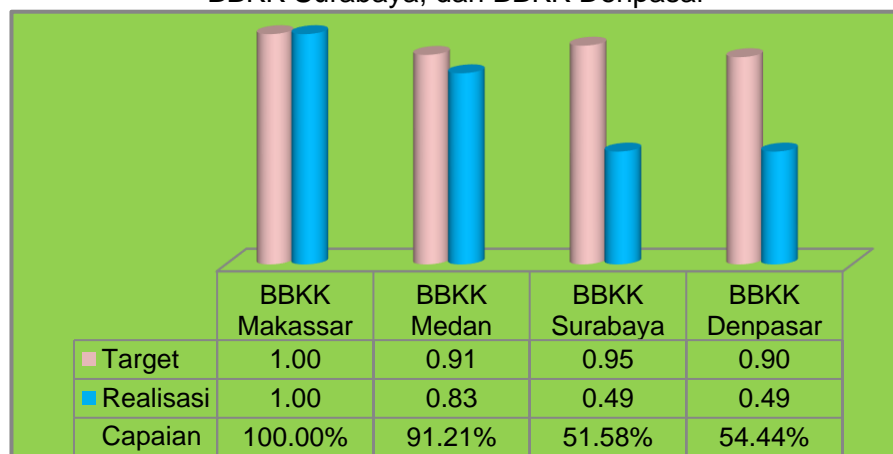
Grafik III.3 menggambar untuk tahun 2022 dan 2023, realisasi sesuai dengan capaian sebesar indeks 1, melihat realisasi tersebut, maka untuk tahun 2024 ditetapkan target sebesar 1 dengan prediksi realisasi 1. Untuk Semester I Tahun 2024, sudah mencapai realisasi sesuai dengan target. Hal ini karena untuk kegiatan pada indikator 1 merupakan tugas dan fungsi dari BBKK Makassar, sehingga kegiatan berjalan optimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Grafik III.4 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator Ke-1 KKP Kelas I Makassar tahun 2023



Grafik III.4 menggambarkan perbandingan target RAP dengan realisasi indikator KKP Kelas I Makassar tahun 2023, dimana realisasi lebih besar dari target renstra yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi karena dalam pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk pemeriksaan orang selama tahun 2023 jumlah penumpang alat angkut meningkat seiring dengan status endemi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan haji dan umroh kembali normal, malah meningkat dari tahun sebelumnya juga memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.5 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-1 Semester I Tahun 2024 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar



Grafik III.5 tergambar bahwa hanya BBKK Makassar yang mencapai target sesuai yang ditetapkan. Untuk BBKK Medan, Surabaya, dan Denpasar realisasi indikator ke-1 masih berproses, dengan rata-rata realisasi sudah mencapai 50% dari target di tahun 2024.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

Terdapat beberapa hal yang memberikan kontribusi terhadap tercapainya target indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara yakni :

- 1) Adanya penetapan pencabutan status pandemi melalui KEPRES No. 17 Tahun 2023 tentang berakhirnya masa Pandemi Covid-19 di Indonesia yang berlaku sejak 21 Juni 2023
- 2) Peningkatan jumlah penumpang (pesawat dan kapal) yang disebabkan penambahan rute dan frekuensi penerbangan domestik yakni Medan, Banjarmasin dan Gorontalo.
- 3) Peningkatan jumlah penumpang (pesawat dan kapal) yang disebabkan penambahan frekuensi penerbangan internasional, signifikan jumlah frekuensi penerbangan dalam pelaksanaan umrah.
- 4) Pelaksanaan haji di tahun 2024 dengan jumlah jamaah sebanyak 16.651 orang, lebih besar dari tahun 2023 (15.846 orang).
- 5) Dukungan lintas sektor (komunitas Pelabuhan dan Bandara) dalam deteksi dini dan pengawasan kekarantinaan Kesehatan.
- 6) Kebutuhan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan kesehatan untuk kelengkapan berkas (perpanjangan buku pelaut, perpanjangan lisensi dan melamar pekerjaan).
- 7) Adanya kemudahan akses untuk pengiriman jenazah melalui transportasi udara dan laut.
- 8) Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Eksternal

- a) Belum semuanya pelaku perjalanan memahami prosedur pelaksanaan kekarantinaan Kesehatan pada pelaku perjalanan yang masuk kategori suspek atau kontak erat penyakit menular.
 - b) Adanya regulasi yang tidak mewajibkan lagi pelaku perjalanan terutama jamaah umrah untuk melakukan vaksinasi meningitis.
 - c) Sebagian besar pelaku perjalanan terutama jamaah umrah belum memahami pentingnya vaksin meningitis.
- 2) Internal
- a) Ketersediaan tenaga yang masih kurang di beberapa wilker sehingga menyebabkan adanya beban kerja yang berlebihan
 - b) Belum semua wilker membuka layanan vaksinasi
 - c) Belum semua Wilker tersedia kendaraan boarding
 - d) Masih terdapat beberapa ruang pemeriksaan di terminal pelabuhan dan bandara masih kurang representatif
 - e) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium.
- g. Usul Pemecahan Masalah
- 1) Eksternal
- a) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait proses kekarantinaan kesehatan
 - b) KIE kepada pelaku perjalanan terkait vaksinasi meningitis
- 2) Internal
- a) Penambahan SDM melalui seleksi CPNS/PPP/ Mutasi Internal
 - b) Membuka layanan vaksinasi di wilker yang belum.
 - c) Mengusulkan pengadaan kendaraan operasional untuk *boarding*
 - d) Koordinasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara
 - e) Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja i

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(2.157.939.000 \times 1) - 982.243.846}{2.157.939.000 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 54,34\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{54,34\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 185,86\%$$

Untuk indikator 1 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.157.939.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 982.243.846,- serta capaian indikator sebesar 100%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 54,34%. Sehingga nilai efisiensi diperoleh sebesar 185,86%.

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk indicator 1 penggunaan sumber daya efisien dengan nilai efisiensi di atas 50% yaitu 185,86%.

Selain dari penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Penggunaan alat skrining (*thermal scanner*) dengan sistem sensor lebih efektif dan tidak perlu membutuhkan operator yang banyak sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal dengan menjaga jarak aman.
- 2) Penerapan aplikasi online (Sinkarkes) dalam penerbitan dokumen Kesehatan serta Langsung Digital dapat mempersingkat waktu dalam penerbitan dan menyederhanakan alur pelayanan.

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

a. Pengertian

Persentase faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan hasil dari pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai satandar kekarantinaan, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

$$\frac{\text{Persentase FR penyakit yang dikendalikan}}{\text{Persentase target FR penyakit yang dikendalikan}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{108}{108} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2024 terdapat 92 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan orang, 14 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan alat angkut, tidak terdapat faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan barang, serta 2 faktor risiko yang dikendalikan dalam pemeriksaan lingkungan. Rincian faktor risiko yang dikendalikan terdapat dalam tabel III.5 sebagai berikut :

Tabel III.5 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Orang BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan Orang	Faktor Risiko ditemukan	Faktor Risiko dikendalikan		
		Notifikasi	Tolak Berangkat	SKTLT
1. Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat => Notifikasi	40	40	0	0
2. Covid-19 Positif (Data PCR & Antigen Induk di NAR) => Notifikasi	7	7	0	0
3. Sakit (Termasuk Saturasi < 95, HB < 8,5) => SKTLT atau Pertolongan Gawat Darurat	26	0	0	26
4. Hamil > 32 Minggu => SKTLT	3	0	0	3
5. Hamil < 14 Minggu dan > 26 Minggu (Jamaah Haji) => Berita Acara Tidak Laik Terbang	1	0	0	1
6. Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT	9	0	0	9
7. Belum Vaksin Meningitis => Berita Acara Tolak Berangkat bahwa Ybs Harus Divaksinasi	0	0	0	0
8. Buku ICV Palsu/Expired => Berita Acara Tolak Berangkat	0	0	0	0
9. HIV Positif, TB Positif, Malaria Positif => Notifikasi+C2	HIV : 0 IMS : 2 TB : 0 Malaria : 4	6	0	0
Jumlah	92	53	0	39

Sumber : Data Sinkarkes Tahun 2024

Berdasarkan tabel III.5 terdapat 9 jenis pemeriksaan pada orang, dengan 92 FR yang ditemukan. Dimana ditemukan 2 positif IMS dan 4 positif malaria, 1 (satu) orang hamil sehingga ditunda keberangkatan hajinya, 3 orang hamil pelaku perjalanan domestic, sakit 26 orang, 7 orang diberikan notifikasi, dan 40 orang demam.

Tabel III.6 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Alat Angkut
BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan Alat Angkut	Faktor Risiko ditemukan	SSCC	Surat bebas karantina	One month extention
1. Vektor, Air terkontaminasi, dan Kotak P3K	14	14	0	0
Jumlah	14	14	0	0

Berdasarkan tabel III.6 ditemukan 14 FR dalam pemeriksaan alat angkut, dengan pengendalian berupa pemberian SSCC.

Tabel III.7 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Barang
BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan Barang	Faktor Risiko ditemukan	Tolak berangkat	Tunda Berangkat	Desinfeksi
1. Jenazah penyakit menular	0			0
Jumlah	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.7 tidak ditemukan FR dalam pemeriksaan barang. Jika ditemukan adanya FR maka petugas BBKK Makassar melaksanakan desinfeksi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Tabel III.8 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan dalam Pemeriksaan Lingkungan BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Jenis Pemeriksaan Lingkungan	Faktor Risiko ditemukan	Fogging	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Abatisasi	Pemberian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
1. TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan)	0	0	0	0	0
2. Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi), yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi	2	0	0	0	2
3. Vektor di lingkungan buffer dan perimeter bandara/ pelabuhan	0	0	0	0	0
Jumlah	2	0	0	0	2

Dari table III.8 terdapat 2 FR yang dikendalikan dengan abatisasi dan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan.

Tabel III.9 Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

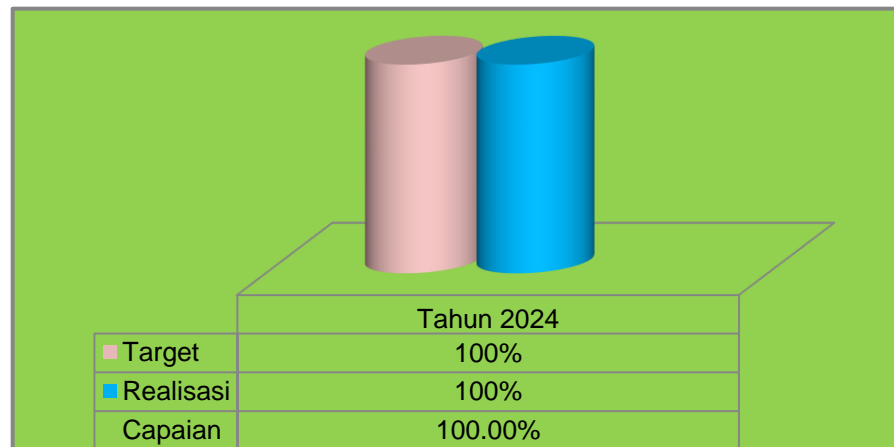
Pemeriksaan	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Persentase FR yang dikendalikan $(3/2)*100$
1	2	3	4
Pemeriksaan orang	92	92	100
Pemeriksaan alat angkut	14	14	100
Pemeriksaan barang	0	0	0
Pemeriksaan Lingkungan	2	2	100
Total	108	108	100

Dalam Tabel III.9 terdapat 108 faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan.

Tabel III.10 Perbandingan RAP dengan RAK Indikator Kedua
BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

No	Pemeriksaan	Target RAP		Target RAK	Persentase FR yang dikendalikan (%)	Capaian%
1	Pemeriksaan orang	100 %		100 %	100	100
2	Pemeriksaan alat angkut				100	100
3	Pemeriksaan barang				100	100
4	Pemeriksaan lingkungan				100	100
	Total	100 %		100 %	100	100

Grafik III.6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-2
BBKK Makassar Semester I tahun 2024



Grafik III.6 menunjukkan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Target ditetapkan 100% karena tiga tahun terakhir tahun 2020, 2021, dan 2023 dengan indikator dan parameter yang sama, capaian BBKK Makassar melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga ditahun 2024 ditetapkan target maksimal. Untuk realisasi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena semua faktor risiko yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai satandar kekarantinaan, barang dan lingkungan dikendalikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

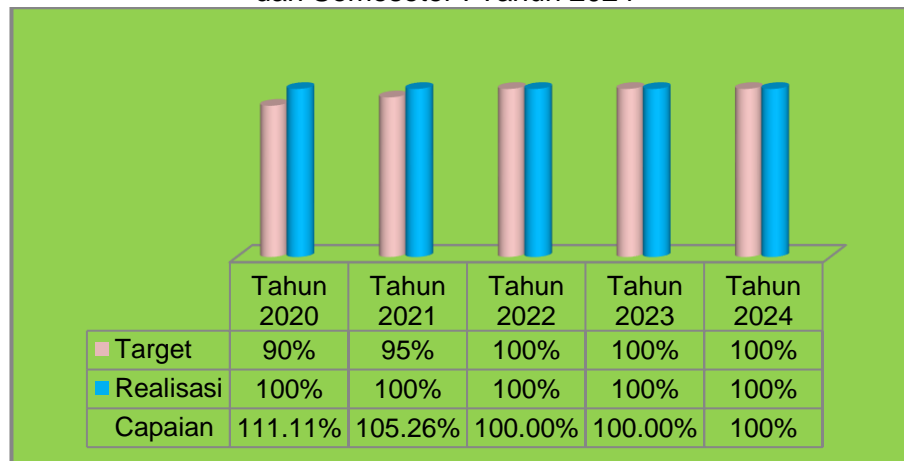
Untuk pemeriksaan orang, dalam hal pengawasan penumpang jika terdapat suhu di atas 37,5⁰C maka langsung diadakan pemeriksaan antigen dan jika hasil positif akan diberikan notifikasi yang dikirimkan ke Dinkes Provinsi yang selanjutnya akan dikirimkan ke Dinkes Kab/Kota dimana penumpang tersebut berdomisili. Pengawasan berlanjut dengan penyelidikan epidemiolog yang dilakukan oleh kolaborasi Timker I, II, III dan IV. Orang hamii dan sakit juga diterbitkan SKTLT nya jika tidak layak terbang dari hasil pemeriksaan tenaga kesehatan BBKK Makassar.

Untuk alat angkut jika terdapat faktor risiko maka akan diterbitkan dokumen SSCC.

Pemeriksaan barang berupa jenazah dengan penyakit menular langsung diadakan tindakan desinfeksi, namun untuk tahun 2024 jenazah yang diawasi tidak terdapat jenazah penyakit menular.

Untuk pemeriksaan lingkungan pengawasan TPP yang tidak sesuai fungsinya diberikan rekomendasi.

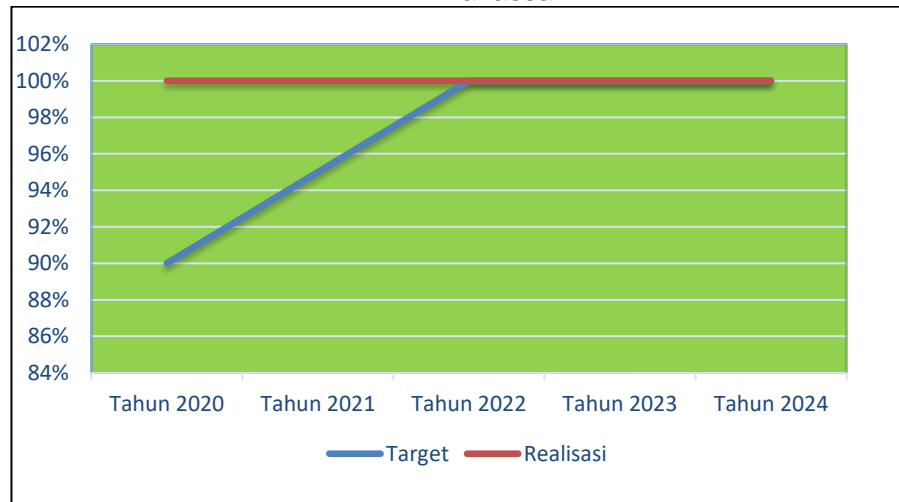
Grafik III.7 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024



Grafik III.7 menggambarkan capaian untuk indikator ke-2 untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan Semester I Tahun 2024. Dimana realisasi di tahun 2020 sd 2023 realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2024, masih Semester I

realisasi sudah mencapai 100% karena semua factor risiko yang ditemukan langsung diadakan penindakan.

Grafik III.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-2 BBKK Makassar



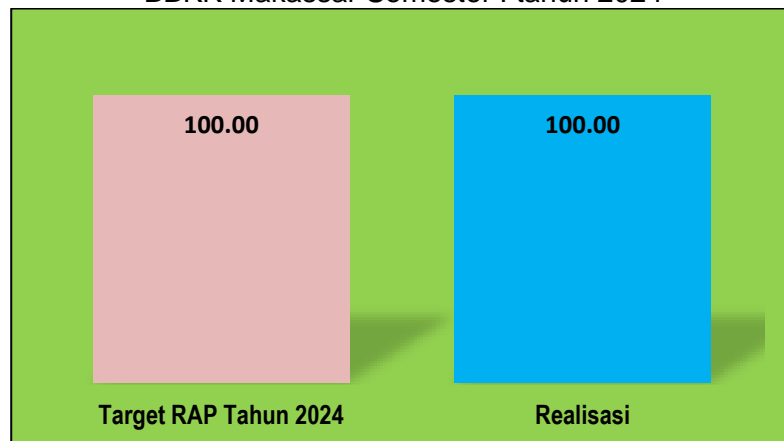
Grafik III.8 tergambar realisasi pada tahun 2020 sd 2021 dengan nilai lebih besar dibanding dengan target RAK tahun 2020 dan 2021, dan realisasi tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2024 target yang ditetapkan dalam RAK sama dengan target di tahun 2023 serta prediksi realisasi yang sama dengan tahun 2023, karena BBKK Makassar selama empat tahun terakhir memperoleh realisasi lebih besar dari target. Dalam pengendalian faktor risiko BBKK Makassar menjalankan tugasnya sebagai penjaga pintu Negara. Semua faktor risiko yang ditemukan langsung dikendalikan sesuai dengan aturan berlaku. Hal ini membutuhkan kerja sama tim dan support dari Pimpinan selaku penanggungjawab kegiatan.

Grafik III.9 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Semester I tahun 2024



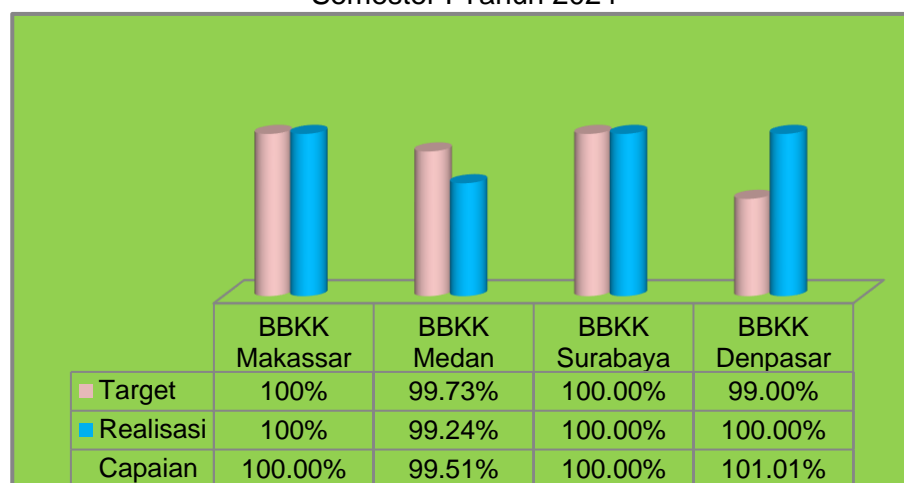
Grafik III.9 menggambarkan target Renstra Kemenkes sebesar 100 sebanding dengan realisasi indikator kinerja kegiatan BBKK Makassar, karena semua factor risiko yang ditemukan pada indikator 1 dikendalikan pada indikator 2.

Grafik III.10 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator Ke-2 BBKK Makassar Semester I tahun 2024



Grafik III.10 menggambarkan realisasi tahun 2024 BBKK Makassar sesuai dengan target RAP tahun 2024. Hal ini karena semua faktor risiko yang ditemukan dalam pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan dikendalikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kerja sama tim yang solid didukung dengan SDM yang berkompeten sehingga di akhir tahun 2024 realisasi kegiatan dapat mencapai target sesuai yang ditetapkan.

Grafik III.11 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024



Dari grafik III.11 di atas menunjukkan BBKK Makassar, Surabaya, dan Denpasar dengan realisasi 100%. BBKK Medan realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Namun semua berproses sampai akhir tahun 2024. Dalam menetapkan target BBKK Makassar mengacu pada tahun-tahun sebelumnya dengan realisasi sesuai target, sehingga ditetapkan target sebesar 100%. Dengan maksud semua faktor risiko yang ditemukan dikendalikan sesuai dengan aturan berlaku berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing parameter.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Peran lintas sektor dan lintas program yaitu Dinkes Prov., Kota/Kab., PT. Angkasa Pura I, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Kesyahbandaran, KSOP, maskapai penerbangan, agen kapal dan travel.
- 2) Pengawasan pelaku perjalanan tetap dilaksanakan walaupun status pandemi Covid-19 telah dicabut.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini pada pelaku perjalanan yang masuk kategori *suspect* penyakit menular dan kontak erat.
- 4) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD.
- 5) Ketersediaan anggaran yang mendukung terlaksananya kegiatan.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Sumber daya dalam pengawasan meliputi SDM, sarana, dan prasarana kurang memadai.
- 2) Masih terdapat beberapa pelaku perjalanan yang tidak menerima dinyatakan status tidak laik terbang
- 3) Masih terdapat Pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak menolak untuk dilakukan pemeriksaan swab Antigen/PCR.
- 4) Belum ada keseragaman pelaksanaan aturan pengawasan pesawat dalam negeri terjangkau dan OMKABA di BKK seluruh Indonesia.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Peningkatan sumber daya yang dibutuhkan di BKK.
- 2) Memberikan edukasi kepada pelaku perjalanan tentang syarat laik terbang, izin angkut jenazah, orang sakit, dan pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak erat.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor mengenai prosedur penanganan pelaku perjalanan luar negeri yang termasuk *suspect* dan/atau kontak erat.
- 4) Mengusulkan keseragaman regulasi terkait pengawasan pesawat dalam negeri terjangkau dan OMKABA di seluruh BKK.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai Efisiensi

$$E = \frac{(502.410.000 \times 1) - 231.325.000}{502.410.000 \times 1} \times 100\%$$

$$E = 53,96\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{53,96}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 184,89\%$$

Untuk indikator 2 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 502.410.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.325.000,- serta capaian indikator sebesar 100%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 53,96% dengan nilai efisiensi sebesar 184,89%. Nilai efisiensi lebih dari 50, berarti untuk kegiatan pada indikator 2 bernilai efisien dari sisi anggaran.

Selain efisiensi dari anggaran, penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Adanya *Whatsapp Group* yang telah dibuat yang beranggotakan lintas sektor pelabuhan dan bandara, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta dari KKP Kelas I Makassar yang memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi dan bertukar informasi dalam penanganan penyakit infeksi emerging.
- 2) Penggunaan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

3. INDIKATOR KETIGA

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN pada tahun 2023 adalah sebesar 0,96.

a. Pengertian

Persentase status Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN selama periode satu tahun, berupa :

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%
- 2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1
- 3) Persentase Bandara/Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva Anopheles (< 1)
- 4) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa < 2
- 5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat < 2
- 6) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter = 0
- 7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1

- 8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan
- 9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan
- 10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun

c. Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi persentase target dan capaian:

- 1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%
- 2) Indeks Pinjal ≤ 1
- 3) Larva Anopheles (< 1)
- 4) Populasi Kecoa < 2
- 5) Populasi Lalat < 2
- 6) HI Perimeter = 0
- 7) HI Buffer < 1
- 8) TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan
- 9) TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan
- 10) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

$$\frac{\text{Indeks Pengendalian FR di Pintu Masuk Negara}}{\text{Target Indeks FR di Pintu Masuk Negara}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{0,98}{0,88} \times 100\% = 91,67 \%$$

Tabel III.11 Perbandingan Target dan Realisasi Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

No	Parameter	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	100	100	100
2	Nilai Indeks Pinjal ≤ 1	100	100	100
3	Tidak ditemukan Larva Anopheles (< 1)	100	100	100
4	Kepadatan kecoa rendah < 2	100	100	100
5	Kepadatan lalat < 2	100	100	100
6	HI Perimeter = 0	100	100	100
7	HI Buffer < 1	100	100	100
8	Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	100	100	100
9	Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	100	100	100
10	Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	60	0	0

Tabel III.12 Perhitungan Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN KKP BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

No	Parameter	Bobot	Baseline	Score	Score Max
1	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	5	100	500	500
2	Nilai Indeks Pinjal ≤ 1	4	100	400	400
3	Tidak ditemukan Larva Anopheles (< 1)	3	100	300	300
4	Kepadatan kecoa rendah < 2	4	100	400	400
5	Kepadatan lalat < 2	4	100	400	400
6	HI Perimeter = 0	5	100	500	500
7	HI Buffer < 1	5	100	500	500
8	Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	4	100	400	400
9	Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	5	100	500	500
10	Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali	5	0	0	500

No	Parameter	Bobot	Baseline	Score	Score Max
	Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis				
Total				3.900	4.400
Indeks = 3.900/4.400 = 0,88					

Berdasarkan Tabel II.12 diperoleh score sebesar 3.900. Untuk perhitungan indeks dengan formulasi nilai score dibagi dengan score maksimal, sehingga diperoleh nilai indeks sebesar 0,88.

Tabel III.13 Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar
Semester I Tahun 2024

No	Indikator	Target RAP	Target RAK	Realisasi	Capaian
1	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	100%	0,96	0,88	91,67%

Dari table III.13 dapat dilihat capaian untuk indikator 3 sebesar 91,67%, diperoleh dari perbandingan antara realisasi Semester I dengan target RAK BBKK Makassar Tahun 2024

1) Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Tabel III.14 Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko
Di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BBKK Makassar
Semester I Tahun 2024

Parameter Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%

Parameter	Pengendalian	Target	Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan 80%	Penyelidikan Epidemiologi (PE)	35	35	182
	Penumpang Meninggal di Pesawat	3	3	
	Notifikasi Suhu \geq 37,5°C atau kontak erat =>	40	40	
	Notifikasi TB Positif	0	0	
	Notifikasi HIV Positif	0	0	

Parameter	Pengendalian	Target	Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
	Notifikasi IMS Positif	2	2	
	Notifikasi Malaria Positif	4	4	
	Notifikasi Suspek Covid-19 dengan pemeriksaan Antigen/PCR	46	46	
	Notifikasi ILI	14	14	
	Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah (SKTLT Penyakit Menular)	9	9	
	SKTLT Sakit atau Pertolongan Darurat/ SKTLT Hamil > 32 Minggu	29	29	

Pengambilan sampel suspek Covid-19 sebanyak 46 sampel, diperiksa dengan Antigen sebanyak 8 sampel ditemukan 2 positif dan diperiksa dengan PCR sebanyak 38 sampel ditemukan 6 positif. Semua suspek diberikan notifikasi.

Pemeriksaan sampel ILI sebanyak 14 sampel, dengan hasil positif Influenza A sebanyak 5 sampel dan negatif sebanyak 5 sampel. Masih terdapat sampel yang belum keluar hasil sebanyak 4 sampel.

Berdasarkan tabel III.14 dapat dilihat bahwa indikator sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% dengan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Pinjal ≤ 1

Nilai indeks pinjal di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel III.15

Tabel III.15 Nilai Indeks Pinjal di Wilayah Kerja
BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Nilai Indeks pinjal ≤ 1	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III. 15 pada semester I tahun 2024 dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetkan pemasangan perangkat tikus, indeks pinjal tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (≤ 1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Untuk parameter ini mencapai target 100% pelabuhan/bandara dengan Indeks pinjal ≤ 1 .

3) Persentase Bandara/ Pelabuhan Tidak Ditemukan Larva *Anopheles* (< 1)

Tabel III.16 Hasil Survey Tingkat Kepadatan Larva *Anopheles* di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Tidak Ditemukan Larva <i>Anopheles</i> sp (< 1)	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.16 pada semester I tahun 2024 dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetkan dengan tingkat kepadatan larva *Anopheles* sp tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (indeks habitat <1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Diperoleh hasil mencapai target 100%.

4) **Persentase Bandara/ Pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa (< 2)**

Tabel III.17 Kepadatan Kecoa di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Kepadatan Kecoa Rendah < 2	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tamba Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.17 di atas dapat dilihat bahwa dari semua wilayah kerja yang ditargetka memenuhi syarat tidak melebihi nilai baku mutu yang dipersyaratkan (<2 ekor) berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. diperoleh capaian target 100%.

5) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat <2

Tabel III.18 Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Kepadatan Lalat < 2	Pelabuhan Awerange	1	1	1	1	0	1
	Pelabuhan Bajoe	1,2	1,8	1,6	1,1	1,6	0,8
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	1,8	1,6	1,6	1,8	1,5	1,6
	Pelabuhan Makassar	1,4	0,7	0,7	0,5	0,7	1,16
	Pelabuhan Malili	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Pelabuhan Palopo	1,6	1,1	1,2	0	1,8	1,9
	Pelabuhan Parepare	1,6	1,5	1,6	1,5	0,8	1
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	1,36
	Pelabuhan Majene	1,2	1,6	1,4	1,8	1,2	1,4
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	1,2	1,3
	Pelabuhan Pasangkayu	1	1	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tamba Padang	0	1,1	0,3	0	1	1,3
	Bandara Hasanuddin	1	0	1	0	1	0

Berdasarkan tabel III.18 di atas dapat dilihat terjadi fluktuasi pada hasil pengamatan setiap bulannya, hasil pengamatan yang melebihi baku mutu dilakukan tindakan pengendalian untuk

menekan kepadatan. dari semua wilayah kerja yang ditargetkan indeks populasi lalat tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan (<2 ekor) berdasarkan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Diperoleh capaian target 100%.

6) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Perimeter=0

Tabel III.19 Kepadatan Jentik *Aedes aegypti* Area Perimeter di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
HI Perimeter = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tamba Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.19 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil survey jentik *Ae. aegypti*, semua wilayah kerja yang ditargetkan didapatkan nilai House Indeks (HI) = 0 pada area perimeter dan tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Kepmekes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan. Untuk indikator ini mencapai target 100%.

7) Persentase Bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1

Tabel III.20 Kepadatan Jentik *Ae. aegypti* Area Buffer di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
HI buffer = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bira Bulukumba	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Majene	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Siwa	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampa Padang	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel III.20 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil survey jentik *Ae. aegypti*, semua wilayah kerja yang ditargetkan didapatkan nilai House Indeks (HI) = 0 pada area buffer area dan tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Kepmekes RI No. 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/ Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan. Untuk indikator ini mencapai target 100%.

8) Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan

Tabel III.21 Pemeriksaan TTU di Wilayah Kerja
BBKK Makassar
Semester I Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian	
		100%	100%	100%	
Persentase Lokus TTU Memenuhi Syarat dengan Minimal 3 Kali Pemeriksaan	Pelabuhan Awerange	2	2		
	Pelabuhan Bajoe Bone	2	2		
	Pelabuhan Belang Belang Mamuju	2	2		
	Pelabuhan Biringkassi	3	3		
	Pelabuhan Makassar	2	2		
	Pelabuhan Palopo	2	2		
	Pelabuhan Parepare	2	2		
	Pelabuhan Bira Bulukumba	1	1		
	Pelabuhan Majene	1	2		
	Pos Pelabuhan Paotere	1	1		
	Pos Pelabuhan Pasangkayu	2	2		
	Bandara Hasanuddin	1	1		
	Total		21		21

Berdasarkan tabel III.21 di atas didapatkan bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2024 sebanyak 21 lokus dari 12 wilayah kerja, realisasi semester 1 tahun 2024 semua lokus memenuhi syarat kesehatan dan telah memenuhi kriteria minimal 3 kali pemeriksaan memenuhi syarat kesehatan. Setiap lokus dilaksanakan minimal 3 kali pemeriksaan dengan nilai Inspeksi Kesehatan Lingkungan memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Sarana dan Bangunan berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023. Persentase realisasi kinerja untuk parameter ini sebesar 100% dan mencapai target sebesar 100%.

9) Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan

Tabel III.22 Pemeriksaan TPP di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Parameter	Wilayah Kerja	Target	%Realisasi	%Capaian
		100%	100%	100%
Persentase Lokus TPP Laik Hygiene dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan	Pelabuhan Bajoe Bone	12	12	
	Pelabuhan Biringkassi	8	8	
	Pelabuhan Makassar	5	5	
	Pelabuhan Palopo	4	4	
	Pelabuhan Parepare	7	7	
	Pelabuhan Bira Bulukumba	2	2	
	Pelabuhan Majene	1	1	
	Pos Pelabuhan Paotere	4	4	
	Pelabuhan Mamuju	1	1	
	Bandara Hasanuddin	6	6	
	Bandara Tumpa Padang	1	1	
	Total		51	

Berdasarkan tabel III.22 di atas didapatkan bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2024 sebanyak 51 lokus dari 11 wilayah kerja dengan capaian realisasi semester 1 tahun 2024 adalah 51 dari 51 lokus. Setiap lokus ditargetkan dilaksanakan

pemeriksaan kesehatan lingkungan minimal 2 kali pemeriksaan dengan nilai Inspeksi Kesehatan Lingkungan memenuhi syarat sesuai dengan Standar Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Lingkungan, Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2021. Persentase realisasi kinerja untuk parameter ini sebesar 100%.

10) Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis

Tabel III.23 Hasil Pemeriksaan Kualitas Air di Wilayah Kerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

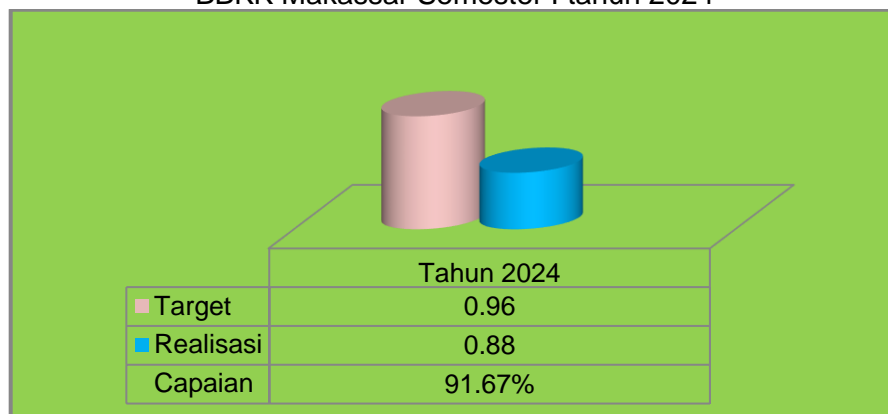
Parameter	Wilayah Kerja	Target Lokus (60%)	Pemeriksaan						Realisasi %	Capaian %
			P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6		
Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis	Pelabuhan Makassar	2	0	2	2	2	2	2	0	0
	Bandara Hasanuddin	4	0	3	2	4	3	2		
	Pelabuhan Rakyat Paotere	2	2	2	0	2	1	2		

Berdasarkan tabel III.23 bahwa jumlah lokus yang menjadi target pada tahun 2024 sebanyak 8 lokus di 3 wilayah kerja dengan realisasi semester 1 tahun 2024 belum terdapat lokus yang memenuhi kriteria minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan mikrobiologi memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023.

Wilker dengan lokus air bersih/air minum yang menjadi target adalah wilker yang terdapat laboratorium terakreditasi, namun untuk wilker lainnya yang tidak terdapat laboratorium terakreditasi tetap melakukan pengawasan kualitas air bersih dengan parameter fisik dan kimia.

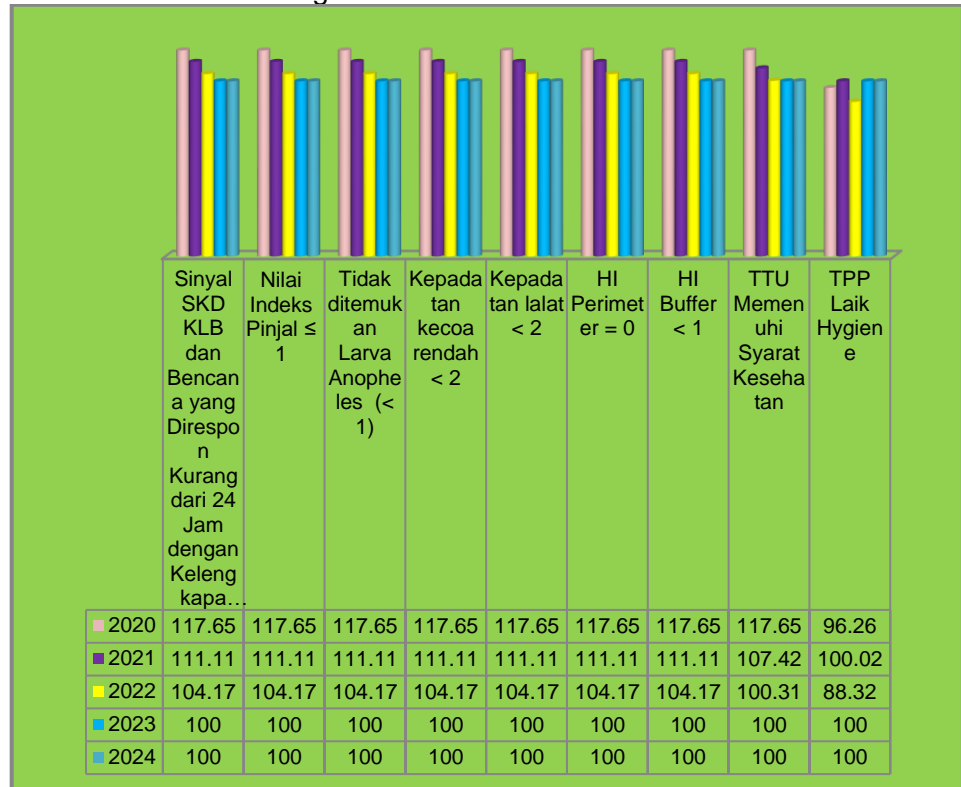
Keberhasilan indikator ini belum dapat ditarik kesimpulan secara menyeluruh karena kegiatan dilaksanakan dengan parameter 6 kali dilakukan pemeriksaan memenuhi syarat selama setahun, sehingga untuk menarik kesimpulan dibutuhkan data pemeriksaan selama setahun pada setiap lokus.

Grafik III.12 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-3 BBKK Makassar Semester I tahun 2024



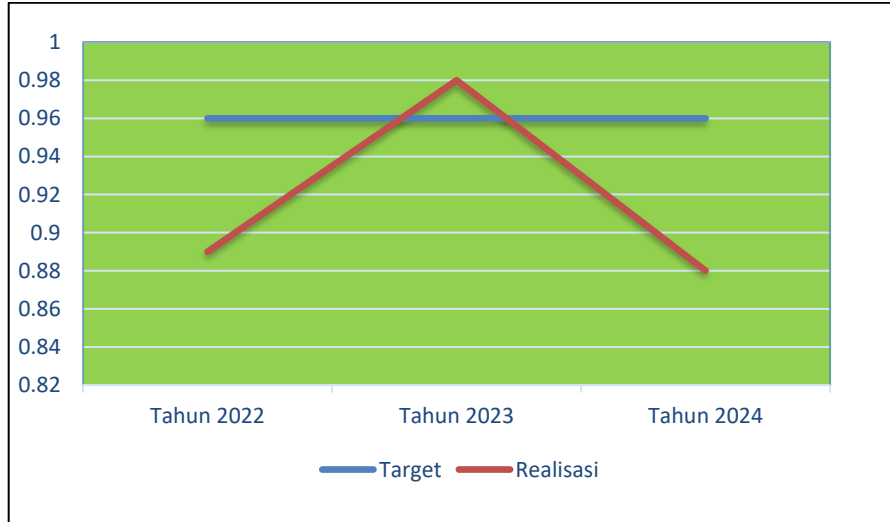
Grafik III.12 menunjukkan realisasi tidak tercapai untuk Semester I Tahun 2024. Realisasi sebesar 0.88 masih lebih kecil dibanding dengan target yang ditetapkan 0,96. Perolehan Indeks pada tahun 2024 dipengaruhi oleh 10 parameter, terdapat 1 parameter yang belum terealisasi yaitu Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis, karena pemeriksaan sampel air untuk pemeriksaan mikrobiologisnya belum terdapat lokus yang memenuhi 6 (enam) kali hasil pemeriksaan memenuhi standar (MS). Diharapkan sampai akhir tahun 2024 pemeriksaan sampel air terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.13 Perbandingan Realisasi Parameter Indikator ke-3 BBKK Makassar tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dengan Semester I tahun 2024



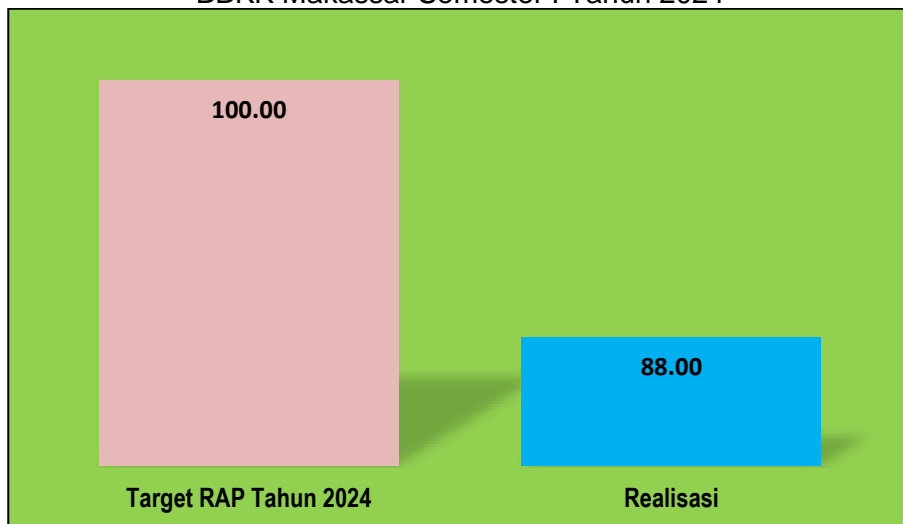
Grafik III.13 menggambarkan realisasi parameter indikator ke-3 BBKK Makassar. Untuk tahun 2023 terdapat 1 parameter dengan realisasi kurang dari 100 yaitu Persentase Lokus Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan dengan Minimal 2 Kali Pemeriksaan Kimia Lengkap dan 6 Kali Pemeriksaan Mikrobiologis/ Bakteriologis. Untuk tahun 2022 yang tidak terealisasi dan 2022 terdapat 2 parameter yang tidak terealisasi yaitu parameter TPP Laik Hygiene dan Parameter Kualitas Air bersih selama 2 tahun berturut-turut tidak mencapai target. Dan untuk tahun 2024 parameter ke-10 belum terealisasi karena untuk pemeriksaan sampel air belum terdapat lokus yang pemeriksaan biologisnya sudah 6 (enam) kali. Kegiatan masih berlangsung, diharapkan tahun 2024 parameter ke-10 dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Grafik III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2022-2024) Indikator Ke-3 BBKK Makassar



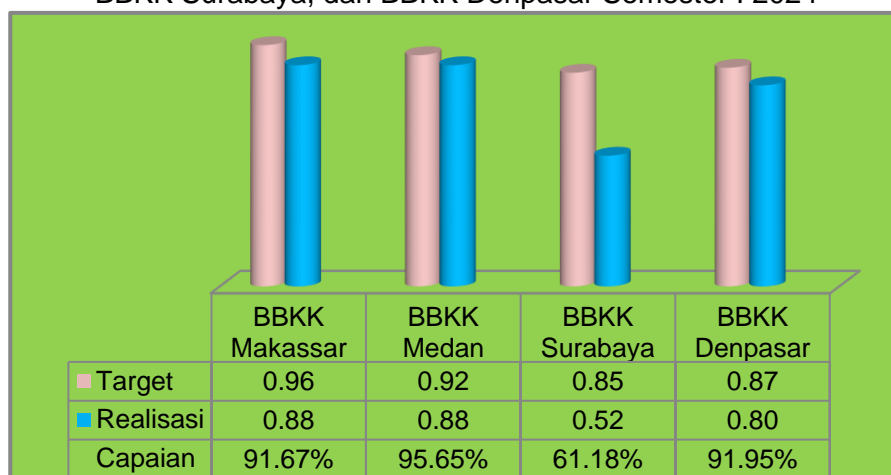
Grafik III.14 tergambar realisasi indicator untuk tahun 2023 lebih besar dibanding dengan target tahun 2023, dengan capaian sebesar 102,08%. Untuk tahun 2022 tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2024 belum terealisasi karena terdapat parameter pemeriksaan sampel air yang belum terealisasi karena belum mencukupi 6 kali pemeriksaan mikrobiologis untuk masing-masing lokus yang ditetapkan. Diharapkan di akhir tahun 2024 dapat terealisasi sesuai dengan target krn untuk parameter ke-10 sudah terdapat lokus yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 5 kali dengan hasil memenuhi syarat.

Grafik III.15 Perbandingan Target RAP Dengan Realisasi Kinerja Indikator Ke-3 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024



Grafik III.15 menggambarkan realisasi kinerja indikator 3 BBKK Makassar lebih kecil dibanding dengan target RAP tahun 2024. Hal ini karena 1 parameter di indicator 3 belum terealisasi di Semester I Tahun 2024, namun masih berproses menunggu hasil pemeriksaan sampel air berikutnya. Diharapkan di akhir tahun 2024 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.16 Perbandingan Capaian Indikator ke-3 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semester I 2024



Dari Grafik III.16 menunjukkan bahwa ke 4 KKP belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, namun kegiatan masih berjalan, diharapkan tahun 2024 akan terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Sistem surveilans yang mengintegrasikan pelaporan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas), Rumah Sakit dan BBKK pada website <https://skdr.surveilans.org> memudahkan dalam sistim kewaspadaan dini penyakit potensial KLB dan BBKK Makassar berperan aktif dalam menggunakan sistim ini.
- 2) Keberhasilan kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah kerja dalam rangka mengendalikan kepadatan populasi vektor karena adanya dukungan tenaga kader dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Kader yang direkrut sebagian dari lulusan program studi kesehatan lingkungan, sehingga sudah paham teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan BPP.
- 3) Wilayah kerja yang melebihi baku mutu pada indikator yang dipersyaratkan dilakukan upaya pengendalian sesuai dengan petunjuk teknis ataupun peraturan yang mengatur tentang upaya pengendalian vektor dan BPP antara lain :
 - Metode pengamatan yang digunakan untuk mengetahui indeks pinjal yaitu dengan metode pemasangan perangkap jenis perangkap hidup (*lifetrap*) metode tersebut selain sebagai media pengamatan untuk menghitung *succestrap* juga berperan untuk mengurangi populasi tikus pada area pemasangan perangkap sehingga populasi tikus yang berperan sebagai inang dari pinjal pada lokasi pengamatan akan berkurang, selanjutnya pada tikus yang tertangkap dilakukan penyisiran untuk melihat keberadaan pinjal. Pemasangan perangkap yang telah dilaksanakan merupakan intervensi pengendalian terhadap inang dari pinjal yang secara

tidak langsung berkurangnya inang dari pinjal pada lokasi pengamatan juga akan menekan indeks pinjal pada area tersebut.

- Pemantauan dilakukan pada lokasi-lokasi yang memungkinkan sebagai perkembangbiakan nyamuk *Anopheles sp.* baik pada *perimeter area* ataupun di *buffer area*. Pada lokasi pengamatan yang ditemukan larva *Anopheles sp.* dilakukan tindakan pengendalian dengan larvasidasi menggunakan larvasida BTI (*Bacillus thuringiensis israelensis*) Larvasida ini memiliki cara kerja yaitu sebagai racun perut, setelah tertelan kristal endotoksin larut yang mengakibatkan sel epitel rusak dan serangga berhenti makan lalu mati.
- Metode pengamatan yang digunakan untuk mengetahui indeks kepadatan kecoa yaitu dengan metode pemasangan perangkap jenis perangkap lem (*sticky trap*) metode tersebut selain sebagai media pengamatan juga berperan untuk mengurangi populasi pada area pemasangan perangkap sehingga populasi kecoa pada lokasi pengamatan akan berkurang. Selain itu beberapa tempat pengolahan pangan di terminal bandara yang sudah rutin melaksanakan pengendalian vektor dan BPP baik secara mandiri ataupun dengan menggunakan jasa *pest control*.
- Tindakan pengendalian yang dilakukan pada lokasi dengan indeks kepadatan lalat yang tinggi yaitu dengan metode pengendalian secara kimia (*spraying*), metode ini dapat menekan dan memberantas lalat dewasa sebagai tindakan pengendalian dalam rangka mencegah penyakit tular vektor dan BPP yang disebabkan oleh lalat.
- Pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* dilakukan pada fase jentik dengan larvasidasi dan untuk nyamuk dewasa yaitu dengan pengasapan/ fogging. Pemberian larvasida ini dapat menekan kepadatan populasi untuk jangka waktu 2 bulan. Pembubuhan larvasida dilakukan bersamaan saat melakukan survey jentik. Apabila ditemukan container yang berpotensi

serta positif larva. Jenis larvasida yang digunakan adalah jenis larvasida granula temephos. Temephos 1 % sesuai dengan yang dianjurkan aman bagi manusia dan tidak menimbulkan keracunan. Jika dimasukkan kedalam air maka sedikit demi sedikit zat kimia tersebut akan larut secara merata dan membunuh semua larva nyamuk yang ada dalam tempat penampungan air tersebut. Dosis penggunaan temephos adalah 10 gram untuk 100 liter air.

- 5) Keberhasilan capaian kinerja pada setiap lokus Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat kesehatan, pendekatan persuasif terhadap pengelola ataupun karyawan memberikan kemudahan dalam membangun komunikasi pendampingan untuk mencapai hasil sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
 - 6) Adanya kesadaran masyarakat pelabuhan dan bandara membangun komitmen dalam mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat.
 - 7) Peran aktif lintas sektor membantu dalam menerapkan regulasi terkait SOP pelaksanaan program pengendalian risiko lingkungan di pelabuhan dan bandara.
 - 8) Intervensi terhadap lokus air bersih/air minum yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan oleh pihak pengelola berdasarkan rekomendasi yang diberikan sehingga kualitas sampel air yang diperiksa didapatkan hasil memenuhi syarat pada pemeriksaan berikutnya.
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Hasil pemeriksaan Laboratorium membutuhkan waktu lama sehingga berpotensi menimbulkan penularan di wilayah.
 - 2) Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional di wilayah kerja
 - 3) Ketersediaan dana bersumber SBK dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan BPP belum maksimal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- 4) Terbatasnya Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) yang dinyatakan sebagai petugas yang kompeten dalam pengambilan contoh uji air (PPCUA)

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Berkoordinasi dengan Laboratorium untuk memberikan prioritas terhadap pemeriksaan sampel suspek KLB.
- 2) Pengadaan SDM melalui CPNS, PPPK maupun mutasi internal Kemenkes untuk didistribusikan ke wilayah kerja.
- 3) Penambahan anggaran pelaksanaan program pengendalian vektor dan BPP.
- 4) Tenaga sanitasi lingkungan ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Uji Air (PPCUA)
- 5) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai metode pengendalian vektor serta pemberdayaan masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 6) Bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi yang terdapat di wilayah kerja yang dapat melakukan pemeriksaan kualitas air bersih.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja
NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(571.546.000 \times 0,92) - 233.796.660}{571.546.000 \times 0,92} \times 100\%$$

$$E = 55,38\%$$

Untuk indikator 3 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 571.546.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 233.796.660,- serta capaian indikator sebesar 91,67%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 55,38% dengan nilai efisiensi sebesar 188,44%. Dari hasil perhitungan terlihat nilai efisiensi yang lebih dari 50, artinya kinerja terlaksana dengan penggunaan anggaran yang tidak terlalu besar.

Selain itu efisiensi penggunaan dari sisi anggaran, efisiensi sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Sumber daya yang digunakan adalah memanfaatkan petugas surveilans puskesmas, maupun petugas surveilans BKK, sedangkan untuk wilker dengan jumlah personil yang terbatas ditunjuk petugas penanggung jawab Timker 1.
- 2) Ketersediaan SDM terlatih yang jumlahnya terbatas sehingga satu petugas melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya.
- 3) Keterlibatan kader pada kegiatan survey dan pengendalian vektor dan BPP.

4. INDIKATOR KEEMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

Persentase Capaian Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI..

b. Definisi Operasional

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap salah satunya Kinerja Anggaran Tingkat Satker.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

- 1) Variabel Efektivitas Penggunaan Anggaran yang diukur melalui Indikator Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 2) Variabel Efisiensi Penggunaan Anggaran yang diukur melalui Indikator yang meliputi Penggunaan Efisiensi SBK dan Efisiensi SBK.

c. Rumus (cara perhitungan)

Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut :

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Adapun pengukuran capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai Kinerja Anggaran}}{\text{Target Nilai Kinerja Anggaran}} \times 100\%$$

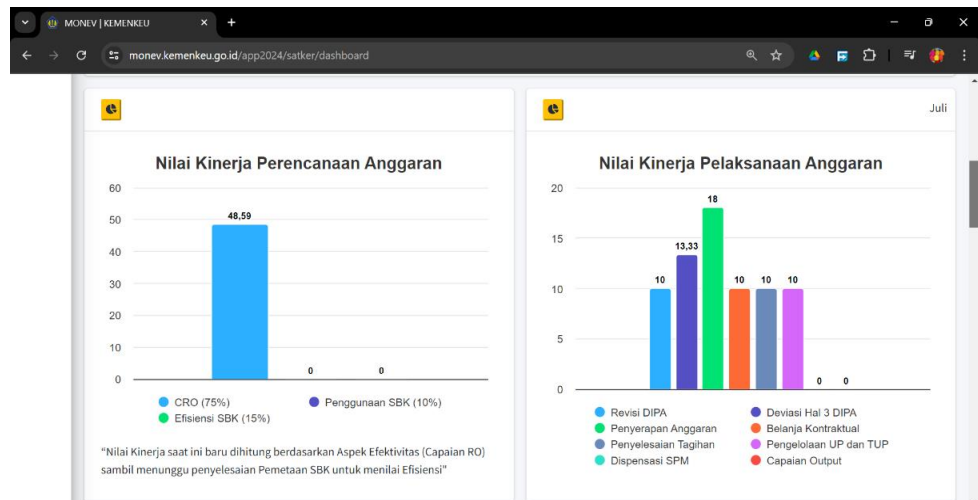
d. Evaluasi Capaian Kinerja

Sesuai dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI, nilai Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar semester I tahun 2024 adalah sebesar 48,59.

Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi.

Adapun *output* yang telah terealisasi adalah sebanyak 6697 dari 34441 volume yang tersebar di 42 KRO/RO.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar semester I tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam Gambar III.1.

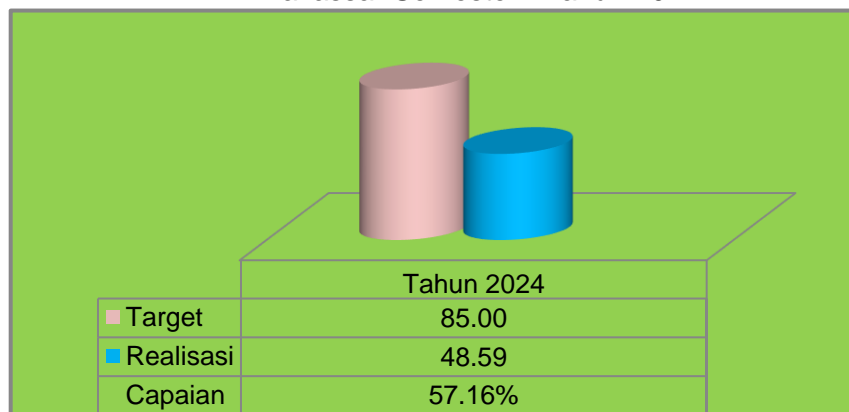


Gambar III.1 Screenshot Nilai Kinerja Anggaran pada *dashboard* Aplikasi SMART Kemenkeu BBKK Makassar semester I tahun anggaran 2024

Sesuai dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI, nilai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar semester I tahun 2024 adalah sebesar 48,59.

Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi

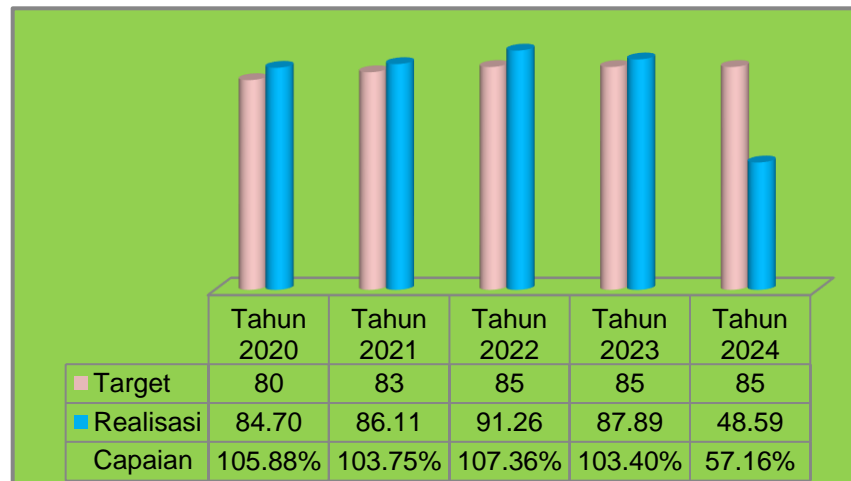
Grafik III.17 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024



Grafik III.17 menunjukkan realisasi yang lebih kecil dibanding dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 48,59%. Untuk saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektifitas (Capaian RO) sambal menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi.

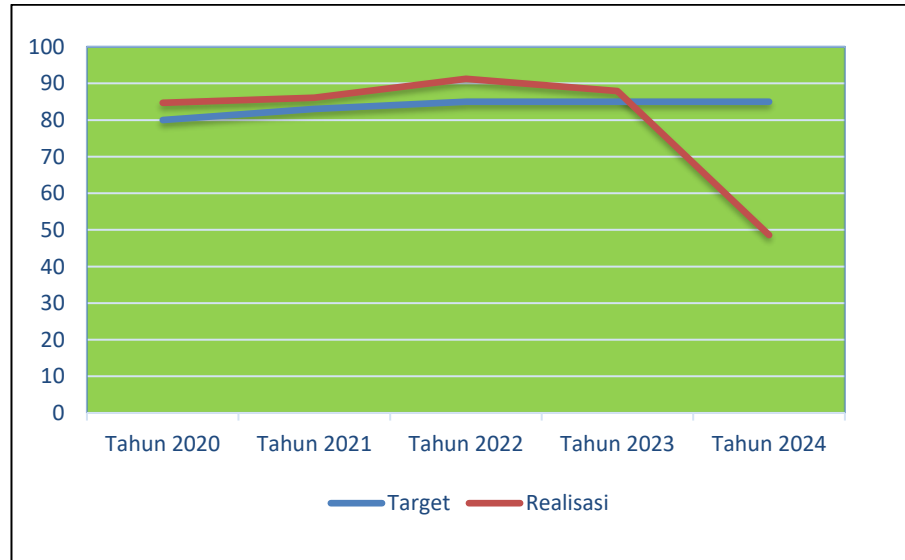
Adapun perbandingan capaian indikator ke-4 antara tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2024 dapat dilihat dalam Grafik III.18.

Grafik III.18 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dengan Semester I tahun 2024



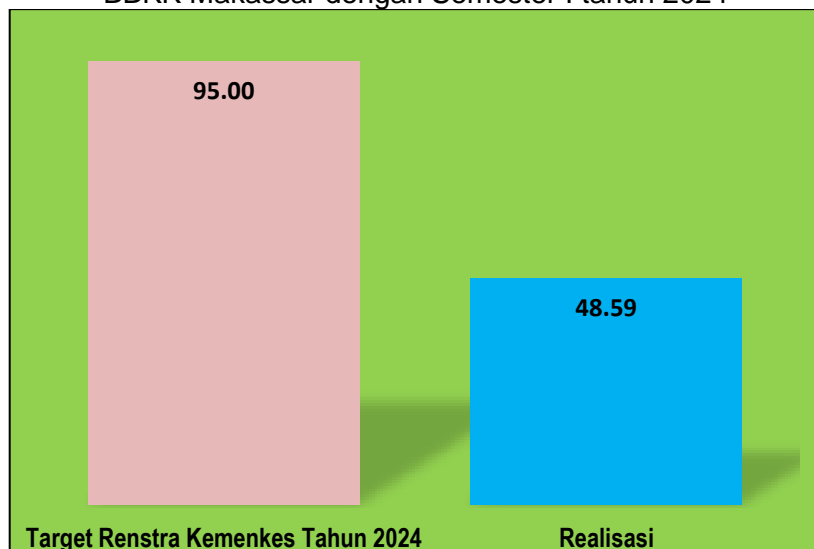
Dari grafik III.18 terlihat untuk realisasi Nilai Kinerja Anggaran untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 berada di atas target yang telah ditentukan. Pada Semester I tahun 2024 menunjukkan nilai realisasi yang belum maksimal karena penilainya masih sebatas aspek efektifitas (Capaian RO) saja, sambal menunggu aplikasi rampung. Diharapkan tahun 2024, NKA dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Grafik III.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-4 BBKK Makassar



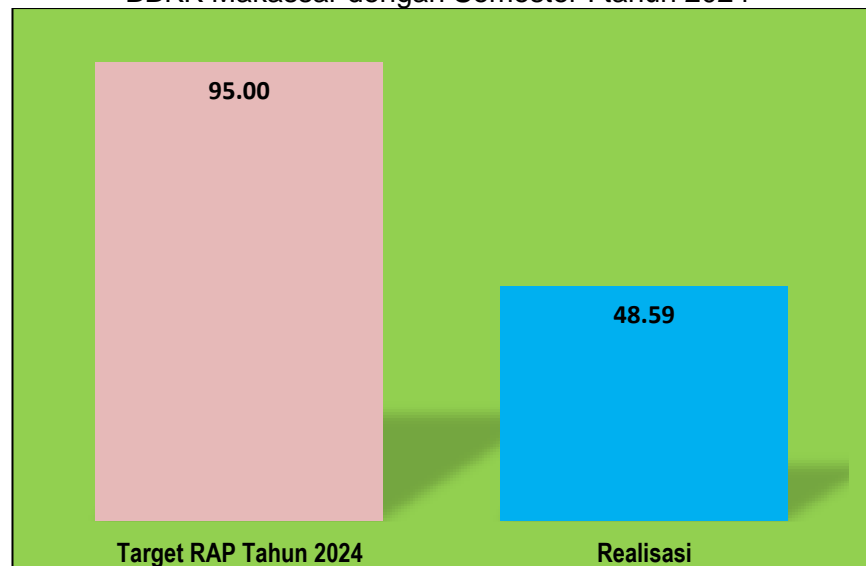
Grafik III.19 tergambar realisasi paling besar pada tahun 2022 yaitu sebesar 91,26 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Untuk Semester I tahun 2024 realisasi NKA belum dapat terhitung sempurna, sambil menunggu aplikasi rampung. Diharapkan tahun 2024 NKA dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik III.20 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar dengan Semester I tahun 2024



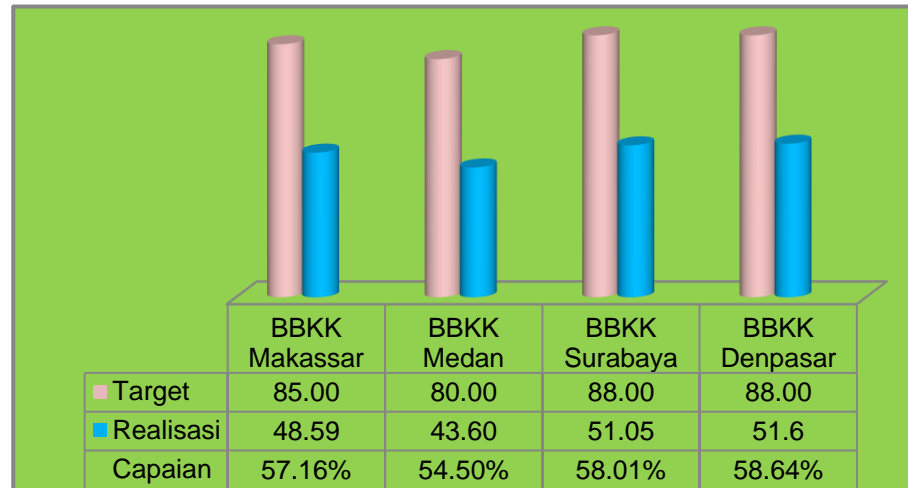
Grafik III.20 menggambarkan target Renstra lebih besar dari realisasi yang ditetapkan pada IKK ke 4 BBKK Makassar, hal ini dikarenakan penilaian masih Semester I dan aplikasi belum rampung dari segi penilaian. Proyeksi dari Semester I dapat dilihat kalau indikator NKA dapat tercapai di tahun 2024.

Grafik III.21 Perbandingan Target RAP dengan Realisasi Indikator Ke-4 BBKK Makassar dengan Semester I tahun 2024



Grafik III.21 menunjukkan realisasi indikator ke 4 BBKK Makassar lebih kecil dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024. Hal ini dikarenakan tools penilaian NKA belum sempurna dari aplikasi, sehingga tidak mengakomodir parameter lain sebagai penambah bobot nilai, penilaian hanya dari segi aspek efektifitas (capaian RO) saja.

Grafik III.22 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-4
BBKK Makassar dengan BBKK Medan,
BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar
Semester I Tahun 2024



Dari Grafik III.22 terlihat realisasi untuk ke empat BKK belum ada yang caoai target. Penilaian hanya masih aspek efektifitas saj, sehingga penilaian NKA belum sempurna. Melihat realisasi di Semester I dengan realisasi sudah mencapai 50%, diproyeksikan keempat BBKK dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi (*monev*) realisasi anggaran serta capaian output kegiatan secara berkala.
Seluruh kegiatan yang ada dalam RKAKL dilakukan pembahasan capaian realisasinya serta kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai alternatif pemecahan masalah.
- 2) Melakukan revisi kegiatan dan anggaran dalam RKAKL.
Untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang tidak terencana sebelumnya, maka dilakukan revisi anggaran baik pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), revisi Kanwil DJPb maupun revisi DJA.
Di samping revisi terhadap kegiatan dan anggaran juga dilakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman

III DIPA. Hal ini dilakukan agar terjadi kesesuaian antara RPD dengan realisasi penarikan dana. Kesesuaian tersebut menjadi salah satu komponen penilaian evaluasi kinerja anggaran.

f. Masalah yang dihadapi

Penyerapan anggaran yang cenderung tidak sesuai dengan RPD awal pada triwulan I sampai dengan triwulan III akibat dari beberapa kegiatan bersumber dari PNBPN sehingga tidak tersedia dana. Kondisi ini menyebabkan capaian realisasi *output* juga berkurang.

Serta dikembalikannya pagu anggaran pada triwulan III tahun 2023 yang sebelumnya telah dilakukan revisi efisiensi, sehingga mengakibatkan penanggung jawab kegiatan harus mengejar realisasi anggaran dan capaian realisasi *output* kegiatan ditriwulan III tahun 2023.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Melakukan revisi penyesuaian ketersediaan anggaran bersumber PNBPN
- 2) Meningkatkan realisasi PNBPN sesuai perkiraan penerimaan
- 3) Melakukan revisi alokasi anggaran ke kegiatan yang lebih strategis untuk dilaksanakan agar capaian realisasi *output* juga lebih meningkat.
- 4) Melakukan revisi Rencana Penarikan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD).

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurangi realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\%\right)$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja
 RAKi : Realisasi anggaran kinerja
 NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(359.202.000 \times 0,57) - 140.616.503}{359.202.000 \times 0,57} \times 100\%$$

$$E = 31,51\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{31,51}{20} \times 50\%\right)$$

$$NE = 128,78\%$$

Untuk indikator 4 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 359.202.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.616.503,- serta capaian indikator sebesar 57,16%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 31,51% dan nilai efisiensi sebesar 128,78%. Kinerja berjalan maksimal tapi penyerapan anggaran untuk indikator ini tidak terealisasi secara keseluruhan.

Selain itu efisiensi penggunaan anggaran, efisiensi sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

Pelaksanaan kegiatan monev realisasi anggaran dan monev capaian keluaran yang dilakukan secara berkala dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya seperti rekonsiliasi data PNBK dan pertemuan koordinasi internal.

Dengan metode pelaksanaan kegiatan monev seperti ini maka akan terjadi efisiensi sumber daya baik waktu, tenaga maupun biaya.

5. INDIKATOR KELIMA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Pengertian

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja.

b. Definisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Satker dihitung sebagaimana berikut :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *)} - \text{Dispensasi SPM}$$

*) keterangan :

- 1) Konversi bobot bernilai 100 persen apabila Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai dan
- 2) Konversi bobot bernilai dibawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

d. Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran terdapat 8 (delapan) indikator dengan bobot terlihat dalam tabel III.24.

Tabel III.24 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Aspek	No	Indikator Kinerja	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1	Revisi DIPA	10%
	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3	Penyerapan Anggaran	20%
	4	Belanja Kontraktual	10%
	5	Penyelesaian Tagihan	10%
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8	Capaian Output	25%
Total			100%

Dari hasil perhitungan capaian kinerja indikator IKPA BBKK Makassar Semester I tahun 2024 sebesar 95,64 dengan kategori sangat baik, ditunjukkan dalam gambar III.2 dashboard OM-SPAN.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	136	024	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nilai	100.00	100.00	98.76	100.00	100.00	100.00	83.56	95.64	100%	0.00	95.64	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.75	10.00	10.00	10.00	20.89					
					Nilai Aspek	100.00			99.69			83.56					

Gambar III.2
Dashboard Aplikasi OM-SPAN
hasil perhitungan capaian kinerja IKPA
BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Dari gambar III.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Revisi DIPA

Indikator revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan Satker dalam satu semester.

Indikator revisi DIPA ini merupakan salah satu indikator yang mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 Tahun 2022 ke tahun 2024, dimana sebelumnya frekuensi yang dihitung adalah per triwulan menjadi semesteran.

Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat satker dan termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Kanwil DJPB Kementerian Keuangan antara lain :

- a. (201) Antar fungsi/sub fungsi dan/atau antar program
- b. (211) Pemenuhan belanja operasional
- c. (212) Penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional
- d. (213) Pergeseran anggaran dari belanja operasional ke belanja non-operasional
- e. (217) Penyelesaian tunggakan
- f. (220) Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola
- g. (221) Pergeseran anggaran antarjenis belanja
- h. (222) Kontrak tahun jamak
- i. (225) RO cadangan
- j. (226) Penurunan volume RO secara total
- k. (229) Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
- l. (231) Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
- m. (236) Pergeseran anggaran antar KRO dan/atau antar kegiatan

n. (239) Revisi dalam rangka pagu tetap lainnya

Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA sebagaimana berikut :

Jumlah Revisi DIPA	Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA)
0-1	110
2	100
≥ 3	50

Revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I dan semester II masing-masing diberikan bobot sebesar 50%.

Formula perhitungan nilai IKPA revisi DIPA = (50% x NKRA Semester I) + (50% x NKRA Semester II), dimana NKRA berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam satu semester.

Tahun 2024 semester I BBKK Makassar telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 3 kali dengan pagu tetap.

Tabel III.25
Revisi DIPA BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

No	Revisi DIPA	Tanggal Pengesahan DIPA	Perubahan Pagu	Kode Revisi	Jenis Revisi	Keterangan
1	Revisi DIPA 1	1 Februari 2024	Tidak	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	Tidak termasuk dalam objek penilaian Revisi DIPA
2	Revisi DIPA 2	19 April 2024	Tidak	224	Pergeseran Anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional	
				315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	
				325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	
3	Revisi DIPA 3	2 Juni 2024	Tidak	224	Pergeseran Anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional	

				315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	
--	--	--	--	-----	---	--

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan aplikasi OM-SPAN, Nilai Parameter Revisi DIPA BBKK Makassar pada Tahun 2024 semester I adalah 100. Berdasarkan tabel III.25 terlihat bahwa dalam satu semester dilakukan tiga kali revisi DIPA dengan pagu tetap, namun revisi yang dilakukan tidak termasuk dalam objek perhitungan untuk indikator revisi DIPA dalam penilaian IKPA sehingga masih mendapat nilai 100. Revisi dengan Kode 315 yakni perubahan Rencana Penarikan Dana pada triwulan II dilakukan sebanyak 2 kali yakni pada bulan April dan Juni hal ini sebabkan adanya reformulasi nilai IKPA sehingga Satker diperkenankan untuk melakukan penyesuaian halaman III DIPA agar mendapat nilai maksimal sebelum dilakukan reformulasi pada aplikasi OM-SPAN.

2) Deviasi Halaman III DIPA

Indikator deviasi halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi Halaman III DIPA.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulanan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk

triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama bulan Februari.

Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal *posting* DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum 100 adalah 5%. Nilai deviasi halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

Adapun nilai parameter Deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar tahun 2024 semester I dapat dilihat pada tabel III.26 berikut ini.

Tabel III.26
Parameter Deviasi Halaman III DIPA
BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

No.	Kode Saktor	Nama Saktor	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulasi	Nilai IKPA						
					S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7	S1	S2	S3	S7									
1	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN MAKASSAR	136	01	578.404.144	58.298.378	0	0	578.404.144	59.298.382	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	33,10	1,00	0,00	0,45	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN MAKASSAR	136	02	1.386.409.905	1.112.425.645	21.000.000	0	1.376.933.504	1.069.270.550	21.004.000	0	9.476.381	43.155.095	4.000	0	0,68	3,88	0,02	0,00	85,89	33,10	1,00	0,00	0,45	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3	416146	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN MAKASSAR	136	03	1.427.958.899	851.617.961	172.015.165	0	2.802.309.302	663.388.607	164.143.995	0	1.374.880.403	168.229.344	7.871.600	0	96,28	19,75	4,98	0,00	85,89	33,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN MAKASSAR	136	04	1.397.332.035	822.038.110	2.258.000	0	1.397.332.036	822.038.104	2.258.000	0	1	14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	33,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN MAKASSAR	136	05	1.424.733.296	861.733.907	102.000.730	0	1.422.706.599	845.706.176	102.000.730	0	971.001	10.047.731	0	0	0,07	2,43	0,00	0,00	85,89	33,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAN KESEHATAN MAKASSAR	136	06	2.878.576.986	1.834.528.630	5.000.000	0	2.790.210.460	1.370.914.510	4.965.000	0	88.357.506	464.014.120	35.000	0	3,07	25,20	6,70	0,00	85,89	33,10	1,00	0,00	0,00	2,02	6,37	0,01	0,00	10,40	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Sumber : OM-SPAN 2024

Nilai deviasi Halaman III DIPA BBKK Makassar tahun 2024 semester I berdasarkan Aplikasi OM-SPAN adalah 100. Indikator deviasi Halaman III DIPA mengalami reformulasi dari Perdirjen 5 tahun 2022 ke tahun 2024, yakni deviasi bulanan semula dihitung berdasarkan rata-rata per jenis belanja menjadi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja. Selain itu, bobot penilaian IKPA untuk deviasi halaman III DIPA dari 10% menjadi 15%.

3) Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja yakni :

a. Belanja Pegawai (51)

Triwulan I 20%, Triwulan II 50%, Triwulan III 75%, dan Triwulan IV 95%.

b. Belanja Barang (52)

Triwulan I 15%, Triwulan II 50%, Triwulan III 70%, dan Triwulan IV 90%.

c. Belanja Modal (53)

Triwulan I 10%, Triwulan II 40%, Triwulan III 70%, dan Triwulan IV 90%.

Nilai Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar Tahun 2024 Semester I pada Aplikasi OM-SPAN adalah 93,66, sebagaimana yang terlihat pada tabel III.27 berikut ini :

Tabel III.27 Parameter Penyerapan Anggaran BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

Periode	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja			NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
		51	52	53		
'01	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	10.82	100.00
	Proporsi Pagu	65.89%	33.10%	1.00%		

	Penyerapan s.d Periode Ini	578,404,144	59,298,382	-		
	% Realisasi	14.45%	3.93%	0.00%		
	Nominal Target	4,002,002,600	1,507,850,550	30,515,000		
	Target	20%	15%	10%		
	NKPA Tertimbang	9.52	1.30	-		
'02	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	57.66	100.00
	Proporsi Pagu	65.89%	33.10%	1.00%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	1,955,337,668	1,128,568,932	21,004,000		
	% Realisasi	48.86%	74.85%	68.83%		
	Nominal Target	4,002,002,600	1,507,850,550	30,515,000		
	Target	20%	15%	10%		
	NKPA Tertimbang	32.19	24.78	0.69		
'03	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	99.99	100.00
	Proporsi Pagu	65.89%	33.10%	1.00%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	4,758,176,970	1,811,957,539	185,147,585		
	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%		
	Nominal Target	4,002,002,600	1,507,850,550	30,515,000		
	Target	20%	15%	10%		
	NKPA Tertimbang	65.89	33.10	1.00		
'04	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	58.88	79.44
	Proporsi Pagu	65.89%	33.10%	1.00%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	6,155,509,026	2,633,985,663	187,405,585		
	% Realisasi	61.52%	52.41%	100.00%		
	Nominal Target	10,005,006,500	5,026,168,500	122,060,000		
	Target	50%	50%	40%		
	NKPA Tertimbang	40.54	17.35	1.00		
'05	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	76.86	88.43
	Proporsi Pagu	65.89%	33.10%	1.00%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	8,238,783,492	3,279,691,839	289,415,315		
	% Realisasi	82.35%	65.25%	100.00%		

	Nominal Target	10,005,006,500	5,026,168,500	122,060,000		
	Target	50%	50%	40%		
	NKPA Tertimbang	54.26	21.60	1.00		
'06	Pagu Jenis Belanja	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	97.52	98.76
	Proporsi Pagu	65.89%	33.10%	1.00%		
	Penyerapan s.d Periode Ini	10,371,435,085	4,650,606,349	294,380,315		
	% Realisasi	100.00%	92.53%	100.00%		
	Nominal Target	10,005,006,500	5,026,168,500	122,060,000		
	Target	50%	50%	40%		
	NKPA Tertimbang	65.89	30.63	1.00		

Sumber : OM-SPAN 2024

Berdasarkan tabel III.27 pada triwulan II target belanja 52 sebesar Rp.5.026.168.500,- (50% dari total pagu belanja 52) dengan realisasi Rp4.650.606.349,- atau 92,53% dari target sehingga indikator penyerapan anggaran Semester I sebesar 98,76.

4) Belanja Kontraktual

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker. Belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja :

a. Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN. Data kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I adalah kontrak belanja barang/modal dengan nilai di atas Rp50 juta. Poin yang diberikan untuk kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya dilakukan pada rentang setelah DIPA tahun anggaran berkenaan disahkan sampai dengan sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (kontrak dini) adalah sebesar 120. Poin yang

diberikan untuk data kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 110.

b. Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian kontrak belanja modal terhadap seluruh data kontrak belanja modal yang didaftarkan ke KPPN. Penyelesaian kontrak belanja modal yang dimaksud adalah penyelesaian pembayaran atas belanja modal yang dibayarkan sekaligus dengan nilai Rp50 juta ke atas sampai dengan Rp200 juta. Penyelesaian pembayaran yang dimaksud mengacu pada tanggal SP2D. poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian kontrak belanja modal yakni :

- 1) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 100;
- 2) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada triwulan II tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 90;
- 3) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan III tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 80; dan
- 4) Perjanjian/kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan sampai dengan triwulan IV tahun anggaran berkenaan diberikan poin sebesar 70.

c. Komponen distribusi akselerasi kontrak (bobot 20%)

Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan II dan didaftarkan ke KPPN dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke

KPPN selama tahun anggaran berkenaan. Poin yang diberikan untuk setiap data perjanjian/kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II yakni :

- 1) Rasio >75% (nilai 100)
- 2) 50,01%<Rasio<=75% (nilai 80)
- 3) 25,01%<Rasio<=50% (nilai 60)
- 4) 0,01%<Rasio<=25% (nilai 50)
- 5) Rasio = 0% (nilai 0)

Nilai Belanja Kontraktual BBKK Makassar tahun 2024 semester I berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 100.

Tabel III.28 Parameter Belanja Kontraktual BBKK Makassar Semester I Tahun 2024

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak			Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
					Jumlah Kontrak	Jumlah Kontrak SMT I	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak TW I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	
1	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	01	7	17	100.00	3	4	115.71	0	0	0.00	100.00
2	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	02	7	17	100.00	3	4	115.71	0	0	0.00	100.00
3	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	03	11	17	100.00	7	4	113.64	1	1	100.00	100.00
4	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	04	11	17	100.00	7	4	113.64	1	1	100.00	100.00
5	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	05	15	17	100.00	7	4	113.64	1	1	100.00	100.00
6	416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	06	17	17	100.00	7	4	113.64	1	1	100.00	100.00

Sumber : OM-SPAN 2024

5) Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada Satker. Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Nilai Penyelesaian

tagihan tahun 2024 semester I pada aplikasi OM SPAN 100, artinya seluruh SPM LS kontraktual disampaikan dengan tepat waktu ke KPPN.

6) Pengelolaan UP/TUP

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu Pertanggungjawaban UP (GUP) dan Pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai dari komponen :

a. Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%)

Dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari selain PNBPN. Pengelolaan UP dan TUP Tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen Nilai Kinerja :

(1) Ketepatan waktu (bobot 50%)

(2) Persentase GUP disebulankan (25%)

(3) Setoran TUP (25%)

b. Pengelolaan UP KKP (bobot 10%)

Dihitung untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.

Nilai Pengelolaan UP/TUP BBKK Makassar pada tahun 2024 semester I berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mendapat nilai 100.

7) Dispensasi SPM

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Indikator dispensasi SPM ini mengalami reformulasi untuk penilaian IKPA tahun 2024, dimana sebelumnya menjadi salah

satu indikator yang memiliki bobot 5%, sekarang dihitung diluar komponen nilai IKPA yaitu sebagai pengurang nilai IKPA.

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV.

Pengurangan nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio dispensasi SPM sebagai berikut :

- a. Kategori 1 : 0,00 (tidak ada dispensasi SPM) pengurangan nilai 0
- b. Kategori 2 : 0,01 - 0,099 pengurangan 0,25
- c. Kategori 3 : 0,1 – 0,99 pengurangan 0,50
- d. Kategori 4 : 1 – 4,99 pengurangan 0,75
- e. Kategori 5 : $\geq 5,00$ pengurangan 1,00

Tahun 2024 semester 1 belum ada pengurangan nilai karena yang dinilai adalah ada dispensasi SPM di triwulan IV.

8) Capaian Output

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada Satker. Capaian Output dihitung berdasarkan Nilai Kinerja :

a. Komponen Ketepatan Waktu (30%)

Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Poin yang diberikan untuk setiap RO yang dilaporkan tepat waktu ada sebesar 100 dan yang terlambat adalah sebesar 0.

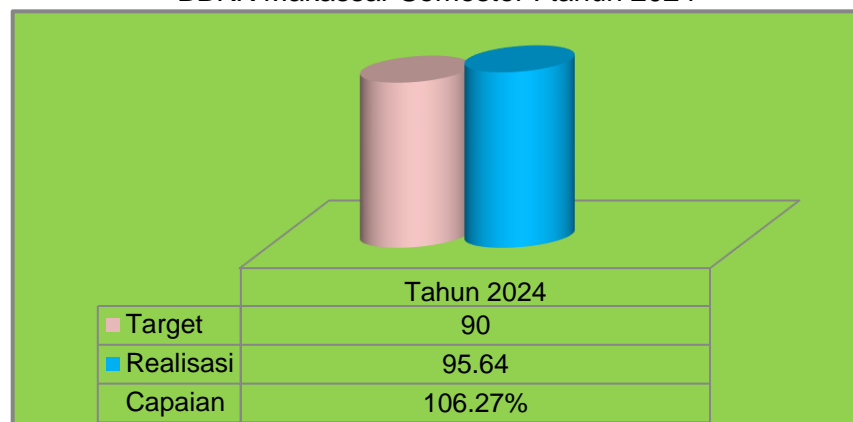
b. Komponen Capaian RO (70%)

Dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Ketentuan target capaian RO adalah periode Januari – November berdasarkan target progress capaian RO (TPCRO), periode Desember berdasarkan target volume RO dalam DIPA dan apabila

pada periode Januari – November PCRO yang dilaporkan bernilai 100, maka target yang digunakan adalah target RO dalam DIPA. RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status terkonfirmasi.

Nilai Capaian output pada tahun 2024 semester I berdasarkan aplikasi OM SPAN adalah sebesar 83,56.

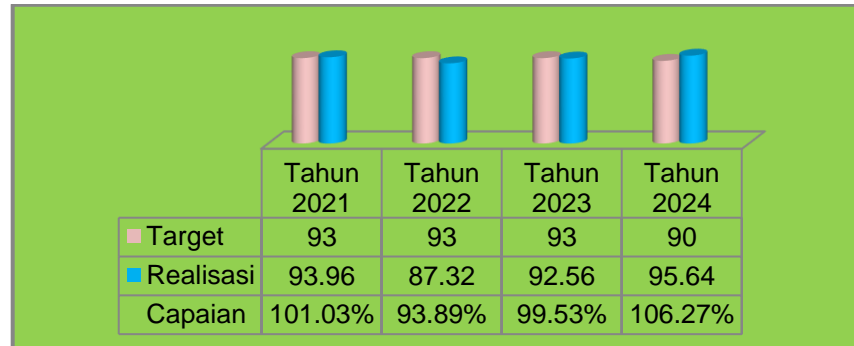
Grafik III.23 Perbandingan target dan realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar Semester I tahun 2024



Dari grafik III.23 terlihat indikator IKPA dengan realisasi sebesar 95,64 lebih tinggi dibanding dengan target sebesar 90. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu maksimalnya nilai untuk parameter Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP dan TUP. Dengan bobot yang terendah pada capaian output sebesar 83,56. Kegiatan masih terus berproses, sehingga IKPA diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi indikator ke-5 BBKK Makassar tahun 2021 sd 2024 dapat dilihat dalam grafik III.24.

Grafik III.24 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 BBKK Makassar tahun 2021, 2022, 2023 dengan Semester I tahun 2024



Grafik III.24 terlihat bahwa tahun 2021 realisasi indicator tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, namun untuk tahun 2022 dan 2023 realisasi indikator ke-5 tidak mencapai target yang ditentukan. Tahun 2021 terdapat 13 parameter penilaian IKPA, sedangkan tahun 2022 dan 2023 terdapat 8 parameter perhitungan yang sama dalam penentuan nilai IKPA yaitu revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

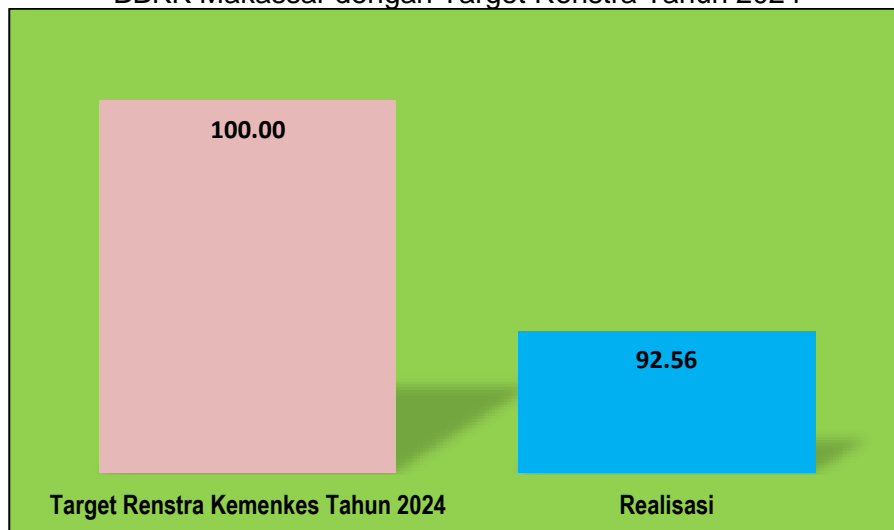
Tahun 2023 realisasi tidak tercapai karena terdapat 4 parameter yang tidak terealisasi secara maksimal yaitu Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP/TUP, sehingga realisasi hanya bernilai 92,56 mengakibatkan capaian menjadi 99,53%. Melihat realisasi yang tidak tercapai selama tahun 2022 dan 2023, sehingga pada tahun 2024 target diturunkan menjadi 90. Untuk Semester I tahun 2024, IKPA melebihi target yang telah ditetapkan, karena terdapat beberapa parameter yang mencapai nilai maksimal.

Grafik III.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Semeseter I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2021-2024) Indikator Ke-5 BBKK Makassar



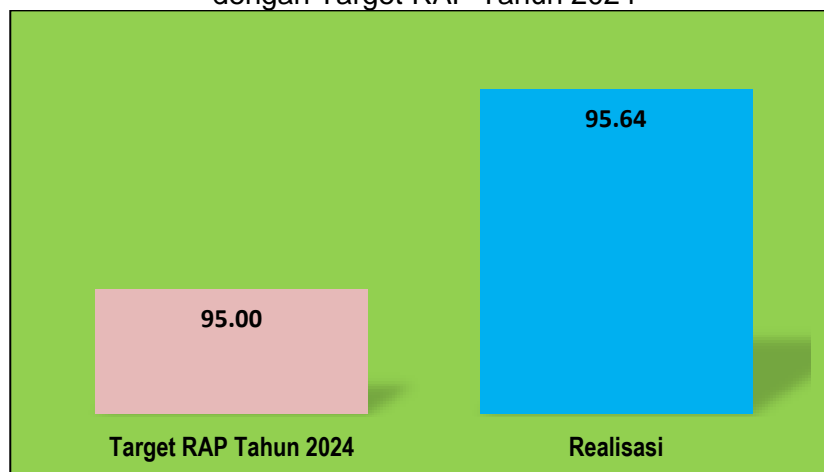
Grafik III.25 tergambar target untuk tahun 2021 sampai 2024 sebesar 93, dimana dasar penetapan target untuk tahun 2023 dan 2024 mengikuti realisasi di tahun 2021. Realisasi terkecil di tahun 2022 sebesar 87,32 dan yang terbesar di tahun 2021. Untuk tahun 2022 realisasi tidak tercapai karena terdapat 4 parameter yang tidak tercapai yaitu Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP/TUP, sehingga realisasi hanya bernilai 92,56. Berdasarkan realisasi di tahun 2022 dan 2023 yang tidak tercapai, maka akan dilakukan evaluasi terhadap target dan strategi untuk pencapaian realisasi di tahun 2024. Karena target tidak tercapai di tahun 2022 dan 2023 maka penetapan target untuk tahun 2024 turun menjadi 90.

Grafik III.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Ke-5 Semester I Tahun 2024 BBKK Makassar dengan Target Renstra Tahun 2024



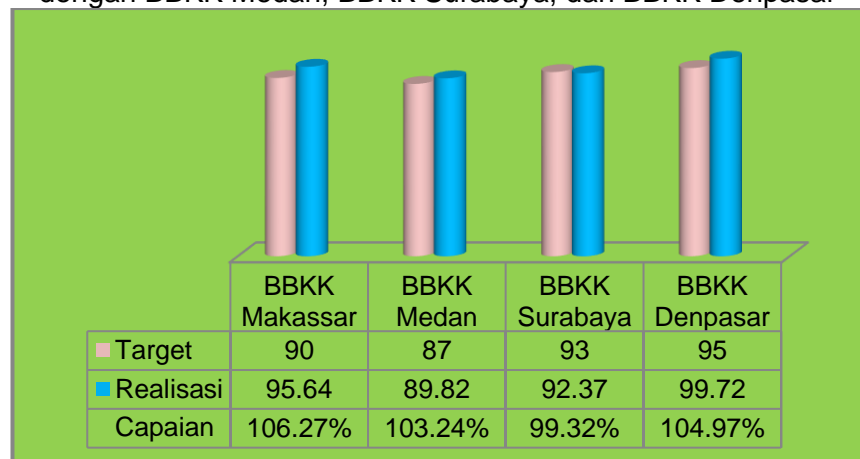
Grafik III.26 menggambarkan realisasi yang lebih kecil dari target Renstra untuk IKPA tahun 2024. Terdapat 8 parameter penilaian dalam penentuan nilai IKPA. Untuk BBKK Makassar di Semester I tahun 2024 terdapat 5 parameter penilaian yang bernilai maksimal, namun realisasi belum target Renstra yang telah ditetapkan, kegiatan masih berproses sampai Desember 2024, sehingga dibutuhkan kerja sama antar timker dan subbag adum untuk memaksimalkan realisasi pada IKPA di tahun 2024.

Grafik III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Ke-5 Semester I Tahun 2024 BBKK Makassar dengan Target RAP Tahun 2024



Grafik III.27 menunjukkan realisasi indikator kinerja 5 BBKK Makassar lebih besar dibanding dengan target RAP tahun 2023. Realisasi tahun 2023 tidak tercapai sesuai dengan target RAP karena terdapat 4 parameter yang tidak tercapai yaitu Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP/TUP, sehingga realisasi hanya bernilai 92,56, karena itu dibutuhkan evaluasi terhadap realisasi tahun 2023 yang tetap mengacu kepada target nasional. Dan juga akan dibuatkan strategi dalam pencapaian realisasi. Untuk tahun 2024 target diturunkan karena 2 (dua) tahun sebelumnya target tidak terealisasi. Namun untuk tahun 2024, terdapat 5 (lima) parameter yang bernilai maksimal sehingga realisasi IKPA Semester I Tahun 2024 melebihi target RAP 2024.

Grafik III.28 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-5 Semester I Tahun 2024 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar



Grafik III.28 menggambarkan bahwa hanya BBKK Surabaya yang tidak mencapai realisasi sesuai target yang ditentukan.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dilakukan evaluasi realisasi kinerja dan anggaran secara berkala;

- 2) Maksimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja.
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Internal
Adanya perubahan struktur penanggungjawab kegiatan dari Koordinator menjadi Tim Kerja sehingga usulan anggaran yang awalnya berasal dari koordinator dibagi ke ketua tim kerja sesuai dengan tupoksi Tim Kerjanya. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran
 - 2) Eksternal
Reformulasi IKPA dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 menjadi Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Internal
 - a) Mengadakan rapat koordinasi dengan tim kerja setiap awal bulan untuk progres kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang telah/akan dipertanggungjawabkan
 - b) Melaksanakan monev secara berkala terkait IKPA
 - 2) Eksternal
Sosialisasi tatacara perhitungan nilai IKPA sesuai Perdirjen Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- h. Analisis Efisiensi Sumber Daya
- Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran

kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(26.056.666.000 \times 1,06) - 13.574.141.686}{26.056.666.000 \times 1,06} \times 100\%$$

$$E = 50,98\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{50,98}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 177,45\%$$

Untuk indikator 5 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.278.059.000,- Rp. 26.056.666.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.056.922.670,- Rp. 13.574.141.686,- serta capaian indikator sebesar 106,27%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 50,98%. Dari efisiensi sebesar 50,98% sehingga diperoleh nilai efisiensi 177,45%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Koordinasi dan komunikasi yang intens antar timker dan subbag adum untuk memastikan progres pelaksanaan setiap kegiatan baik volume maupun progres keuangan sehingga dapat mengefisienkan sumber daya yang ada.
- 2) Penunjukan petugas khusus untuk konsultasi permasalahan di KPPN per satuan kerja sangat memudahkan untuk melakukan

konsultasi kapan dan dimana saja melalui media komunikasi tercepat seperti WA dan telepon.

6. INDIKATOR KEENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

Target nilai WBK untuk BBKK Makassar tahun 2024 sebesar 81.

a. Pengertian

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil dengan kriteria sebagai berikut :

KOMPONEN	BOBOT
1. Pengungkit	60,00
a) Pemenuhan	30,00
- Pokja I: Manajemen Perubahan	4,00
- Pokja II: Penataan Tatalaksana	3,50
- Pokja III: Penataan Sistem Manajemen	5,00

	SDM Aparatur	
	- Pokja IV: Penguatan Akuntabilitas	5,00
	- Pokja V: Penguatan Pengawasan	7,50
	- Pokja VI: Peningkatan Kualitas	5,00
	Pelayanan Publik	
b)	Reform	30,00
	- Pokja I: Manajemen Perubahan	4,00
	- Pokja II: Penataan Tatalaksana	3,50
	- Pokja III: Penataan Sistem Manajemen	5,00
	SDM Aparatur	
	- Pokja IV: Penguatan Akuntabilitas	5,00
	- Pokja V: Penguatan Pengawasan	7,50
	- Pokja VI: Peningkatan Kualitas	5,00
	Pelayanan Publik	
2.	Hasil	40,00
a)	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50
	- Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50
	- Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
b)	Pelayanan Publik yang Prima	17,50
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50

Adapun pengukuran capaian indikator Kinerja Implementasi WBK Satker ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai WBK}}{\text{Target Nilai Nilai WBK}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 diambil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Assesment Tim Itjen Kementerian Kesehatan RI Pada Tanggal 13 Juni 2024

dengan Nilai 82,19. Hal ini merupakan salah satu proses pendampingan yang dilakukan oleh Kemenkes dalam mengusulkan BBKK Makassar sebagai satker berpredikat WBK Nasional. Pendampingan dilaksanakan juga oleh Tim P2P sebelum Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian. Setelah TPI menyatakan BBKK Makassar berhasil, maka penilaian selanjutnya akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dengan leading sector dari Kementerian PAN-RB.

Adapun nilai implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 dapat dijelaskan sesuai dengan nilai pemenuhan dan reform pada tabel III.29 berikut ini:

Tabel III.29 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Semeseter I Tahun 2024

No	KOMPONEN	Bobot	Nilai	Nilai
A	PENGUNGKIT	60.00	45.94	76.57%
I	PEMENUHAN	30.00	22.28	74.25%
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	2.90	72.51%
	i Penyusunan Tim Kerja	0.50	0.38	75.00%
	ii Rencana Pembangunan Zona Integritas	1.00	0.67	66.67%
	iii Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	1.00	0.67	67.00%
	iv Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1.50	1.19	79.25%
2	PENATAAN TATALAKSANA	3.50	2.47	70.67%
	i Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1.00	0.72	72.33%
	ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.00	1.50	75.00%
	iii Keterbukaan Informasi Publik	0.50	0.25	50.00%
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	3.31	66.29%
	i Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.25	0.22	89.00%
	ii Pola Mutasi Internal	0.50	0.29	58.33%
	iii Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1.25	0.80	63.83%
	iv Penetapan Kinerja Individu	2.00	1.38	68.75%
	v Peningkatan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0.75	0.50	67.00%
	vi Sistem Informasi Kepegawaian	0.25	0.13	50.00%
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	4.73	94.50%
	i Keterlibatan Pimpinan	2.50	2.23	89.00%
	ii Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2.50	2.50	100.00%
5	PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	5.26	70.19%
	i Pengendalian Gratifikasi	1.50	1.50	100.00%
	ii Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.50	0.75	50.00%
	iii Pengaduan Masyarakat	1.50	1.31	87.50%
	iv Whistle-Blowing System	1.50	1.00	66.67%
	v Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.70	46.80%
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	3.60	71.95%
	i Standar Pelayanan	1.00	0.92	91.75%
	ii Budaya Pelayanan Prima	1.00	0.51	51.33%
	iii Pengelolaan Pengaduan	1.00	0.17	16.67%
	iv Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1.00	1.00	100.00%
	v Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.00	1.00	100.00%
II	REFORM	30.00	23.66	78.88%
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	2.32	58.12%
	i Komitmen dalam perubahan	2.00	0.90	45.24%
	ii Komitmen Pimpinan	1.00	0.75	75.00%
	iii Membangun Budaya Kerja	1.00	0.67	67.00%
2	PENATAAN TATALAKSANA	3.50	0.34	9.57%
	i Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0.50	0.34	67.00%
	ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1.00	0.00	0.00%
	iii Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2.00	0.00	0.00%
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	4.25	85.00%
	i Kinerja Individu	1.50	1.50	100.00%
	ii Assessment Pegawai	1.50	0.75	50.00%
	iii Pelanggaran Disiplin Pegawai	2.00	2.00	100.00%
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	4.26	85.10%
	i Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2.00	1.75	87.50%
	ii Pemberian Reward and Punishment	1.50	1.01	67.00%
	iii Kerangka Logis Kinerja	1.50	1.50	100.00%
5	PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	7.50	100.00%
	i Mekanisme Pengendalian	2.50	2.50	100.00%
	ii Penanganan Pengaduan Masyarakat	3.00	3.00	100.00%
	iii Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2.00	2.00	100.00%
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	5.00	100.00%
	i Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50	2.50	100.00%
	ii Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2.50	2.50	100.00%
RATA RATA PENGUNGKIT (I PEMENUHAN + II REFORM)				
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	5.23	65.31%
2	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.81	40.12%
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	7.56	75.65%
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	8.98	89.80%
5	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	12.76	85.10%
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	8.60	85.98%
B	HASIL	40.00	36.25	90.63%
I	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50	18.75	83.33%
	1 Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.50	17.50	100.00%
	2 Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	1.25	25.00%
II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50	17.50	100.00%
	1 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17.50	17.50	100.00%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (A+B)		100.00	82.19	82.19%

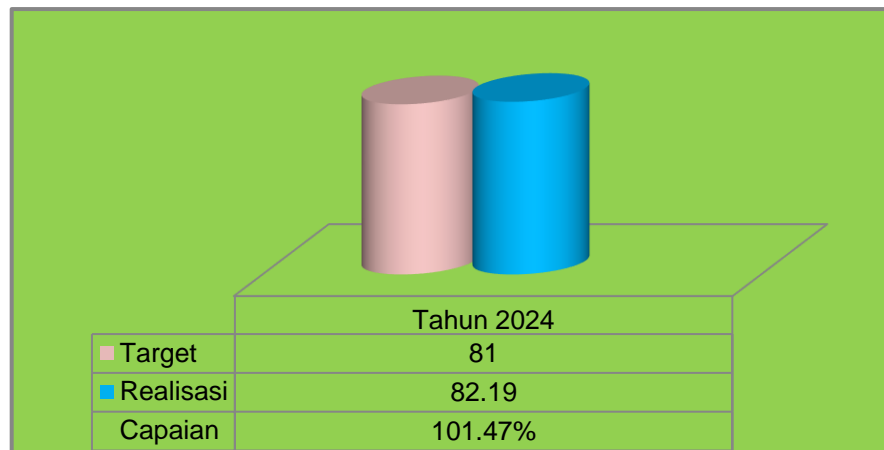
Dari tabel III.29 dapat diperoleh realisasi nilai implementasi WBK KKP Kelas I Makassar Tahun 2023 adalah sebesar 81,46, dengan persentase capaian indikator pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Nilai WBK}}{\text{Target Nilai WBK}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{82,19}{81} \times 100\%$$

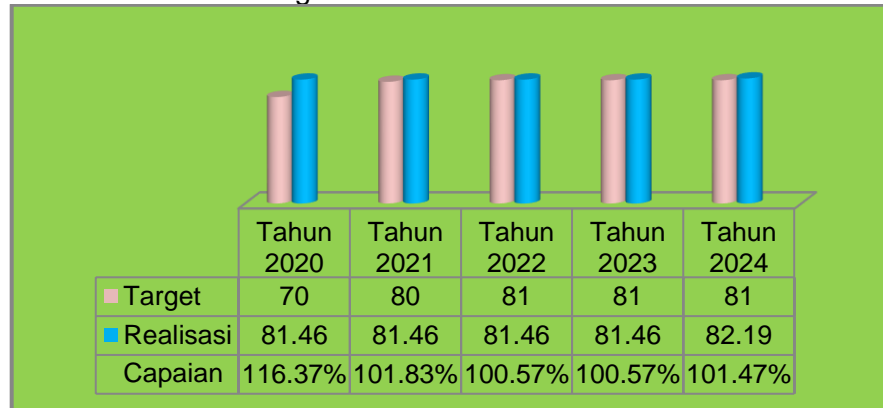
$$\text{Persentase Capaian} = 101,47\%$$

Grafik III.29 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024



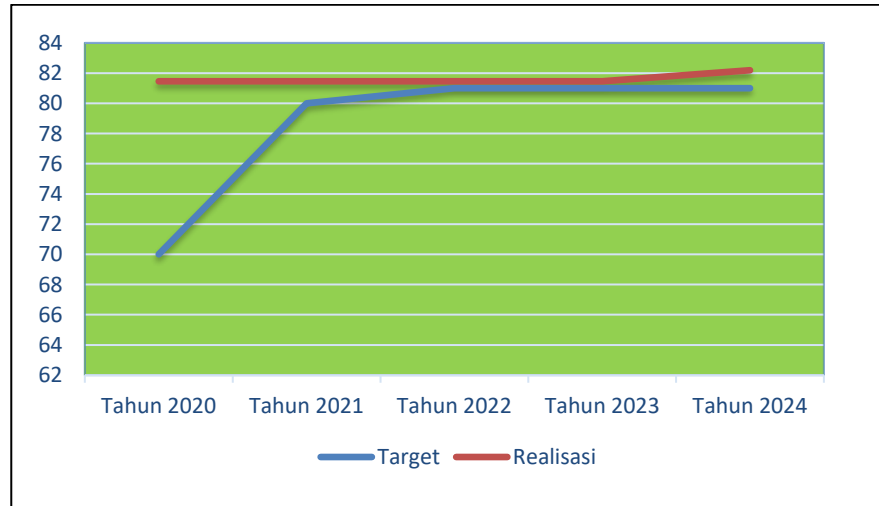
Grafik III.29 terlihat indikator ini terealisasi dengan realisasi sebesar 82,19 lebih tinggi dibanding dengan target sebesar 81. Nilai Kinerja Implementasi WBK BBKK Makassar Tahun 2024 diperoleh dari hasil assessment Tim Itjen pada tanggal 13 Juni 2024 sebagai proses pendampingan BBKK Makassar yang diusulkan sebagai satker berpredikat WBK Nasional.

Grafik III.30 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6
BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023
Dengan Semester I Tahun 2024



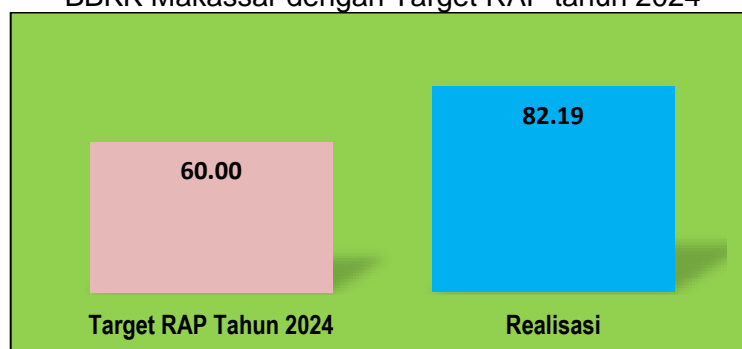
Grafik III.30 menggambarkan bahwa untuk tahun 2020-2024 realisasi indikator berada di atas target yang telah ditentukan. Untuk tahun 2020 implementasi WBK dijadikan sebagai salah satu indikator capaian kinerja, KKP Kelas I Makassar dengan melalui berbagai tahap mulai dari pendampingan, pengawasan, *self assesment*, *pre assessment* sampai ke tahap Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemenkes RI berhasil meraih predikat menuju WBK satker dengan nilai 81,46 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6590/2020. Dari nilai tersebut melampaui target indikator yang ditetapkan. Nilai ini masih dijadikan sebagai dasar penilaian indikator keenam pada tahun 2022. Namun pada tahun 2022 target ditingkatkan sebesar 81, merujuk dari realisasi pada tahun 2021, begitu pula dengan target pada tahun 2023 yang masih sebesar 81 dengan realisasi sebesar 81,46 berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Desk Tim Eselon I Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Pada Tanggal 29 November 2023. Untuk tahun 2024 berlanjut dengan diusulkannya BBKK Makassar menjadi satker berpredikat WBK Nasional. Untuk hal tersebut dibutuhkan pendampingan dari Tim Itjen dan P2P Kemenkes. Pada tanggal 13 Juni 2024 dilaksanakan *assessment* oleh Tim Itjen Kemenkes sehingga memperoleh nilai sebesar 82,19.

Grafik III.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-6 BBKK Makassar



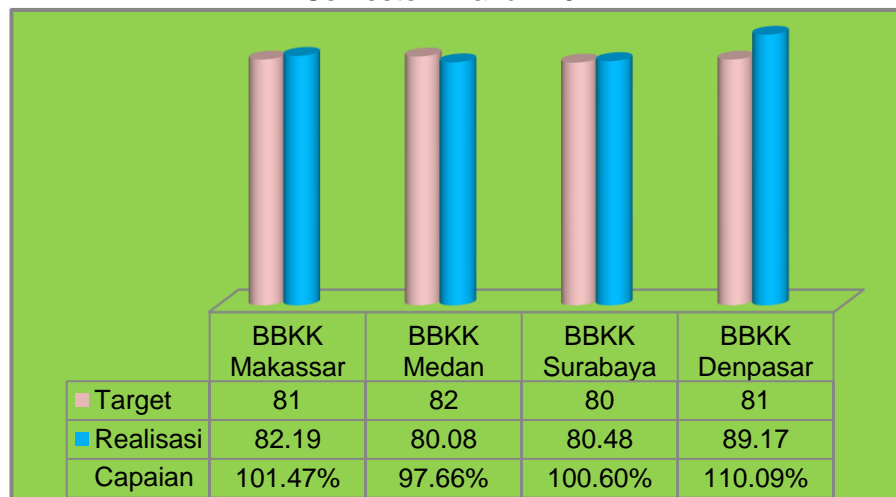
Grafik III.31 tergambar realisasi 82,19 lebih besar dibanding dengan target RAK tahun 2021 sebesar 80. Untuk target tahun 2022 ditetapkan target sebesar 81 karena untuk target minimal bagi satker yang sudah mendapatkan predikat WBK adalah sebesar 80. Tahun 2024 target yang ditetapkan tetap, namun tahun ini BBKK Makassar diusulkan menjadi satker berpredikat WBK Nasional, sehingga dilakukan pendampingan dari Tim Itjen dan P2P Kemenkes. Hasil dari pendampingan oleh Tim Itjen diperoleh nilai assessment sebesar 82,19. Namun tidak berhenti sampai disini, masih ada pendampingan selanjutnya sebelum adanya Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional yang akan memutuskan hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.

Grafik III.32 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 Semester I BBKK Makassar dengan Target RAP tahun 2024



Grafik III.32 menunjukkan realisasi indikator kinerja 6 BBKK Makassar lebih besar dibanding dengan target RAP tahun 2024. Realisasi ini diperoleh dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Hasil Assesment Tim Itjen Kemenkes pada tanggal 13 Juni 2024. Tahun 2024 BBKK Makassar diusulkan sebagai satker berpredikat WBK Nasional, sehingga dilakukan pendampingan dari Tim Itjen maupun Tim P2P.

Grafik III.33 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-6 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya, dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024



Dari grafik III.33 terlihat dari keempat BBKK realisasi terbesar berada di BBKK Denpasar, selanjutnya BBKK Makassar di urutan kedua. BBKK Makassar diusulkan menjadi satker berpredikat WBK Nasional, sehingga adanya pendampingan dari TPI dan TPN. Pada tanggal 13 Juni 2024, BBKK Makassar mendapatkan pendampingan dari Tim Itjen Kemenkes, sehingga memperoleh nilai Assesment sebesar 82,19.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Kontribusi masing-masing kelompok kerja yang telah ditetapkan di dalam SK Kepala BBKK Makassar tentang Pembangunan Zona Integritas
- 2) Keikutsertaan seluruh pegawai, baik itu ASN maupun PPNPN dalam mewujudkan pembangunan zona integritas
- 3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga pembangunan zona integritas dapat berjalan secara berkesinambungan
- 4) Pendampingan dari Tim P2P dan Tim Itjen Kemenkes untuk pembangunan zona integritas
- 5) Dukungan lintas sektor yang sangat antusias dalam mewujudkan zona integritas
- 6) Pembangunan zona integritas kawasan pelabuhan dan bandara yang menjadikan motivasi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas di BBKK Makassar

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Pengembangan inovasi dengan menggunakan sistem IT yang membutuhkan anggaran khusus dalam pengembangan tersebut
- 2) Reviu SOP sebagai regulasi dalam pelaksanaan kegiatan belum dilakukan untuk semua SOP
- 3) Regulasi dari lintas sektor yang berhubungan dengan tugas dan fungsi KKP Kelas I Makassar yang kadang berubah tanpa adanya sosialisasi kepada pengguna jasa.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Perlu dianggarkan terkait pengembangan inovasi dalam mendukung sistem operasional perkantoran serta mendukung pelayanan kepada pengguna jasa BBKK Makassar
- 2) Perlu adanya reviu terhadap seluruh SOP secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada

- 3) Perlu adanya komitmen dan sosialisasi terhadap regulasi yang diterbitkan, sehingga tidak ada benturan terhadap pengguna layanan.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja
 RAKi : Realisasi anggaran kinerja
 NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(106.082.000 \times 1,01) - 72.796.215}{106.082.000 \times 1,01} \times 100\%$$

$$E = 33,62\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{33,623}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 134,06\%$$

Untuk indikator 6 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.082.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.796.215,- serta capaian indikator sebesar 101,47%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 33,62% dan nilai efisiensi sebesar 134,06%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

Adanya pengembangan inovasi aplikasi SIMPELTA, SISKAS, dan LANGSAT DIGITAL serta saluran pengaduan yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan dari BBKK Makassar.

7. INDIKATOR KETUJUH

Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN dalam peningkatan kapasitasnya. Untuk tahun 2023 target untuk persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 80%.

a. Pengertian

Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN yang telah melaksanakan peningkatan kapasitas sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran yang disingkat menjadi JP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun.

b. Definisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun dan dapat dilaksanakan pada tingkat instansi maupun nasional.

c. Rumus (cara perhitungan)

Pengukuran realisasi jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 Jam Pelajaran}}{\text{Jumlah Seluruh ASN KKP Kelas I Makassar}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran capaian indikator ketujuh ini yaitu persentase realisasi jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dibagi dengan persentase target indikator ketujuh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 Jam Pelajaran}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Pada tabel III.30 di bawah ini dijabarkan jumlah ASN BBKK Makassar yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran pada tahun 2024.

Tabel III.30 Jumlah ASN BBKK Makassar yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Jam Pelajaran Semester I Tahun 2024

No	Nama Pegawai	Keterangan
1	AGUS JAMALUDIN, SKM, M.Kes	Terpenuhi
2	NIRWAN, SKM, M.Kes	Terpenuhi
3	Dra. AISYAH SUFRIE, MSc. PH	Terpenuhi
4	dr. MUH. HASKAR HASAN, M.Kes	Terpenuhi
5	H. TUBIANTO ANANG ZULFIKAR, SKM, M.Epid	Terpenuhi
6	HJ. NUR MAGFIRAH, SKM, M.Kes	Terpenuhi
7	ABDUL RAHMAN MUSTAFA, SKM	Terpenuhi
8	KARYADI EKA PUTRA, SKM	Terpenuhi
9	dr. MARSELINA SILI PAPU, MPH	Terpenuhi
10	dr. WAHJU VIVA IRIANAWATI	Terpenuhi
11	EGO, SKM, M.Kes	Terpenuhi
12	H. ANDI ALI RESA, SKM, M.Kes	Terpenuhi

No	Nama Pegawai	Keterangan
13	HASTAWAVIA, SKM	Terpenuhi
14	dr. RIDHA ILAHI	Terpenuhi
15	dr. HJ. JUNIARTY NAIM	Terpenuhi
16	drg. ARIFA SETIANI THAMRIN, M.Kes	Terpenuhi
17	dr. HJ. TRI HANDAYANI NAIM	Terpenuhi
18	dr. HJ. RINI ASTUTY	Terpenuhi
19	dr. NURLAILAH MUHYIDDIN	Terpenuhi
20	Drs. S E R D I, SKM	Terpenuhi
21	IBRAHIM, SKM, M.Kes	Terpenuhi
22	SITTI RAHMATIA, SKM	Terpenuhi
23	YUSFANDIAR	Terpenuhi
24	ABD. GANI BUATAN, SKM	Terpenuhi
25	dr. H. ABBAS ZAVEY NURDIN , Sp.Ok, MKK	Terpenuhi
26	HJ. MURDIYANINGSIH, S.Si	Terpenuhi
27	PURNIMAH RAZAK, S.H	Terpenuhi
28	ARNI ANGRANY AMIR, ST	Terpenuhi
29	HJ. ANDI TANRI ABENG, SKM	Terpenuhi
30	PATMAWATY, SE	Terpenuhi
31	MARDIYANA, SKM, M.Adm.Kes	Terpenuhi
32	MARYAM, S. Kep, Ns	Terpenuhi
33	H. IMRAN, SH	Terpenuhi
34	HAKIM, S.Sos	Terpenuhi
35	HJ. ZAINAB, AMK	Terpenuhi
36	dr. HJ. FITRIAH	Terpenuhi
37	SYAHRIANTI SAID, S.ST	Terpenuhi
38	HJ. SITTI HAMDIA, SKM., M.Kes	Terpenuhi
39	FAISAL, S. Kep ,Ners	Terpenuhi
40	SYAHRUL, ST	Terpenuhi
41	H. ARHAM ALAM, S.Kep, Ners, M.KKK	Terpenuhi
42	dr. ANDI NUR ALAM. KS	Terpenuhi
43	dr. HJ JUMARNI	Terpenuhi
44	HJ. DELIA ROSIDAH, SKM, M.Kes	Terpenuhi
45	HJ. SATRIANI, SKM	Terpenuhi
46	dr. WAHYUDI	Terpenuhi
47	ANDI KUDRAT, SKM	Terpenuhi
48	dr. RUSLAN	Terpenuhi
49	dr. HJ. SRI APRIANITA	Terpenuhi
50	dr. NAJRIAH NASIR	Terpenuhi
51	WALUYO, SKM	Terpenuhi

No	Nama Pegawai	Keterangan
52	dr. ANDI PERTIWIKUSUMA	Terpenuhi
53	HELPI SOPIAN MOKODOMPIT, SKM	Terpenuhi
54	MUHAMMAD HUSAIFAH, SAP, M.A.P	Terpenuhi
55	H. ABD. RAUF, AMK	Terpenuhi
56	RIZAL, SKM	Terpenuhi
57	HJ. MASRIANI, S.Kep, Ns	Terpenuhi
58	NURDIANSAH SAHRIR, SKM	Terpenuhi
59	H. RIDWAN, SKM	Terpenuhi
60	HJ. DIANA ABDULLAH, S.Kep, Ns	Terpenuhi
61	NASIRUDDIN, AMd.KL	Terpenuhi
62	NINING AYU PURNAMA, S.Kom	Terpenuhi
63	MIRNAWATY, S.ST	Terpenuhi
64	SYAFRUDDIN, S.Kep, Ns	Terpenuhi
65	H.MAHLI SUNUSI, SKM	Terpenuhi
66	HJ. FATMAWATI SALIM, SKM	Terpenuhi
67	YURIS ARTHA ROMBE ADA, S.K.M	Terpenuhi
68	H. RAJIMAN, AMd.KL	Terpenuhi
69	HASANUDDIN, AMd.Kep	Terpenuhi
70	HJ. NURHAYATI M, SKM	Terpenuhi
71	GERARDHA SUMALU, S.Kep	Terpenuhi
72	YULIANA SIRAJUDDIN, AMAK	Terpenuhi
73	YUSRAN, S.Kom	Terpenuhi
74	ARWIN AMIN, AMd.Kom	Terpenuhi
75	IRHAM, SKM	Terpenuhi
76	NURHASNI, SKM	Terpenuhi
77	ARFIANI, SKM	Terpenuhi
78	NURHAYATI HL, SKM	Terpenuhi
79	YONITHA PALIMBUNGA, AMd.Kep	Terpenuhi
80	MUSDALIFA M, AMKL	Terpenuhi
81	SUARNI S, AMK	Terpenuhi
82	HILDA ADRIATI MALIK, SKM	Terpenuhi
83	AMRIANA AMIN, SE	Terpenuhi
84	H. AMIR, AMK	Terpenuhi
85	H. WAHYUDI HIDAYAT, S.Kep, Ners	Terpenuhi
86	HJ. MUTHMAINNAH, AMK	Terpenuhi
87	RINA VIRGIANA THAMRIN, S.Tr.KL	Terpenuhi
88	RISKA, AMAK	Terpenuhi
89	DIAN PURNITA, SKM	Terpenuhi
90	KAIMUDDIN, S.Tr.KL	Terpenuhi

No	Nama Pegawai	Keterangan
91	HJ. FITRIANI JAYA, S.Kep, Ners	Terpenuhi
92	H. CHANDRA WAHYUDDIN, AMK	Terpenuhi
93	MARIA VERONIKA AMBABUNGA, SKM	Terpenuhi
94	HARMAWAN, AMd.KL	Terpenuhi
95	ANUGRAYANTI, S.Tr.KL	Terpenuhi
96	NASRULLAH, A.Md.Kep	Terpenuhi
97	NUR SAID RAIS, A.Md KL	Terpenuhi
98	FATIMAHSARI, S.Tr.Kes	Terpenuhi
99	RENY MARLINA, AMd.Kep	Terpenuhi
100	HARINA, A.Md.KL	Terpenuhi
101	NURSAKTI SAPUTRA, A.Md.KL	Terpenuhi
102	ASTRI EKA WARDANI, AMd.Kep	Terpenuhi
103	DESI MARLINA, A.Md.KL	Terpenuhi
104	FATHUL JANNAH, AMd.Kep	Terpenuhi
105	LUKAS TANDI PAYUNG	Terpenuhi
106	HAMKA	Terpenuhi
107	SAYDATURRIZKY, AMd.Ak	Terpenuhi
108	SYAMSURI, AMd. Kep	Terpenuhi
109	ASRI, AMK	Terpenuhi
110	ILHAM, AMK	Terpenuhi
111	ISMMAINAR, AMK	Terpenuhi
112	RISMA TANGNGA GULING, AMK	Terpenuhi
113	SRI WAHZUNI, AMK	Terpenuhi
114	SUHERMAN, AMK	Terpenuhi
115	ZULVITA AYSAH, AMd.KL	Terpenuhi
116	ADIL NIRWANDI	Terpenuhi
117	SRI WULANDARI	Terpenuhi
118	HIDAYANI SUTARDI	Terpenuhi
119	MIRNA	Terpenuhi
120	AHMAD RUSIDANI	Terpenuhi
121	AULIA MAGHFIRAH	Terpenuhi
Total Jam Pelajaran		Terpenuhi

Dengan memperhatikan pengukuran kinerja indikator ketujuh pada tabel III.30 di atas, diketahui bahwa jumlah ASN BBKK Makassar pada tahun 2024 adalah sebanyak 132 orang dan jumlah ASN yang telah ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) JP adalah sebanyak 121 orang. Dengan demikian persentase capaian indikator

ketujuh dituangkan pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 Jam Pelajaran}}{\text{Jumlah Seluruh ASN KKP Kelas I Makassar}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Realisasi} = \frac{132}{132} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Realisasi} = 100\%$$

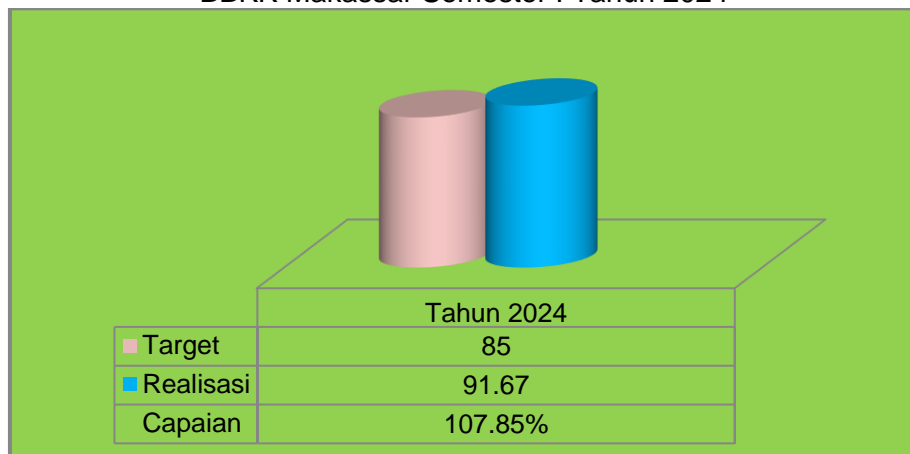
Setelah diperoleh hasil persentase dari pengukuran di atas, dapat diperoleh persentase capaian indikator ketujuh ini, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Sebanyak Paling Sedikit 20 Jam Pelajaran}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{91,67\%}{85\%} \times 100\%$$

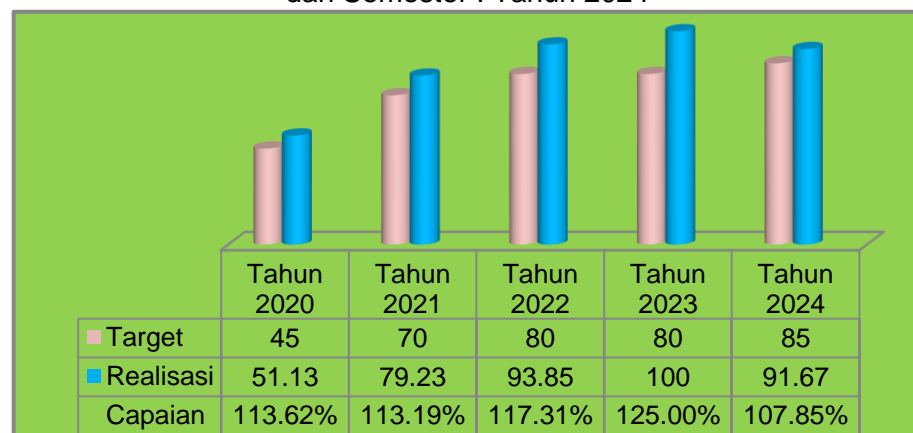
$$\text{Capaian} = 107,85\%$$

Grafik III.34 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar Semester I Tahun 2024



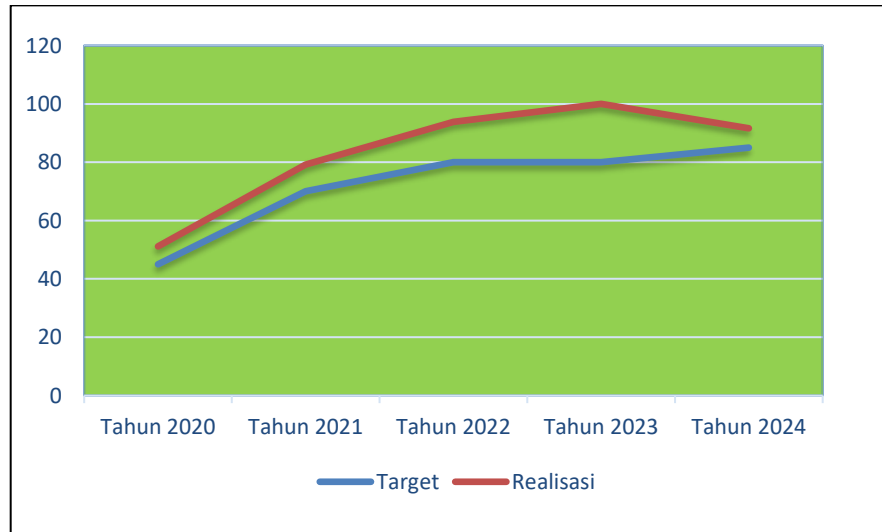
Dari grafik III.34 terlihat realisasi lebih besar dari target indikator kinerja yang telah ditentukan. Peningkatan kapasitas pada tahun 2024 dilakukan dengan cara tatap muka dan dalam jaringan (daring). Informasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sangat mudah diperoleh dan fleksibel untuk diikuti. Peningkatan kapasitas dengan daring masih menjadi keuntungan yang maksimal bagi ASN karena tanpa biaya pelaksanaan, kegiatan tersebut dapat diikuti. Untuk realisasi pada Semester I tahun 2024, realisasi masih sebesar 91,67%, diharapkan akhir tahun 2024 realisasi mencapai 100% karena diharapkan seluruh ASN BBKK Makassar telah mengikuti peningkatan kapasitas sebesar 20 JPL dalam 1 tahun.

Grafik III.35 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan Semester I Tahun 2024



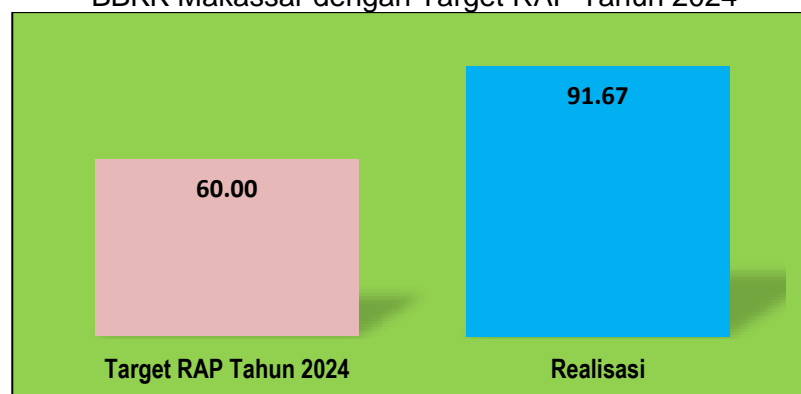
Peningkatan kapasitas ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) JP sejak tahun 2020 telah menjadi salah satu indikator dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar. Dari grafik III.35, terlihat penetapan target meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan meningkat menjadi 80%, dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 125%. Sehingga untuk penetapan target tahun 2024 ditingkatkan menjadi 85% merupakan hasil evaluasi realisasi pada tahun 2023.

Grafik III.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024) Indikator Ke-7 BBKK Makassar



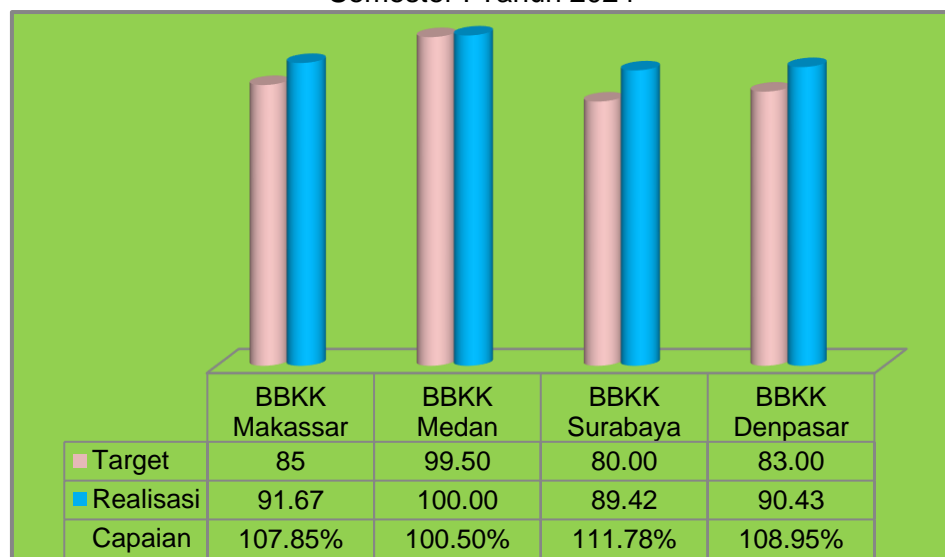
Grafik III.36 tergambar realisasi indikator ini sebesar 91,67% lebih besar dibanding dengan target RAK tahun 2022 dan 2023 sebesar 80%. Untuk penetapan target RAK pada tahun 2024, BBKK Makassar mengevaluasi realisasi di tahun 2020 sd 2023 yang secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga target untuk tahun 2024 dinaikkan menjadi 85. Namun untuk Semester I sudah melampaui target, sehingga diharapkan akhir tahun 2024 seluruh pegawai BBKK Makassar telah mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL.

Grafik III.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Indikator Ke-7 BBKK Makassar dengan Target RAP Tahun 2024



Dari grafik III.37 menunjukkan capaian kinerja indikator 7 BBKK Makassar lebih besar dibanding dengan target RAP tahun 2024. Peningkatan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) JP bagi setiap ASN merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4), bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun.

Grafik III.38 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-7 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024



Berdasarkan Grafik III.38 terlihat bahwa ke 4 BKK terealisasi di atas target yang telah ditetapkan. BBKK Surabaya dengan capaian paling besar dan yang terkecil BBKK Medan. Walaupun masih Semester I, namun peningkatan kapasitas ASN sudah mulai banyak terlaksana karena peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara daring tanpa menggunakan anggaran, sehingga realisasi tercapainya kegiatan ini sangat maksimal.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Anggaran yang tersedia baik di substansi teknis maupun dukungan manajemen untuk peningkatan kapasitas ASN sangat mendukung;
- 2) Informasi yang diperoleh terkait peningkatan kapasitas sangat mudah didapatkan, baik melalui undangan secara *online*, via email kantor, WA grup sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN;
- 3) ASN KKP Kelas I Makassar sebagian besar adalah pejabat fungsional tertentu sehingga membutuhkan angka kredit dalam peningkatan kompetensi.
- 4) Peningkatan kapasitas ASN mendukung tercapainya target Perjanjian Kinerja Kepala Kantor dengan Pejabat Eselon I.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Peningkatan kapasitas ASN via online mempunyai kelemahan karena peserta Webinar yang cukup banyak, dengan keterbatasan jaringan sehingga kadang materi yang disampaikan kurang maksimal dipahami oleh peserta Webinar
- 2) Distribusi ASN dalam peningkatan kapasitas belum merata.
- 3) Peningkatan kapasitas ASN kebanyakan dari bagian teknis, sehingga kadang peningkatan kapasitas yang diikuti tidak relevan dengan kompetensi ASN tersebut

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Peningkatan kapasitas ASN secara online dapat dibuat secara bergelombang, sehingga optimalisasi pelaksanaan peningkatan kapasitas via online dapat lebih maksimal;
- 2) Usulan peningkatan kapasitas ASN substansi harus dibuat secara berkala dan dibuatkan TNA, sehingga peningkatan kapasitas dapat merata untuk setiap ASN.
- 3) Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas ASN terkait kompetensi jabatan masing-masing ASN.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran kinerja

CKi : Capaian kinerja

RAKi : Realisasi anggaran kinerja

NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(448.497.000 \times 1,08) - 44.872.699}{448.497.000 \times 1,06} \times 100\%$$

$$E = 90,72\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{90,72}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 276,81\%$$

Untuk indikator 7 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 448.497.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.872.699,- serta capaian indikator sebesar 106,06%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 90,57%, sehingga nilai efisiensinya 276,42%. Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara daring, tanpa membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan.

8. Indikator Kedelapan

Persentase Realisasi Anggaran

Target Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96%.

a. Pengertian

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

b. Definisi Operasional

Jumlah realisasi anggaran belanja yang digunakan BBKK Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Tahun 2023.

Persentase realisasi anggaran BBKK Makassar Tahun 2024 diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan RI.

c. Rumus (cara perhitungan)

Pengukuran persentase realisasi anggaran dihitung berdasarkan jumlah realisasi anggaran belanja dibagi dengan jumlah keseluruhan pagu anggaran dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran capaian indikator kedelapan ini yaitu persentase realisasi anggaran dibagi dengan persentase target indikator kedelapan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

Pada pengukuran kinerja indikator kedelapan, Persentase Realisasi Anggaran diambil dari Aplikasi OM SPAN Kemenkeu RI, sebagaimana dalam *screenshot* gambar III.3 di bawah ini :

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL	
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER			
1	024-416145	BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	136	PAGU	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,367,500,000
				REALISASI	10,371,431,862	4,650,606,349	294,380,315	0	0	0	0	0	0	0	15,316,418,526	
				PERSENTASE	(51.83%)	(46.26%)	(96.47%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(50.44%)	
				SISA	9,638,581,138	5,401,730,651	10,769,685	0	0	0	0	0	0	0	15,051,081,474	
TOTAL					PAGU	20,010,013,000	10,052,337,000	305,150,000	0	0	0	0	0	0	30,367,500,000	
					REALISASI	10,371,431,862	4,650,606,349	294,380,315	0	0	0	0	0	0	15,316,418,526	
					PERSENTASE	(51.83%)	(46.26%)	(96.47%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(50.44%)	
					SISA	9,638,581,138	5,401,730,651	10,769,685	0	0	0	0	0	0	15,051,081,474	

Gambar III.3 Screenshot Persentase Realisasi Anggaran BBKK Makassar

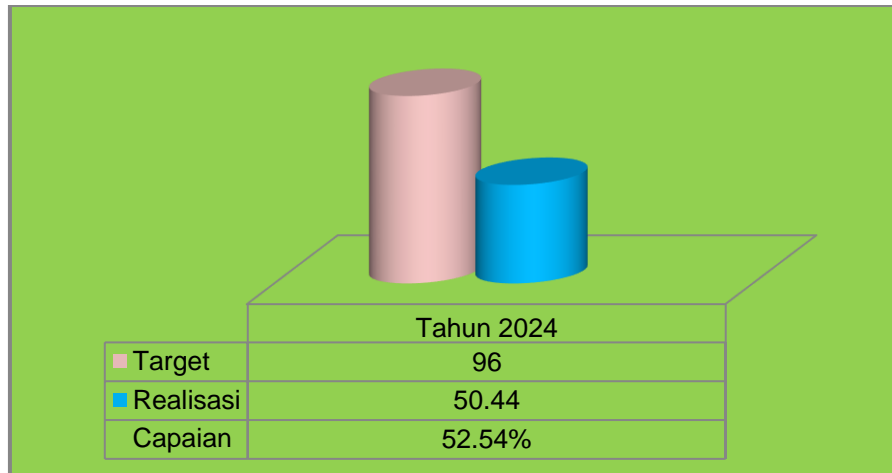
Berdasarkan gambar III.3 di atas, realisasi anggaran BBKK Makassar Semester I tahun 2024 sebesar 50,44%, dengan persentase capaian indikator pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Persentase Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{50,44\%}{96\%} \times 100\%$$

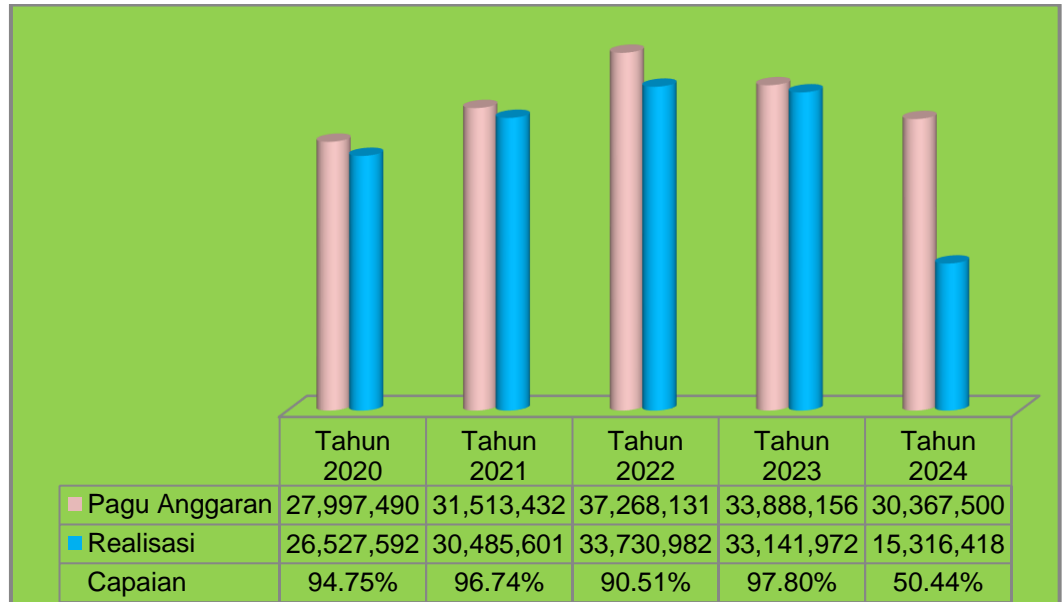
$$\text{Capaian} = 52,54\%$$

Grafik III.39 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Ke-8
BBKK Makassar Semester I Tahun 2024



Dari grafik III.39 terlihat realisasi belum tercapai dari target indikator kinerja yang telah ditentukan. Realisasi anggaran 50,44% dengan target sebesar 96%, sehingga dapat dilihat untuk realisasi per Semester I Tahun 2024 sudah mencapai target Semester di tahun 2024. Kegiatan masih berproses sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan dan juga kolaborasi yang kompak dengan lintas sector dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang terdapat dalam RKA-K/L tahun 2024, sehingga diharapkan di Tahun 2024 realisasi akan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Grafik III.40 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Pagu Anggaran BBKK Makassar tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan Semeseter I Tahun 2024



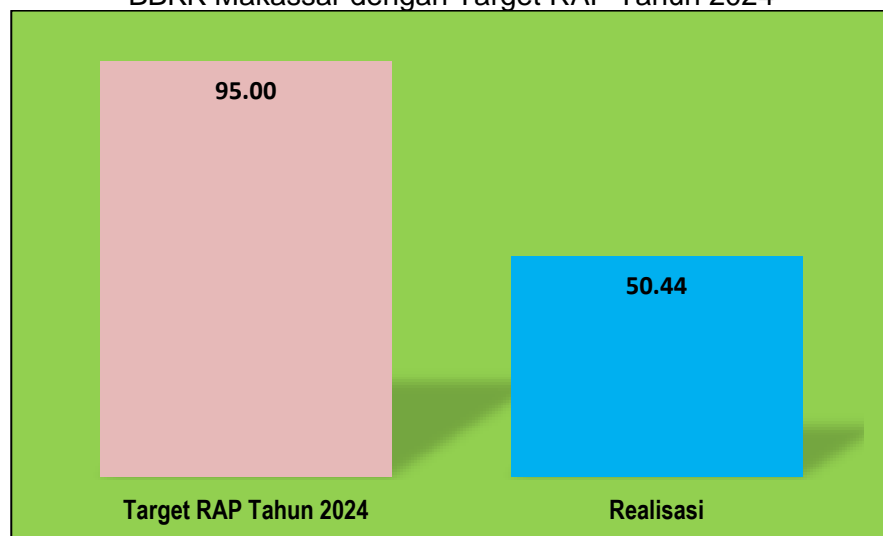
Dari grafik III.40 dapat dilihat realisasi anggaran pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 secara keseluruhan berada di atas 90%. Indikator persentase realisasi anggaran baru pada tahun 2023 dijadikan sebagai indikator dalam Perjanjian Kinerja. Sehingga untuk perbandingan persentase, KKP Kelas I Makassar menggunakan perbandingan realisasi terhadap pagu anggaran per tahunnya. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2023, namun untuk realisasi terbesar di tahun 2022 karena jumlah pagu anggaran terbesar pada tahun tersebut. Untuk Semester I tahun 2024 realisasi anggaran sudah di atas 50%, diharapkan dengan kegiatan yang masih berproses maka realisasi anggaran dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Grafik III.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2023-2024) Indikator Ke-8 BBKK Makassar



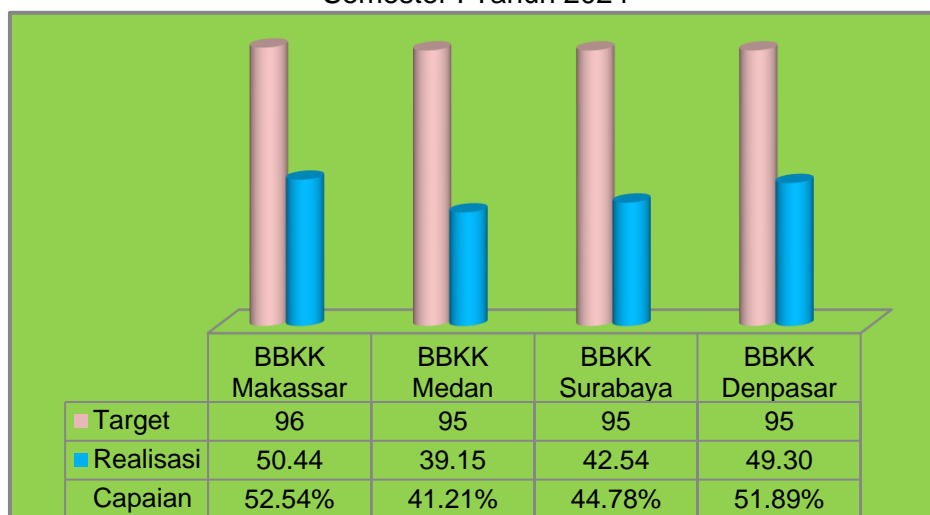
Grafik III.41 tergambar realisasi indikator ini sebesar 50,44% lebih kecil dibanding dengan target RAK tahun 2024 sebesar 96%. Hal ini karena untuk realisasi masih pada Semester I, sehingga realisasi masih berproses sampai akhir tahun 2024.

Grafik III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Indikator Ke-8 BBKK Makassar dengan Target RAP Tahun 2024



Dari grafik III.42 menunjukkan realisas kinerja indikator 8 BBKK Makassar lebih kecil dibanding dengan target RAP tahun 2024. Karena masih perhitungan sampai Semester I untuk realisasi kinerja indicator. Diharapkan akhir tahun 2024 realisasi dapat melebihi target RAP di Tahun 2024.

Grafik III.43 Perbandingan Realisasi Indikator Ke-8 BBKK Makassar dengan BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Denpasar Semester I Tahun 2024



Berdasarkan Grafik III.43 terlihat bahwa untuk Semester I Tahun 2024 dari ke 4 BKK terealisasi di atas 50% hanya di BBKK Makassar. Untuk BBKK Medan, Surabaya, dan Denpasar di bawah 50%, dan yang terceil berada di BBKK Medan sebesar 39,15%. Namun secara keseluruhan Amanah Perjanjian Kinerja antara Eselon I dengan Eselon II (Kepala BKK) diharapkan sudah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan di akhir tahun 2024.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dukungan anggaran yang tersedia baik di substansi teknis maupun dukungan manajemen untuk pelaksanaan kegiatan;

- 2) Dukungan lintas sektor dan lintas program yaitu Dinkes Prov., Kota/Kab., PT. Angkasa Pura I, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Bandara, Kesyahbandaran, KSOP, maskapai penerbangan, agen kapal dan travel dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.
 - 3) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPD
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Untuk pertanggungjawaban kegiatan yang berada di Wilker/Pos BBKK Makassar membutuhkan waktu untuk mengirimkan bukti fisik kegiatan sehingga proses pembuatan SPM kadang terkendala.
 - 2) Terdapat komponen Belanja SBK (Konsumsi Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandara dan Pelabuhan Penyeberangan) yang tidak dapat dicairkan karena sesuai arahan Itjen pemeberian konsumsi dapat dicairkan apabila melibatkan Eselon I berbeda termmasuk SBK.
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Dengan membuat inovasi D'Tawang (Dokumen Partanggungjawaban Keuangan), sehingga memberikan kemudahan kepada Wilker/Pos yang jaraknya jauh dari kantor Induk untuk mengupload data dukung kegiatan untuk diverifikasi, sehingga proses pembuatan SPM dapat berjalan;
 - 2) Melakukan revisi anggaran.
- h. Analisis Efisiensi Sumber Daya
- Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja dikurang realisasi anggaran kinerja dibagi dengan perkalian pagu anggaran kinerja dengan capaian kinerja.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran kinerja
 CKi : Capaian kinerja
 RAKi : Realisasi anggaran kinerja
 NE : Nilai efisiensi

$$E = \frac{(30.367.500.000 \times 0,53) - 15.316.421.749}{30.367.500.000 \times 0,53} \times 100\%$$

$$E = 4\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{4}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 60,01\%$$

Untuk indikator 8 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.367.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.316.421.749,- serta capaian indikator sebesar 52,54%, sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4%, sehingga nilai efisiensinya 60,01%.

Selain itu efisiensi penggunaan sumber daya juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu :

- 1) Terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara parallel, sehingga terdapat efisiensi anggaran.
- 2) Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara daring, tanpa membutuhkan anggaran biaya pelaksanaan dan biaya perjalanan dinas.
- 3) Terdapat sarana dan prasarana pendukung yang membantu dalam pengawasan pelaku perjalanan.
- 4) Penerapan aplikasi online dalam penerbitan dokumen kesehatan, sehingga mempersingkat waktu dan menyederhanakan alur pelayanan.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi Anggaran berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam tabel III.31 di bawah ini.

Tabel III.31 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Semester I Tahun 2024

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Rupiah Murni (RM)	28.722.223.000	14.668.675.107	51,07
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.645.277.000	647.761.419	39,37
	Total	30.367.500.000	15.316.418.526	50,44

2. Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel III.32 di bawah ini.

Tabel III.32 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Semester I Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	20.010.013.000	10.371.431.862	50,44
2	Belanja Barang	10.052.337.000	4.650.606.349	46,26
3	Belanja Modal	305.150.000	294.380.315	96,47
	Total	30.367.500.000	15.316.418.526	50,44

3. Berdasarkan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dapat dilihat dalam tabel III.33

Tabel III.33 Realisasi Anggaran berdasarkan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
dan Rincian Output (RO) Kegiatan
Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar
Semester I Tahun 2024

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
BBKK Makassar				30,367,500,000	15,316,421,749	50.44 %
DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			3,795,894,000	1,740,359,085	45.85 %
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah			3,795,894,000	1,740,359,085	45.85 %
PEA	Koordinasi	8	kegiatan	153,048,000	66,241,195	43.28 %
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS)	8	kegiatan	153,048,000	66,241,195	43.28 %
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	32705	Orang, Akta, Keping, Bidang	1,397,545,000	741,519,060	53.06 %
QAA.011	Pelayanan kesehatan haji (HS)	31864	Orang	1,338,605,000	724,026,080	54.09 %
QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS)	841	Orang	58,940,000	17,492,980	29.68 %
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1382	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1,681,302,000	642,596,251	38.22 %
QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS)	18	layanan	158,690,000	55,808,291	35.17 %
QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	17	layanan	288,156,000	90,744,760	31.49 %
QAH.U01	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS)	240	layanan	158,400,000	50,320,000	31.77 %
QAH.U02	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS)	240	layanan	211,200,000	81,260,000	38.48 %
QAH.U07	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)	88	layanan	105,952,000	62,531,200	59.02 %
QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS)	112	layanan	316,400,000	92,490,000	29.23 %

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (HS)	56	layanan	26,824,000	8,110,000	30.23 %
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	310	layanan	111,600,000	54,230,000	48.59 %
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	40	layanan	68,800,000	26,010,000	37.81 %
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	152	layanan	54,720,000	31,790,000	58.10 %
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	35	layanan	45,990,000	31,515,000	68.53 %
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	14	layanan	76,370,000	38,920,000	50.96 %
QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	60	layanan	58,200,000	18,867,000	32.42 %
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	20	Paket, Unit	413,972,000	259,688,180	62.73 %
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS)	20	Paket	413,972,000	259,688,180	62.73 %
TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	21	Orang, Layanan, Rekomendasi	150,027,000	30,314,399	20.21 %
TBC.001	Pelatihan kesehatan (HS)	21	Orang	150,027,000	30,314,399	20.21 %
WA	Program Dukungan Manajemen			26,571,606,000	13,576,062,664	51.09 %
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			26,571,606,000	13,576,062,664	51.09 %
AEA	Koordinasi	6	kegiatan	71,960,000	25,609,985	35.59 %
AEA.501	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program	1	kegiatan	21,511,000	0	0.00 %
AEA.502	Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	1	kegiatan	10,294,000	10,223,600	99.32 %
AEA.503	Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	1	kegiatan	30,040,000	6,630,700	22.07 %

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
AEA.504	Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	1	kegiatan	8,615,000	8,605,685	99.89 %
AEA.505	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	2	kegiatan	1,500,000	150,000	10.00 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	25,427,426,000	13,206,776,802	51.94 %
EBA.956	Layanan BMN	4	Layanan	41,931,000	18,655,400	44.49 %
EBA.957	Layanan Hukum	2	Layanan	13,328,000	5,727,354	42.97 %
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	Layanan	29,379,000	12,656,800	43.08 %
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	83,334,000	66,354,861	79.63 %
EBA.962	Layanan Umum	2	Layanan	66,860,000	35,425,102	52.98 %
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	20,520,000	20,506,080	99.93 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan	25,172,074,000	13,047,451,205	51.83 %
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Unit, m2, Paket	131,000,000	120,239,915	91.79 %
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	131,000,000	120,239,915	91.79 %
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200	Orang, Layanan, Rekomendasi	298,470,000	14,558,300	4.88 %
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	130	Orang	176,000,000	14,558,300	8.27 %
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	70	Orang	122,470,000	0	0.00 %
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	59	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	642,750,000	208,877,662	32.50 %
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13	Dokumen	207,776,000	45,125,353	21.72 %
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24	Dokumen	196,300,000	97,685,305	49.76 %
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	19	Dokumen	224,664,000	66,067,004	29.41 %
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3	Dokumen	14,010,000	0	0.00 %

4. Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar

Realisasi anggaran berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja BBKK Makassar Semester I Tahun 2024.

Tabel III.34 Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Balai Besar Kekeparantinaan Kesehatan Makassar Semester I Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1	1	100	2.157.939.000	985.234.846	45,66
		2. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100%	100%	100	502.410.000	231.325.000	46,04
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96	0,88	91,67	571.546.000	233.796.660	40,91
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85	49,58	58,33	359.202.000	140.616.503	39,15
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan ananggaran	90	95,64	106,27	26.056.666.000	13.574.141.686	52,09
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	81	82,19	101,47	108.082.000	72.796.215	67,35
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	91,67%	107,85	448.497.000	44.872.699	10,01
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%	50,44%	52,54	30.367.5900.000	15.316.421.749	50,44

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja berdasarkan Target kinerja BBKK Makassar tahun 2024 yang tertulis di dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Dirjen P2P dengan Kepala KKP Kelas I Makassar, dapat disimpulkan :

1. Terdapat 8 indikator dalam Perjanjian Kinerja BBKK Makassar tahun 2024, meliputi :
 - a. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara dengan target 1 realisasi 1;
 - b. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 100% realisasi 100%;
 - c. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan target 0,96 realisasi 0,88;
 - d. Nilai kinerja anggaran dengan target 85 realisasi 48,59;
 - e. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan target 90 realisasi 95,64;
 - f. Kinerja implementasi WBK Satker dengan target 81 realisasi 82,19;
 - g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan target 85% realisasi 91,67%, dan;
 - h. Persentase realisasi anggaran dengan target 96% realisasi 50,44%

Secara keseluruhan terdapat 5 indikator yang mencapai target dan 3 indikator yang tidak mencapai target. Namun ketiga indikator yang belum tercapai semua masih berproses pada Semester berikutnya.
2. Selama kurun waktu tiga tahun yaitu 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 BBKK Makassar memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar :
 - a. Tahun 2020 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 113,32%;
 - b. Tahun 2021 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109,67%;
 - c. Tahun 2022 dengan rata-rata capaian sebesar 101,69%;
 - d. Tahun 2023 dengan rata-rata capaian sebesar 104,19%.
 - e. Semester I Tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 102,42%.

Rata-rata capaian kinerja paling rendah di tahun 2022 sebesar 101,69% dan tertinggi di Tahun 2020 sebesar 113,32%.

3. Perbandingan rata-rata capaian kinerja Semester I tahun 2024 dengan BKK dengan klasifikasi yang sama yaitu BBKK Medan, BBKK Surabaya dan BBKK Denpasar sebesar :
 - a. BBKK Makassar sebesar 102,42%;
 - b. BBKK Medan sebesar 87,64%;
 - c. BBKK Surabaya sebesar 78,35%;
 - d. BBKK Denpasar sebesar 85,24%.

Rata-rata capaian kinerja paling rendah berada di BBKK Surabaya dan yang paling tinggi adalah capaian kinerja BBKK Makassar.

4. Peran sumber daya dalam mewujudkan realisasi kinerja sangatlah penting, dalam menganalisis efisiensi sumber daya diperoleh nilai efisiensi untuk setiap indikator yaitu :
 - a. indikator 1 sebesar 54,34%;
 - b. indikator 2 sebesar 53,96%;
 - c. indikator 3 sebesar 55,38%;
 - d. indikator 4 sebesar 31,51%;
 - e. indikator 5 sebesar 50,98%;
 - f. indikator 6 sebesar 33,62%;
 - g. indikator 7 sebesar 90,72%;
 - h. indicator 8 sebesar 4%.

Nilai efisiensi sumber daya terbesar terdapat pada indikator 7 sebesar 90,72% hal ini dipengaruhi oleh realisasi anggaran yang lebih kecil dari anggaran yang disediakan, sehingga capaian indikator bernilai 107,85%.

5. Anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator BBKK Makassar untuk Semester I tahun 2024 sebesar Rp. 15.316.421.749,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 30.367.500.000,-, sehingga realisasi menjadi 50,44%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan capaian kinerja BBKK Makassar di tahun berikutnya, terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan :

1. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Memberikan rekomendasi terhadap *lokus* yang pemeriksaan sampel airnya tidak memenuhi standar yang berlaku.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkala dengan membangun komunikasi yang lebih intens dengan Kementerian Keuangan di Wilayah.

PUSTAKA ACUAN

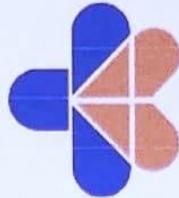
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia** Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan
- Peraturan MENPAN-RB RI** Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia** Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
- Rencana Strategis (Renstra)** Kemenkes Tahun 2020-2024
- Rencana Aksi Program (RAP)** Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024
- Rencana Aksi Kegiatan (RAK)** BBKK Makassar Tahun 2020-2024, BBKK Makassar Revisi ke-5 Maret 2024
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** BBKK Makassar tahun anggaran 2024
- Daftar Urut Kepangkatan (DUK)** BBKK Makassar, Juni tahun 2024
- Laporan Kinerja** KKP Kelas I Makassar, KKP Kelas I Makassar tahun 2023
- Laporan Keuangan** BBKK Makassar Semester I tahun 2024

PENYUSUN

Pengarah : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar
Penanggung Jawab : Kasubag Adum
Ketua : Arni Angriany Amir, ST
Anggota : Andi Kudrat, SKM
Nining Ayu Purnama, S.Kom
Arfiani, SKM
Yonitha Palimbunga, AMd.Kep
Amriana Amin, SE
Saydaturrizky, AMd.Ak

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 33.888.156.000, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

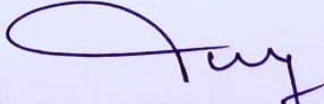
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003


Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR**


NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1
		2	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai Kinerja Anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja Implementasi WBK Satker	81
		7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	80%
		8	Persentase Realisasi Anggaran	95%


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp.	8.222.987.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp.	25.665.169.000
	TOTAL	Rp. 33.888.156.000

Jakarta, Desember 2023

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar


Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003


Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

Perjanjian Kinerja Revisi Januari Tahun 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



**Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu,
DHSM, MARS**

Jakarta, 30-01-2024

Pihak Pertama

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (08)		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	40 Persen
I	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1,00 Indeks
		Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	100 Persen
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96 Indeks
B	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	98 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Persen
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2024
1	2	3	4
1	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	85 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	81 Nilai
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	85 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95 Persen

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekearifantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3,795,894,000.00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	26,571,606,000.00
TOTAL			30,367,500,000.00

Pihak Kedua



**Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu,
DHSM, MARS**

Jakarta, 30-01-2024

Pihak Pertama

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes

SK Tim Pengelola SAKIP



Kementerian Kesehatan

BBKK Makassar

Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros
Sulawesi Selatan 90552

(0411) 4834926

<https://bbkkmakassar.com>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

NOMOR : HK.02.03/C.IX.3/0743/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

- Menimbang:
- bahwa dalam upaya peningkatan tugas dan fungsi pada Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
 - bahwa untuk tercapainya point 1 tersebut di atas, salah satunya melalui peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
- Mengingat:
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar adalah :
- a. Melakukan koordinasi untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan reuiu atas laporan kinerja;
 - c. Melakukan inventarisasi data dukung yang diperlukan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 16 Februari 2024
Kepala Balai Besar Kekeantinaan
Kesehatan Makassar,



Agus Jamaludin

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>. Atau laporkan ke layanan pengaduan BBKK Makassar, Email kkpmakassar@yahoo.co.id, Telp (0411) 4834926, 4834215, WA 085256044660

Lampiran :
Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Makassar Tentang Tim Pengelola
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Nomor : HK.02.03/C.IX.3/0743/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

**TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

Pengarah : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
Ketua : Arni Angriany Amir, ST
Sekretaris : Nining Ayu Purnama, S.Kom
Anggota : Andi Kudrat, SKM
Arfiani, SKM
Yonitha Palimbunga, AMd.Kep
Amriana Amin, SE
Saydaturrizky, AMd.Ak

Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Makassar,



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

SOP Pengumpulan Data Kinerja

 KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0403/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 14 November 2018
	REVISI	: Ke-3
	TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024
DISAHKAN OLEH		 Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 196908221993031005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. IHR Tahun 2005 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	1. Umum, minimal SLTA sederajat 2. Memahami Tata Administrasi Arsip	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengarsipan Dokumen	1. Alat Tulis Kantor 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Komputer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Buku Penomoran Surat; 2. Lembar Disposisi, dll	

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KASUBAG ADUM	KETUA TIM KERJA	PERENCANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan pengumpulan data kinerja	○	□			SK Tim Penyusun Lakip, Surat dan Disposisi	1 hari	Disposisi	
2	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum				□			Format Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja	
3	Mengisi form kinerja masing-masing Timker dan Subag Adum			□		Format Pengumpulan Data dan informasi Kinerja	3 hari	Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing Timker dan Subag Adum			□	□	Format Pengumpulan Data dan informasi dari Timker dan Subag Adum	1 hari	Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum	
5	Memverifikasi semua data kinerja untuk bahan final laporan kinerja bulanan			□	◇	Hasil Kompilasi Pengumpulan Data dan Informasi dari Timker dan Subag Adum diverifikasi	3 hari	Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi	
6	Melaporkan hasil verifikasi data kinerja ke Kasubag Adum		□			Kertas Kerja Pengumpulan Data dan Informasi Hasil Pengukuran Kinerja yang telah diverifikasi	30 menit	Data Kinerja	
7	Melakukan input data kinerja ke dalam format rekapitulasi bulanan			□		Data Kinerja	1 hari	File format data kinerja laporan bulanan	
8	Menyimpan data kinerja bulanan			○		File format data kinerja laporan bulanan	30 menit	Arsip file format data kinerja laporan bulanan	

SOP Pengukuran Kinerja

 KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	NOMOR SOP	: OT.02.02/1.2/0404/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 12 November 2018
	REVISI	: Ke-3
	TANGGAL EFEKTIF	: 21 Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP. 19690221993031005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. IHR Tahun 2005 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekekarantinaan Kesehatan	1. Umum, minimal SLTA sederajat 2. Memahami Tata Administrasi Arsip	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP Pengarsipan Dokumen	1. Alat Tulis Kantor 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Komputer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	1. Buku Penomoran Surat; 2. Lembar Disposisi, dll	

PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	KASUBAG ADUM	TIM PENYUSUN LKJ	PERENCANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja	○	□	□	□	SK Tim Penyusun LKJ, Surat dan Format	1 hari	Disposisi	
2	Mengolah data dan menganalisa data kinerja dari pengumpulan data kinerja ke dalam kertas kerja perhitungan kinerja			□	□	Disposisi dan data kinerja	1 hari	Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
3	Memeriksa dan melakukan koreksi hasil perhitungan kinerja			□	◇	Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	3 hari	Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	
4	Melakukan pengesahan atas kertas kerja perhitungan kinerja yang telah valid	□	□		◇	Hasil Koreksi Format Kertas Kerja Perhitungan Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah disahkan	
5	Menyusun hasil perhitungan kinerja ke dalam format laporan kinerja			□	◇	Kertas Kerja Perhitungan Kinerja yang sudah Format laporan kinerja	1 hari	Format laporan kinerja	
6	Memeriksa dan melakukan koreksi atas draft laporan kinerja			□	◇	Draft Laporan Kinerja	2 hari	Draft Laporan Kinerja	
7	Mengesahkan draft laporan kinerja yang telah valid		□		◇	Draft Laporan Kinerja	30 menit	Draft Laporan Kinerja yang sudah disahkan	
8	Penandatanganan Laporan kinerja oleh Kepala Balai	□			◇	Draft Laporan Kinerja yang sudah disahkan	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	
9	Penggandaan laporan kinerja dan pengiriman ke Eselon 1 via email atau Jasa Kirim			□	◇	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai	30 menit	Laporan Kinerja yang sudah di ttd oleh Kepala Balai terkirim ke Eselon 1 dan diarsipkan oleh Arsiparis	SOP Pengukuran Kinerja

**Matriks RAK Kegiatan dan Pendanaan
serta Matriks Revisi RAK
KKP KELAS I MAKASSAR TAHUN 2020-2024**

**Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 1 Bulan Desember Tahun 2020
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar**

No	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	3,722,715	1,697,238	1,951,824	2,244,597	2,581,287	2,938,296,000	2,952,987,480	3,395,935,602	3,905,325,942	4,491,124,834	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	95%	95%	96%	153,734,000	154,502,670	177,678,071	204,329,781	234,979,248	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	90%	90%	90%	1,449,308,000	1,456,554,540	1,675,037,721	1,926,293,379	2,215,237,386	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
		4. Nilai kinerja anggaran	80	83	83	83	83	176,192,000	177,072,960	203,633,904	234,178,990	269,305,838	Bagian Tata Usaha
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Bagian Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		16,958,428,420	19,502,192,683	22,427,521,585	25,791,649,823	Bagian Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	72	75	75	75	5,485,586,000	5,513,013,930	6,339,966,020	7,290,960,922	8,384,605,061	Bagian Tata Usaha
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%	80%	80%	80%	218,618,000	218,618,000	251,410,700	289,122,305	332,490,651	Bagian Tata Usaha

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi 1 Bulan Desember Tahun 2020

**Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 2 Bulan Desember Tahun 2021
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar**

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	3,722,715	2,652,728	3,050,637	3,508,233	4,034,468	2,938,296,000	6,526,618,000	7,701,409,240	8,856,620,626	10,185,113,720	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	95%	95%	96%	153,734,000	562,344,000	663,565,920	763,100,808	877,565,929	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	90%	90%	90%	1,449,308,000	588,408,000	694,321,440	798,469,656	918,240,104	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	83	83	83	176,192,000	311,270,000	367,298,600	422,393,390	485,752,399	Substansi Tata Usaha
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Substansi Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		23,049,248,000	27,083,543,880	31,146,075,462	35,817,986,781	Substansi Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	5,485,586,000	209,060,000	129.353.000	131.708.000	151,464,000	Substansi Tata Usaha
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	70%	80%	80%	80%	218,618,000	266,484,000	518.750.000	528.200.000	607,430,000	Substansi Tata Usaha

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi 2 Bulan Desember Tahun 2021

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 3 Bulan Juli Tahun 2022
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3,722,715	2,652,728				2,938,296,000	6,526,618,000				Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			1	1	1			5.316.162.000	5.413.916.000	6.226.003,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	153,734,000	562,344,000	700.235.000	712.979.000	819,926,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	0,96	0,98	1	1,449,308,000	588,408,000	1.246.691.000	1.269.381.000	1,459,788,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	86	176,192,000	311,270,000	478.136.000	486.838.000	559,864,000	Substansi Tata Usaha
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Substansi Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		23,049,248,000	28.873.804.000	29.401.001.000	33,811,151,000	Substansi Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	5,485,586,000	209,060,000	246,690,800	283,694,420	326,248,583	Substansi Tata Usaha
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%				218,618,000	266,484,000				Substansi Tata Usaha
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	80%			314,451,120	361,618,788	415,861,606	Substansi Tata Usaha

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi 3 Bulan Juli Tahun 2022

**Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 4 Bulan Februari Tahun 2023
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar**

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3,722,715	2,652,728				2,938,296,000	6,526,618,000				Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			1	1	1			5.316.162.000	4.034.657.000	3,499,350,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	153,734,000	562,344,000	700.235.000	462.850.000	416,565,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	0,96	0,98	1	1,449,308,000	588,408,000	1.246.691.000	1.637.114.000	1,473,402,000	Substansi PKSE, UKLW dan PRL
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	83	85	86	86	176,192,000	311,270,000	478.136.000	570.231.000	513,208,000	Substansi Tata Usaha
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Substansi Tata Usaha
		5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		23,049,248,000	28.873.804.000	26.278.059.000	23,650,253,000	Substansi Tata Usaha
		6. Kinerja implementasi WBK satker	70	80	81	81	81	5,485,586,000	209,060,000	129.353.000	88.513.000	79,663,000	Substansi Tata Usaha
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%				218,618,000	266,484,000				Substansi Tata Usaha
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	80%	80%			518.750.000	816.732.000	735,059,000	Substansi Tata Usaha

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		8. Persentase Realisasi Anggaran				95%	95%				33.888.156.000	30.367.500.000	Substansi Tata Usaha
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%	92,5%					0	Substansi Tata Usaha

No.	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		8. Persentase Realisasi Anggaran				95%	95%				33.888.156.000	30.367.500.000	Subbag Adum dan Timker 5
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti				92,5%	92,5%					0	Subbag Adum dan Timker 5